





Analisis & Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

Tinjauan Umum

General Overview



Dinamika pada pasar keuangan global tersebut memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2020. Volatilitas nilai tukar rupiah meningkat seiring dengan aliran dana asing yang keluar dari pasar keuangan Indonesia terutama pada Maret 2020

The dynamics in the global financial market has contracted rRupiah exchange rate throughout 2020. Volatility of Rupiah rose along with the flow of foreign funds out of the Indonesian financial market, especially in March 2020.

ANALISA EKONOMI GLOBAL DAN NASIONAL

Perekonomian global pada tahun 2020 dihadapkan pada kondisi yang sangat menantang. Di tengah berlangsungnya perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat, serta tren pelemahan harga-harga komoditas, perekonomian kembali mengalami turbulensi akibat penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-9). Penyebaran COVID-19 yang terjadi sangat cepat menyebabkan aktivitas ekonomi global menurun. Dampak dari penurunan ekonomi global turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkontraksi sebesar 2,1% pada 2020. Selanjutnya, ketidakpastian meningkat dan mendorong investor untuk menghindari aset berisiko pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC ANALYSIS

The global economy in 2020 is faced very challenging conditions. In the midst of the ongoing China and United States trade war, as well as the trend of weakening commodity prices, the economy is experiencing another turbulence due to the spread of Coronavirus Disease (COVID-9). The rapid spread of COVID-19 has caused global economic activity to decline. The impact of the global economic downturn also affected Indonesia's economic growth, which contracted by 2.1% in 2020. Furthermore, uncertainty increased and encouraged investors to avoid risky assets in developing countries, including Indonesia.



Dinamika pada pasar keuangan global tersebut memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2020. Volatilitas nilai tukar rupiah meningkat seiring dengan aliran dana asing yang keluar dari pasar keuangan Indonesia terutama pada Maret 2020. Rata-rata pergerakan nilai tukar sepanjang 2020 tercatat pada level Rp14.529/USD, melemah dari rerata tahun 2019.

Berlanjutnya pelemahan nilai tukar tertahan oleh neraca transaksi berjalan Indonesia yang mencatatkan surplus pada semester II 2020 sebesar USD1,8 miliar. Penurunan permintaan domestik akibat terbatasnya mobilitas dan perilaku berjaga-jaga masyarakat menekan impor lebih dalam dari pelemahan ekspor (permintaan eksternal). Secara keseluruhan pada tahun 2020, transaksi berjalan Indonesia mencatatkan defisit yang

The dynamics in the global financial market has contracted rRupiah exchange rate throughout 2020. Volatility of Rupiah rose along with the flow of foreign funds out of the Indonesian financial market, especially in March 2020. The average exchange rate movement throughout 2020 was recorded at the level of Rp14. 529/ USD, lower than the 2019 average.

The continued exchange rate depreciation was restrained by Indonesia's current account, which recorded a surplus in semester II 2020 of USD1.8 billion. The decline in domestic demand due to limited mobility and precautionary behavior of the public suppressed imports more deeply than weakening exports (external demand). Overall in 2020, Indonesia's current account recorded a smaller deficit than the previous year, namely USD4.7 billion (-0.4% of GDP).

lebih kecil dari tahun sebelumnya yaitu USD4,7 miliar (-0,4% PDB).

Dalam merespon penurunan ekonomi pada tahun 2020, Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menyediakan stimulus yang besar melalui kebijakan fiskal dan moneter. Stimulus fiskal dianggarkan sebesar Rp695 triliun untuk belanja kesehatan, perlindungan sosial, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), insentif Pemerintah Pusat dan Daerah, insentif usaha, dan pembiayaan korporasi. Di sisi lain, BI melonggarkan kebijakan moneter dengan menurunkan suku bunga acuan sebesar 125 bps pada 2020. BI juga melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar primer dan sekunder serta menurunkan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) Primer sebesar 300bps (termasuk tambahan insentif untuk bank yang melakukan pembiayaan ekspor-impor, UMKM, dan sektor prioritas) untuk menjaga likuiditas perbankan tetap memadai sepanjang tahun 2020.

Menyambut tahun 2021, ekonomi Indonesia diproyeksikan akan tumbuh pada kisaran 3,0%-4,0%. Hal ini didorong oleh berlanjutnya tren pemulihan ekonomi global dan juga permintaan domestik. Pada sektor keuangan, arus modal asing diperkirakan kembali masuk secara bertahap seiring dengan optimisme pemulihan ekonomi serta kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif pada negara-negara maju. Dengan demikian, volatilitas nilai tukar rupiah diperkirakan akan lebih stabil pada 2021 dengan level rerata yang cenderung menguat dari tahun 2020. Hal ini juga ditopang oleh defisit neraca transaksi berjalan yang diperkirakan masih rendah pada kisaran 1,0%-1,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

In response to the economic downturn in 2020, the Government and Bank Indonesia (BI) provided a large stimulus through fiscal and monetary policies. The fiscal stimulus is budgeted at Rp.695 trillion for health spending, social protection, micro, small and medium enterprises (MSMEs), central and regional government incentives, business incentives, and corporate financing. On the other hand, BI relaxed monetary policy by lowering the benchmark interest rate by 125 bps in 2020. BI also purchased Government Securities (SBN) on the primary and secondary markets and lowered the Primary Statutory Reserves (GWM) ratio by 300 bps (including additional incentives for banks that carry out export-import financing, MSMEs, and priority sectors) to maintain adequate banking liquidity throughout 2020.

Approaching 2021, Indonesia's economy is projected to grow around 3.0%-4.0% level. This was driven by the continuing trend of global economic recovery as well as domestic demand. In the financial sector, foreign capital flows are predicted to return gradually in line with optimism for economic recovery and expansionary fiscal and monetary policies in advanced economies. Accordingly, rupiah exchange rate volatility is predicted to be more stable in 2021 with an average level that tends to strengthen from 2020. This is also supported by the current account deficit, which is predicted to remain low in the range of 1.0% -1.5% of Gross Domestic Product (GDP).

TINJAUAN INDUSTRI

Pada akhir 2020, nilai piutang pembiayaan bersih tahun 2020 menurun signifikan sebesar 18,2% dari jumlah piutang industri multifinance pada akhir 2019 yaitu Rp452,22 triliun. Rasio NPF juga memburuk hingga 4,01% (gross) pada akhir 2020, dibandingkan dengan 2,40% pada akhir 2019 sejalan dengan menurunnya perekonomian dan interaksi sosial yang disebabkan oleh pandemi.

Untuk mengurangi dampak tersebut, OJK meluncurkan program restrukturisasi utang lembaga pembiayaan pada Maret 2020. Sekitar Rp971 triliun pinjaman yang disalurkan bank telah direstrukturisasi. Nilai ini mencapai sekitar seperlima dari jumlah penyaluran pinjaman perbankan. Sementara itu, nilai kontrak yang direstrukturisasi di industri multifinance mencapai Rp192 triliun, hampir setengah dari jumlah pembiayaan yang disalurkan, yaitu Rp370 triliun pada akhir 2020. Program ini menunjukkan hasil yang cepat dan efektif dalam meredakan peningkatan NPL yang signifikan dan pengetatan arus permodalan.

Pembiayaan multiguna masih menjadi kontributor terbesar terhadap piutang pembiayaan di 2020, meskipun nilainya menyusut 19,1% menjadi Rp222 triliun, dibandingkan Rp275 triliun pada akhir 2019. Pembiayaan investasi menurun sebesar 17,7% menjadi Rp111 triliun pada akhir 2020, sementara pembiayaan modal kerja mencapai Rp25 triliun di 2020, atau 7,0% lebih rendah dari tahun sebelumnya. Kontributor terkecil terhadap jumlah piutang pembiayaan adalah pembiayaan berbasis syariah, yang melanjutkan penurunannya dari 2019 dengan penyusutan lebih lanjut sebesar 27,6% di 2020, menjadi hanya Rp12 triliun pada akhir tahun.

INDUSTRY OVERREVIEW

As end of 2020, the value of net financing receivables in 2020 decreased significantly by 18.2% from the total receivables of the multi-industry industry at the end of 2019, namely Rp452.22 trillion. The NPF ratio also deteriorated to 4.01% (gross) at the end of 2020, compared to 2.40% at the end of 2019 in line with the decline in the economy and social interaction caused by the pandemic.

To reduce this impact, OJK launched a financing institution debt restructuring program in March 2020. Approximately Rp971 trillion of loans disbursed by banks have been restructured. The value reached about one-fifth of total bank loan disbursements. Meanwhile, the value of restructured contracts in the multi-finance industry reached Rp192 trillion, almost half of the total disbursed financing, namely Rp370 trillion at the end of 2020. This program has shown quick and effective results in mitigating significant increases in NPLs and tightening capital flows.

Multipurpose financing still became largest contributor to financing receivables in 2020, although its value fell by 19.1% to Rp222 trillion, compared to Rp275 trillion as end of 2019. Investment financing decreased by 17.7% to Rp111 trillion at the end of 2020, while working capital financing reached Rp. Rp25 trillion in 2020, or 7.0% lower than the previous year. The smallest contributor to total financing receivables was sharia-based financing, which continued its decline from 2019 with a further depreciation of 27.6% in 2020, to only Rp12 trillion at end of the year.

Tinjauan Operasi dan Keuangan

Operational and Financial Reviews

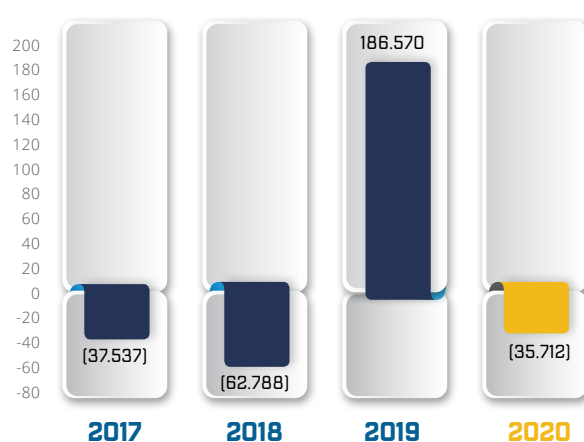
TINJAUAN OPERASI

Sepanjang tahun 2020, Perseroan membukukan pendapatan sebesar negatif Rp35,71 milyar, turun Rp222,28 milyar atau 119,14% dibandingkan dengan pendapatan tahun 2019 sebesar Rp186,57 milyar. Penurunan pendapatan ini karena penurunan pada seluruh segmen usaha Perseroan yang terdiri dari pendapatan sewa pembiayaan, pendapatan ijarah – bersih, pendapatan modal kerja, dan pendapatan lain-lain.

OPERATIONAL REVIEW

Throughout 2020, the Company posted a negative revenue of Rp35.71 billion, a decrease of Rp222.28 billion or 119.14% compared to 2019 revenue of Rp186.57 billion. The decrease in income was due to a decrease in all of the Company's business segments, which consist of finance lease income, ijarah - net income, working capital income, and other income.

Pendapatan Revenue



Tabel Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Tahun 2020 dan 2019 (dalam ribuan rupiah)

Statements Of Profit Or Loss and Other Comprehensive Income 2020 and 2019 (in thousands Rupiah)

Keterangan Description		2020	2019	Kenaikan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	
				Selisih Difference	%
Pendapatan	Revenues				
Pendapatan sewa pembiayaan	Finance Lease Income	15.428.418	31.401.998	(15.973.581)	-50,87%
Pendapatan ijarah - bersih	Ijarah Income-Net	(53.374.008)	135.434.090	(188.808.098)	-139,41%

Tabel Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Tahun 2020 dan 2019 (dalam ribuan rupiah)

Statements Of Profit Or Loss and Other Comprehensive Income 2020 and 2019 (in thousands Rupiah)

Keterangan Description		2020	2019	Kenaikan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	
				Selisih Difference	%
Pendapatan modal kerja	Working Capital Income	818.176	4.031.282	(3.213.106)	-79,70%
Pendapatan lain-lain	Other Income	1.415.419	15.702.386	(14.286.967)	-90,99%
Jumlah pendapatan	Total Revenues	(35.711.995)	186.569.756	(222.281.751)	119,14%
Beban	Expenses				
Beban keuangan	Finance Cost	(13.250.772)	(24.329.443)	(11.078.672)	-45,54%
Bagi hasil	Profit Sharing	(10.241.045)	(10.657.287)	(416.242)	-3,91%
Beban umum dan administrasi	General And Administrative Expenses	(32.176.392)	(54.564.450)	(22.388.058)	-41,03%
Kerugian penurunan nilai	Impairment Losses	(488.723.890)	(250.307.376)	238.416.514	95,25%
Beban lain-lain	Other Charges	(4.435.454)	(49.428.795)	(44.993.341)	-91,03%
Jumlah beban	Total Expenses	(548.827.553)	(389.287.352)	159.540.201	40,98%
Keuntungan atas penyelesaian utang	Gain On Debt Settlement	-	55.309.760	(55.309.760)	-100,00%
Rugi sebelum pajak	Loss Before Tax	(584.539.548)	(147.407.836)	(437.131.712)	-296,55%
Manfaat pajak	Tax Benefit	(13.557.693)	29.475.721	(43.033.415)	-146,00%
Rugi bersih tahun berjalan	Net Loss For The Year	(598.097.241)	(117.932.115)	(480.165.126)	-407,15%
Penghasilan komprehensif lain	Other Comprehensive Income				
Keuntungan/ (kerugian) aktuarial - bersih setelah pajak tangguhan	Items That Will Not Be Reclassified Subsequently To Profit Or Loss	424.321	(44.205)	468.526	1059,89%
Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan	Total Comprehensive Loss For The Year	(597.672.920)	(117.976.320)	(479.696.600)	406,60%
Rugi per saham dasar	Loss Per Share Basic	(394,17)	(77,72)	316,45	407,17%

Pendapatan dari sewa pembiayaan tahun 2020 tercatat sebesar Rp15,43 miliar, turun Rp15,97 miliar atau 50,87%.

Pendapatan Ijarah tahun 2020 tercatat sebesar negatif Rp53,37 miliar dari sebesar Rp135,43 miliar pada tahun 2019.

Selain itu, pada tahun 2020, Perseroan membukukan pendapatan modal kerja sebesar Rp818,18 juta dan pendapatan lain-lain sebesar Rp1,42 miliar.

In 2020, Revenues from finance leases was recorded at Rp15.43 billion, decreased by Rp15.97 billion or 50.87%.

In 2020, Ijarah revenue was recorded at negative Rp53.37 billion from Rp135.43 billion in 2019.

In addition, in 2020, the Company booked working capital income of Rp818.18 million and other income of Rp1.42 billion.

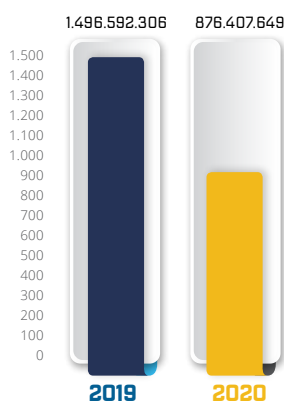
TINJAUAN KEUANGAN

Analisis dan pembahasan pada bagian ini harus dibaca bersamaan dengan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (afiliasi PKF) yang juga disajikan dalam Laporan Terintegrasi ini, dan mendapat opini Disclaimer (tidak menyatakan pendapat) dengan penjelasan sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.

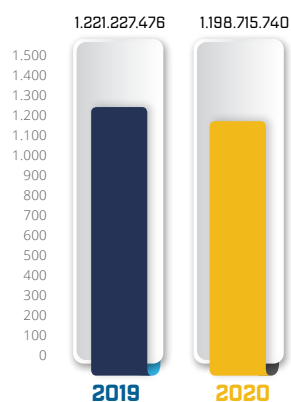
FINANCIAL REVIEW

The following analysis and discussion shall be read altogether with the Financial Statements for the years ended December 31, 2020 which have been audited by KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners (PKF affiliates) which is also presented in this Integrated Report, and obtain unqualified opinion, Disclaimer (not expressing an opinion) with an explanation as stated in the Independent Auditor's Report, in accordance with accounting principles applied in Indonesia.

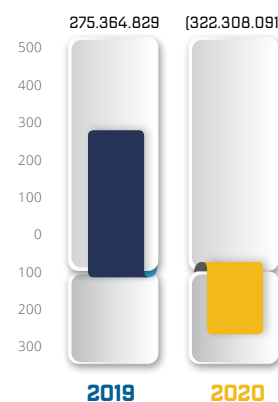
ASET Assets



LIABILITAS Liability



EKUITAS Equity



Tabel Laporan Posisi Keuangan Tahun 2020 dan 2019 (dalam ribuan Rupiah)

Table Of Statements Of Financial Position 2020 and 2019 (in thousand Rupiah)

Keterangan Description		2020	2019	Kenaikan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	
				Selisih Difference	%
JUMLAH ASET	TOTAL ASSETS	876.407.648	1.496.592.306	(620.184.658)	-41,44%
JUMLAH LIABILITAS	TOTAL LIABILITIES	1.198.715.739	1.221.227.476	(22.511.738)	-1,84%
JUMLAH EKUITAS	TOTAL EQUITY	(322.308.091)	275.364.829	(597.672.920)	-217,05%

Aset

Pada tahun buku 2020, Perseroan mencatat penurunan jumlah aset sebesar Rp620,18 miliar atau 41,44% dari sebelumnya Rp1,50 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp876,41 miliar. Penurunan tersebut terutama berasal dari penurunan aset lancar sebesar Rp383,74 miliar atau 45,07% diikuti penurunan aset tidak lancar sebesar Rp200,91 miliar atau 31,14%.

Jumlah aset lancar menurun pada tahun 2020 dari Rp851,34 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp467,60 miliar. Penurunan tersebut terutama berasal dari penurunan investasi neto sewa pembiayaan sebesar Rp360,53 miliar atau 46,05% dan penurunan kas dan setara kas sebesar Rp15,78 miliar atau 65,78%.

Selanjutnya, jumlah aset tidak lancar menurun pada tahun 2020 dari Rp645,26 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp408,81 miliar. Penurunan tersebut terutama berasal dari penurunan aset lain-lain sebesar Rp139,51 miliar atau 50,14%.

Liabilitas

Jumlah liabilitas pada tahun 2020 yang menurun sebesar Rp22,51 miliar atau 1,84% menjadi Rp1,20 triliun dari Rp1,22 triliun pada tahun 2019 dengan penurunan liabilitas jangka pendek sebesar Rp22,86 miliar atau 2,74% dan peningkatan liabilitas jangka panjang Rp349,08 juta atau 0,09%.

Assets

In the fiscal year 2020, the Company recorded a decrease in total assets of Rp620,18 billion or 41,44% from previously was Rp1.50 trillion in 2019 to Rp876,41 billion. The decrease mainly due to a decrease in current assets by Rp383.74 billion or 45.07% followed by a decrease in non-current assets by Rp200.91 billion or 31.14%.

In 2020, Total current assets decreased from Rp851.34 billion in 2019 to Rp467.60 billion. The decrease was mainly due to a decrease in net investment in finance leases by Rp360.53 billion or 46.05% and a decrease in cash and cash equivalents by Rp15.78 billion or 65.78%.

Furthermore, in 2020, total non-current assets decreased from Rp645.26 billion in 2019 to Rp408,81 billion. The decrease was mainly due to a decrease in other assets of Rp139.51 billion or 50.14%.

Liabilities

In 2020, Total liabilities decreased by Rp22.51 billion or 1.84% to Rp1.20 trillion from Rp1.22 trillion in 2019 with a decrease in short-term liabilities of Rp22.86 billion or 2.74% and an increase in long-term liabilities of Rp349,08 million or 0.09%.

Penurunan liabilitas jangka pendek dari Rp835,66 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp812,80 miliar pada tahun 2020 terutama berasal dari penurunan utang bank sebesar Rp19,23 atau 2,84% dan utang usaha sebesar Rp3,95 miliar atau 5,34%.

Selanjutnya, peningkatan liabilitas jangka anjang dari Rp385,56 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp385,91 miliar pada tahun 2020 terutama berasal dari peningkatan liabilitas imbalan pasca kerja sebesar Rp267,43 juta atau 30,71%.

Ekuitas

Penurunan ekuitas terjadi akibat akumulasi kerugian, sehingga jumlah ekuitas Perseroan pada tahun 2020 tercatat sebesar negatif Rp322,31 miliar, menurun Rp597,67 miliar atau 217,05% dibandingkan Rp275,36 miliar pada tahun 2019.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Rugi bersih tahun berjalan tahun 2020 terealisasi negatif sebesar Rp598,10 miliar, terjadi penurunan sebesar Rp480,17 miliar atau 407,15% dibandingkan tahun 2019. Seiring dengan hal tersebut, jumlah rugi komprehensif tahun berjalan tahun 2020 juga terjadi penurunan Rp479,70 miliar atau 406,60% dibandingkan tahun 2019 menjadi negatif sebesar Rp597,67 miliar.

LAPORAN ARUS KAS

Porsi kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi turun dari Rp58,95 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp14,90 miliar pada tahun 2020. Kemudian tercatat kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi naik dari negatif Rp513,35 juta pada tahun 2019 menjadi Rp1,04 miliar

The decrease in short-term liabilities from Rp835.66 billion in 2019 to Rp812.80 billion in 2020 mainly originated from a decrease in bank debt of Rp19.23 or 2.84% and trade payables of Rp3.95 billion or 5.34%.

Furthermore, the increase in long-term liabilities from Rp385.56 billion in 2019 to Rp385.91 billion in 2020 mainly came from an increase in post-employment benefits liabilities of Rp267.43 million or 30.71%.

Equity

The decrease in equity occurred due to accumulated losses, so that the total equity of the Company in 2020 was recorded at negative Rp322,31 billion, decreased by Rp597,67 billion or 217,05% compared to Rp275.36 billion in 2019.

STATEMENT OF INCOME AND LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Net loss for the year 2020 was realized negatively of Rp598,10 billion, a decrease of Rp480,17 billion or 407,15% compared to 2019. In line with this, the total comprehensive loss for the year 2020 also decreased by Rp479,70 billion or 406,60% compared to 2019 to negative at Rp597,67 billion.

STATEMENT OF CASH FLOWS

The portion of net cash obtained from operating activities decreased from Rp.58.95 billion in 2019 to Rp.14.90 billion in 2020. Then it was recorded that the net cash used for investing activities increased from negative Rp.513.35 million in 2019 to Rp1.04

pada tahun 2020. Serta kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan turun dari negatif Rp108,70 miliar pada tahun 2019 menjadi negatif Rp31,80 miliar pada tahun 2020. Sehingga kas dan setara kas pada akhir tahun 2020 tercatat sebesar Rp8,21 miliar.

billion in 2020. As well as net cash used for financing activities decreased from negative Rp108.70 billion in 2019 to negative Rp31.80 billion in 2020. Therefore, that cash and cash equivalents at the end of 2020 was recorded at Rp8.21 billion.

TABEL LAPORAN ARUS KAS Tahun 2020 dan 2019 (dalam ribuan Rupiah)

Cash Flow Statements 2020 and 2019 (in thousand Rupiah)

Keterangan Description		2020	2019	Kenaikan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	
				Selisih Difference	%
Arus kas dari aktivitas operasi	Cash Flows From Operating Activities	11.824.936	58.949.278	(47.124.342)	-79,94%
Arus kas dari aktivitas investasi	Cash flows from investing activities	730.582	(513.347)	1.243.929	-242,32%
Arus kas dari aktivitas pendanaan	Cash flows from financing activities	(28.411.217)	(108.699.608)	(80.288.391)	-73,86%

RASIO KINERJA KEUANGAN

FINANCIAL RATIO

Tabel Rasio Keuangan Tahun 2020 dan 2019 (dalam ribuan Rupiah)

Financial Ratio in 2020 and 2019 (in thousand Rupiah)

Rasio Kinerja Keuangan Financial Ratio		2020	2019	2018
Rasio Laba (Rugi) terhadap Aset	Return On Assets (ROA)	-68,24%	-8%	-9%
Rasio Laba (Rugi) terhadap Ekuitas	Return On Equity (ROE)	N/A	-43%	-42%
Gearing Ratio	Gearing Ratio	-3,14x	3,71x	2,9 x
Financing to Asset Ratio (FAR)	Financing To Asset Ratio (FAR)	57,9%	62,3%	65,15%
Modal Sendiri terhadap Modal Disetor (MSMD)	Paid-Up Capital Equity Ratio	-45,40%	38,8%	55,40%
Permodalan	Capital	-25,23%	7,75%	20,67%
Non Performing Financing (NPF) - Nett	Non Performing Financing (NPF) - Nett	0,58%	12,96%	55,82%

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Perseroan telah memperoleh pengesahan Majelis Hakim terhadap Perjanjian Perdamaian yang disusun Perseroan dengan para kreditur. Perjanjian Perdamaian ini telah ditindaklanjuti dengan beberapa aksi korporasi untuk menyelesaikan kewajiban, yang diawali dengan konversi utang menjadi ekuitas uang diiringi dengan Penambahan Modal Tanpa HMETD. Kemudian berlanjut dengan disepakatinya skema restrukturisasi utang kepada beberapa kreditur, dan dilakukannya Penambahan Modal melalui HMETD. Perseroan berharap rampungnya beragam skema restrukturisasi ini membuat kemampuan membayar utang lebih baik dan dapat menjaga kelangsungan usaha Perseroan

KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Perseroan masih mencatat beberapa piutang pembiayaan yang perlu diselesaikan. Perseroan melakukan berbagai upaya untuk menghindari Non Performing Financing yang dapat mengganggu kelangsungan hidup Perseroan. Saat ini Perseroan belum dapat memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk rasio NPF dibawah 5%, tetapi Perseroan telah mengajukan relaksasi kepada OJK untuk perubahan NPF dimana rasio sesuai ketentuan akan dicapai pada tahun 2025.

INVESTASI BARANG MODAL TAHUN 2020

Perseroan pada tahun 2020 tidak melakukan investasi barang modal, baik dengan pihak berelasi maupun dengan pihak ketiga.

ABILITY TO PAY DEBT

The Company has obtained ratification from the Panel of Judges of the Peace Agreement prepared by the Company with its creditors. This Peace Agreement has been followed up with several corporate actions to settle obligations, which began with the conversion of debt to equity accompanied by Capital Additions without Preemptive Rights. Then continued with the agreement on a debt restructuring scheme to several creditors, and the implementation of Capital Additions through Preemptive Rights. The company hopes that the completion of various restructuring schemes will improve the ability to pay debts and can maintain sustainability of the Company's Business.

COLLECTIBILITY OF RECEIVABLES

The company still recorded several financing receivables that need to be settled. To avoid Non Performing Financing that may disrupt the Company's survival, various efforts to manage accounts receivable have been carried out. Recently, the Company has not been able to fulfill the provisions of the Financial Services Authority Regulation for an NPF ratio below 5%, however, the Company has revised the follow-up plan on NPF improvement where according to the provisions, the ratio will be achieved in 2025.

CAPITAL EXPENDITURE IN 2020

In 2020, the Company did not place any capital expenditure, either with related parties or with third parties.

Perbandingan Antara Realisasi 2020, RBT 2020, Dan Proyeksi 2021 (dalam jutaan Rupiah)

Comparison Between Business Plan and Realization in 2020 and Projection for 2021

Keterangan Description		Realisasi 2020 Realization 2020	RBT 2020 RBT 2020	Pencapaian Achievement	Proyeksi 2021 Projections In 2021
Aset	Assets	876.408	1.365.771	64,17%	1.951.892
Liabilitas	Liabilities	1.198.716	1.192.380	100,53%	1.167.127
Ekuitas	Equity	(322.308)	173.391	-185,89%	784.765

Aset Perseroan di tahun 2021 di proyeksikan meningkat menjadi Rp1,95 triliun dibandingkan realisasi tahun 2020. Peningkatan aset ini disebabkan karena belum adanya pendanaan baru untuk aset Perseroan.

The Company's assets in 2021 are projected to increase to Rp1.95 trillion compared to the realization in 2020. This increase in assets is due to the absence of new funding for the Company's assets.

Liabilitas Perseroan di tahun 2021 diproyeksikan menurun dari realisasi tahun 2020 menjadi Rp1,17 triliun. Penurunan liabilitas ini disebabkan karena Perseroan tidak menambah hutang baru dengan perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

The Company's liabilities in 2021 are projected to decline from the realization in 2020 to Rp1.17 trillion. The decrease in liabilities was due to the Company not adding new debts with banks or other financial institutions.

Modal IBF di tahun 2021 diproyeksikan menjadi Rp784,77 miliar dibandingkan dengan realisasi tahun 2020. Peningkatan modal ini disebabkan karena kerugian yang dialami oleh Perseroan.

IBF's capital in 2021 is projected to be Rp784.77 billion compared to the realization in 2020. This increase in capital is due to losses incurred by the Company.

(dalam jutaan Rupiah)

(in million Rupiah)

Keterangan Deskripsi		Realisasi 2020 Realisasi 2020	RBT 2020 RBT 2020	Pencapaian Pencapaian	Proyeksi 2021 Proyeksi 2021
Pendapatan	Income	(35.712)	(260.020)	13,73%	22.345
Rugi bersih tahun berjalan	Current year net loss	(598.097)	(101.974)	586,52%	(126.323)
Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan	Total comprehensive loss for the current year	(597.673)	(101.974)	586,10%	(126.323)

Di akhir tahun 2021, Perseroan diproyeksikan masih membukukan Rugi (Bersih) sebesar Rp126,32 miliar. Hal ini disebabkan oleh masih tingginya beban operasional Perseroan terutama pada beban pembentukan cadangan piutang pembiayaan bermasalah.

At the end of 2021, the Company is projected to still book a loss (net) of Rp. 126.32 billion. This is due to the high operational expenses of the Company, especially the expense of establishing reserves for non-performing financing receivables.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Tidak ada informasi dan fakta material yang dapat mempengaruhi aktivitas dan kinerja Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan pada 31 Desember 2020.

SUBSEQUENT MATERIAL INFORMATION AND FACTS AFTER ACCOUNTANT'S REPORT DATE

There is no material information and facts that can affect the activities and performance of the Company that occur after the date of the financial statements as at December 31, 2020

PROSPEK USAHA

Sepanjang tahun 2021, diprediksi kondisi pandemi Covid-19 masih belum pulih sempurna dan melihat kondisi Perseroan dengan kualitas pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) yang masih jauh diatas 5% serta kerugian yang masih dialami oleh Perseroan, maka di tahun 2021 ini, dengan dukungan penuh dari seluruh Pemegang Saham dan Para Kreditur serta mengacu kepada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan Penerapan Manajemen Risiko maka Perseroan akan fokus dengan langkah-langkah strategis yang telah ditetapkan.

Kerugian yang dialami oleh Perseroan berdampak terhadap penurunan modal Perseroan, sehingga untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ["OJK"] yang terkait dengan permodalan, Perseroan perlu mendapat dukungan pendanaan dari pihak perbankan maupun investor strategis lainnya. Pendanaan yang diperoleh akan digunakan sepenuhnya untuk modal kerja Perseroan sehingga Perseroan dapat kembali memberikan pembiayaan baru kepada calon debitur yang potensial sesuai dengan target market Perseroan.

BUSINESS PROSPECT

Throughout 2021, it is predicted that the Covid-19 pandemic conditions will still not fully recover and seeing the condition of the Company with the quality of non-performing financing which is still far above 5% and losses that are still experienced by the Company, then in 2021, with full support of all Shareholders and Creditors and by referring to the principles of Good Corporate Governance and Implementation of Risk Management, the Company will focus on the strategic steps that have been determined.

The losses suffered by the Company have an impact on the decrease in the Company's capital, so that in order to comply with the provisions of the Financial Services Authority ["OJK"] relating to capital, the Company needs to obtain financial support from banks and other strategic investors. Funding obtained will be used fully for the Company's working capital so that the Company can again provide new financing to potential borrowers in accordance with the Company's target market.

Walaupun dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, dirasa sulit bagi Perseroan untuk mendapatkan pendanaan baru baik dari perbankan maupun dari investor strategis lainnya, namun dengan dukungan penuh dari Pemegang Saham dan Para Kreditor sebagaimana yang telah disampaikan kepada OJK melalui surat Perseroan nomor 021/IBF/CPL-SK/IX/20 Tanggal 30 September 2020 perihal Penyampaian Dokumen Pernyataan Tidak Keberatan Atas Rencana Pemenuhan dan Aksi Korporasi PT Intan Baruprana Finance Tbk; Perseroan optimis untuk dapat mempertahankan kelangsungan usahanya.

Untuk menekan kerugian perusahaan, Perseroan juga telah melakukan efisiensi diberbagai bidang termasuk sumber daya manusia. Namun dengan tingkat kompetensi karyawan yang memadai, dengan rangkap tugas yang diberikan, diharapkan mampu mencapai target yang ditentukan dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan Manajemen Risiko.

1. Menjaga arus kas untuk kelangsungan usaha Perseroan sehingga Perseroan tidak mengalami kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya kepada Para Kreditor sesuai dengan Perubahan Perjanjian Perdamaian yang telah ditandatangani bersama pada tanggal 25 November 2020. Kegagalan Perseroan dalam pembayaran kewajiban kepada Para Kreditor akan berdampak terhadap kepailitan Perseroan;
2. Memenuhi target financial sesuai ketentuan regulator terutama yang terkait dengan permodalan Perseroan sehingga Perseroan berupaya untuk menggandeng investor baru melalui aksi korporasi yang direncanakan akan dilakukan pada pertengahan tahun 2021 dengan target perolehan dana sebesar Rp. 750 Milyar;
3. Memberikan fasilitas pembiayaan baru dari dana hasil aksi korporasi yang

Even though in the conditions of the Covid-19 pandemic, it is difficult for the Company to obtain new funding from both banks and other strategic investors, but with the full support of Shareholders and Creditors as conveyed to OJK through the Company's letter number 021/IBF/CPL-SK/IX/20 Dated 30 September 2020 regarding Submission of Documents for Statement of No Objection on the Compliance Plan and Corporate Action of PT Intan Baruprana Finance Tbk; The Company is optimistic to be able to maintain its business continuity.

To reduce company losses, the Company has also conducted efficiency in various fields including human resources. However, with an adequate level of employee competence, with the multiple assigned tasks, it is hoped that they will be able to achieve the determined targets while maintaining the principles of prudence, Good Corporate Governance and Risk Management.

1. Maintain cash flow for the continuity of the Company's business so that the Company does not experience failure in carrying out its obligations to Creditors in accordance with the Amendment to the Peace Agreement which was jointly signed on November 25, 2020. The Company's failure to pay its obligations to Creditors will have an impact on the Company's bankruptcy;
2. Fulfill the financial targets in accordance with the regulatory provisions, especially those related to the Company's capital so that the Company seeks to partner with new investors through corporate actions planned to be carried out in mid-2021 with a target of obtaining funds of Rp. 750 billion;

mengarah kepada pembiayaan ramah lingkungan dalam rangka penerapan keuangan berkelanjutan (*sustainable financing*) sesuai dengan POJK 51 tahun 2017 yang mengatur tentang Pembiayaan Berkelanjutan;

4. Melakukan kerjasama dengan pabrikan alat-alat berat dengan merk-merk baru (umumnya berasal dari China) melalui PT Intraco Penta Prima Service (IPPS) yang merupakan salah satu anak usaha INTA Grup.
5. Memperbaiki kualitas pembiayaan bermasalah secara bertahap baik melalui proses restrukturisasi, novasi atau bahkan melalui jalur hukum untuk debitur-debitur yang sudah sangat tidak kooperatif.

3. Providing new financing facilities from funds resulting from corporate actions that lead to environmentally friendly financing in the context of implementing sustainable finance in accordance with POJK 51 of 2017 which regulates Sustainable Financing;

4. Cooperating with heavy equipment manufacturers with new brands (generally from China) through PT Intraco Penta Prima Service (IPPS), which is one of the INTA Group's subsidiaries.
5. Gradually improving the quality of problem financing, either through the restructuring process, innovation or even through legal channels for debtors who are already less cooperative.

PEMASARAN DAN PENGEMBANGAN BISNIS

Sepanjang tahun 2021, walau diprediksi pandemi Covid-19 ini masih belum berakhir, Perseroan tetap berupaya untuk mengembangkan usahanya dengan dukungan penuh dari Pemegang Saham dan Para Kreditur dengan fokus utamanya tetap pada pembiayaan alat-alat berat. Perseroan melakukan berbagai upaya untuk dapat bertahan ditengah situasi yang tidak menentu ini dan membuka kesempatan untuk menggandeng para *investor* yang tertarik menjalin kemitraan strategis dengan Perseroan.

Dari sisi pangsa pasar, telah terjadi perubahan yang awalnya didominasi oleh pemain besar (Komatsu, Cat, Hitachi, & Kobelco), saat ini merk-merk baru (umumnya dari China) mulai mendapatkan penerimaan yang baik di pasar. Segmen ini adalah target utama Perseroan di masa mendatang mengingat kurangnya dukungan pembiayaan di Indonesia untuk segmen tersebut, sedangkan untuk segmen pemain besar, Perseroan masih menargetkan untuk melakukan pembiayaan namun dengan margin yang relatif lebih kecil apabila

MARKETING AND BUSINESS DEVELOPMENT

Throughout 2021, even though it is predicted that the Covid-19 pandemic is still not over, the Company continues to strive to develop its business with the full support of Shareholders and Creditors with the main focus on financing heavy equipment. The Company has made various efforts to survive in the midst of this uncertain situation and opens opportunities to partner with investors who are interested in establishing strategic partnerships with the Company.

In terms of market share, there has been a change which was originally dominated by big players (Komatsu, Cat, Hitachi, & Kobelco), nowadays new brands (mainly from China) are starting to gain good acceptance in the market. This segment is the main target of the Company in the future considering the lack of financial support in Indonesia for this segment, while for the large player segment, the Company is still targeting to make financing but with a relatively smaller margin when compared to the segment of these new brands.

dibandingkan dengan segmen merk-merk baru tersebut.

Untuk itu maka Perseroan merencanakan akan melakukan kerjasama dengan pabrikan alat-alat berat yang akan berinvestasi di Indonesia (khususnya dari China) dan menjajaki peluang kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya. pasar alat-alat berat masih memiliki potensi yang sangat besar, dimana total pangsa pasar untuk alat berat nasional berkisar antara Rp20 – Rp30 triliun per tahun (diluar *service* dan *sparepart*). Dengan meningkatnya permintaan produk tambang *non-coal* seperti tembaga dan nikel, diperkirakan penjualan alat berat nasional akan terus meningkat di masa mendatang. Melihat pangsa pasar alat-alat berat yang tetap memiliki potensi, maka Perseroan akan tetap focus pada pembiayaan alat-alat berat.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Perseroan memiliki kebijakan untuk membagikan dividen setidaknya sekali setahun, kecuali diputuskan lain dalam RUPS. Atas persetujuan RUPS, Direksi Perseroan akan melakukan pembagian dividen yang dalam pelaksanaannya memperhatikan kondisi keuangan dan tingkat kesehatan Perseroan. Besaran laba bersih yang berlaku bagi pembayaran dividen, sesuai peraturan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, sebelumnya akan dilakukan penyisihan dana cadangan wajib.

PROGRAM OPSI SAHAM KARYAWAN

Berdasarkan Akta Notaris No. 33 tanggal 27 Agustus 2014 dari Fathiah Helmi, S.H., pemegang saham menyetujui:

For this reason, the Company plans to collaborate with heavy equipment manufacturers that will invest in Indonesia (especially from China) and explore opportunities for cooperation with other financial institutions. The heavy equipment market still has enormous potential, where the total market share for national heavy equipment ranges from Rp. 20 - Rp. 30 trillion per year (excluding service and spare parts). With the increasing demand for non-coal mining products such as copper and nickel, it is estimated that national heavy equipment sales will continue to increase in the future. Seeing the market share of heavy equipment that still has potential, the Company will remain focused on financing heavy equipment.

DIVIDEND POLICY

The company has a policy to distribute dividends at least once a year, unless otherwise decided at the GMS. With the approval of the GMS, the Company's Board of Directors will make a dividend distribution which in its implementation takes into account the financial condition and soundness of the Company. Total net income that applies to dividend payments is in accordance with the applicable regulations and the Articles of Association of the Company, and at first a provision for mandatory reserve funds will be allocated.

EMPLOYEE STOCK OPTION PLAN

Based on Notarial Deed No. 33 dated 27 August 2014 of Fathiah Helmi, S.H., the stockholders approved the following:

A. Hak Opsi akan didistribusikan kepada peserta MESOP dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan atau sebanyak-banyaknya 317.372.000 Hak Opsi (pada waktu dipublikasikan).

B. MESOP akan dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu:

- Tahap I:
30% dari jumlah Hak Opsi yang akan didistribusikan dalam program MESOP (masa laku selama 5 tahun terhitung sejak tanggal penerbitannya dan baru dapat digunakan setelah melewati 1 tahun periode vesting sejak tanggal penerbitan)
- Tahap II :
Tranche A, 30% dari jumlah Hak Opsi yang akan didistribusikan dalam program MESOP (masa laku selama 5 tahun terhitung sejak tanggal penerbitannya dan baru dapat digunakan setelah melewati 1 tahun periode vesting sejak tanggal penerbitan).

Tranche B, 40% dari jumlah Hak Opsi yang akan didistribusikan dalam program MESOP (masa laku selama 5 tahun terhitung sejak tanggal penerbitannya dan baru dapat digunakan setelah melewati 2 tahun periode vesting sejak tanggal penerbitan)

Jumlah Hak Opsi yang akan didistribusikan pada program MESOP Tahap I sebanyak 95.211.600 saham dengan harga pelaksanaan Rp299 per saham untuk saham dengan nilai nominal Rp100 per saham. Tanggal penerbitan Hak Opsi akan efektif sejak tanggal persetujuan Bursa Efek Indonesia atas permohonan Perusahaan atas pencatatan saham tambahan yang sudah diserahkan kepada Bursa Efek Indonesia berdasarkan Surat No. 008/CORSEC/IBF/2015 pada tanggal 10 Februari 2015.

A. Option Right will be distributed to participants of MESOP at a total maximum amount equivalent to 10% of the total issued and paid-up capital of the Company or a maximum of 317,372,000 Option Right (at the time of publication).

B. The MESOP will be executed in 2 stages, as follows:

- Stage I:
30% of the total Option Right will be distributed in MESOP program (option life of 5 years from issuance date and can be executed after 1 year vesting period after issuance date)
- Stage II :
Tranche A, 30% of the total Option Right will be distributed in MESOP program (option life of 5 years from issuance date and can be executed after 1 year vesting period after issuance date).

Tranche B, 40% of the total Option Right will be distributed in MESOP program (option life 5 years from issuance date and can be executed after 2 years through vesting period after issuance date)

Total Option Right to be distributed in MESOP program Stage I totalled to 95,211,600 stocks with exercise price at Rp299 per share for stocks with par value at Rp100 per share. Issuance date of this Option Right will be effective from the date of Bursa Efek Indonesia's approval of Company's request for additional stocks registration which was submitted to Bursa Efek Indonesia based on Letter No. 008/CORSEC/IBF/2015 dated 10 February 2015.

Biaya pelaksanaan opsi saham karyawan sebesar nihil di tahun 2020 dan Rp(13.622.406) di tahun 2019 dicatat dalam gaji dan tunjangan karyawan pada beban umum dan administrasi dan disajikan pada modal lain-lain - opsi saham karyawan, dalam laporan posisi keuangan.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Sifat Pihak Berelasi:

- PT Intraco Penta Tbk dan PT Inta Trading adalah pemegang saham Perusahaan.
- PT Terra Factor Indonesia, PT Intraco Penta Wahana, PT Columbia Chrome Indonesia dan PT Intraco Penta Prima Servis adalah pihak berelasi yang pemegang saham utamanya sama dengan Perusahaan.
- Halex Halim adalah Komisaris Utama PT Intraco Penta Tbk (Induk Perusahaan).
- Petrus Halim adalah Komisaris Perusahaan dan Direktur PT Intraco Penta Tbk.

PERUBAHAN PERATURAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERSEROAN

Tidak ada peraturan baru yang diterbitkan Pemerintah atau lembaga pemerintah atau regulator lainnya pada tahun 2020 yang berpengaruh signifikan terhadap Perseroan.

Stock option expense amounting to nil in 2020 and Rp(13,622,406) in 2019 is recorded under salaries and allowances in general and administrative expenses and presented as other equity-management and employee stock option plan, in the statements of financial position.

INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTIONS WITH CONFLICTS OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PARTIES

Nature of Related Parties:

- PT Intraco Penta Tbk and PT Inta Trading are the Company's shareholders.
- PT Terra Factor Indonesia, PT Intraco Penta Wahana, PT Columbia Chrome Indonesia and PT Intraco Penta Prima Servis are related parties whose main shareholders are the same as the Company.
- Halex Halim is the President Commissioner of PT Intraco Penta Tbk (Parent Company).
- Petrus Halim is the Company's Commissioner and Director of PT Intraco Penta Tbk

CHANGES IN REGULATIONS WITH SIGNIFICANT IMPACT TO THE COMPANY

There are no new regulations issued by the Government or government institutions or other regulators in 2020 which have a significant effect to the Company.

DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI TERHADAP LAPORAN KEUANGAN

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Baru Dan Revisi (Psak) Dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("I SAK")

a. Pernyataan dan interpretasi standar akuntansi baru dan revisi yang berlaku efektif pada atau setelah 1 Januari 2020a.

Standar baru dan amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 71: "Instrumen Keuangan";
- PSAK 72: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan";
- PSAK 73: "Sewa"
- PSAK 62 (Amendemen 2017): "Kontrak Asuransi tentang Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi";
- PSAK 15 (Amendemen 2017): "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";
- PSAK 71 (Amendemen 2018): "Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif";
- ISAK 35: "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba";
- PSAK 1 (Amendemen 2019): "Penyajian Laporan Keuangan tentang Judul Laporan Keuangan";
- PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2019): "Penyajian Laporan Keuangan";
- PPSAK 13: "Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba";

IMPACT OF CHANGE IN ACCOUNTING POLICY TO FINANCIAL STATEMENTS

Adoption Of New And Revised Statements Of Financial Accounting Standards ("PSAK") And Interpretation Of PSAK ("ISAK")

a. New and revised accounting standard statements and interpretations that are effective on or after January 1, 2020a.

New and revised standards on the standards that are effectively applied for periods beginning on or after January 1, 2020, with early application are permitted, as follows:

- PSAK 71: "Financial Instruments";
- PSAK 72: "Revenue from Contracts with Customers";
- PSAK 73: "Lease"
- PSAK 62 (Amendment 2017): "Insurance Contract concerning Applying PSAK 71: Financial Instruments with PSAK 62: Insurance Contract";
- PSAK 15 (Amendment 2017): "Investments in Associates and Joint Ventures concerning Long-Term Interests in Associates and Joint Ventures";
- PSAK 71 (Amendment 2018): "Financial Instruments concerning Early Repayment Features with Negative Compensation";
- ISAK 35: "Presentation of Financial Statements for Non-Profit Oriented Entities";
- PSAK 1 (Amendment 2019): "Presentation of Financial Statements on Title of Financial Statements";
- PSAK 1 (2019 Annual Adjustment): "Presentation of Financial Statements";
- PPSAK 13: "Withdrawal of PSAK 45: Financial Reporting of Non-Profit Entities";

- PSAK 25 (Amendemen 2019): "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan";
- PSAK 102 (Amendemen 2019): "Akuntansi Murabahah";
- ISAK 101: "Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan terkait Kepemilikan Persediaan"; dan
- ISAK 102: "Penurunan Nilai Piutang Murabahah".

Penerapan dari perubahan standar akuntansi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020 tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan.

- b. Penerapan PSAK baru dan revisi, serta ISAK yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juni 2020. Amendemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juni 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu: PSAK 73 (Amendemen 2020): "Sewa tentang Konsesi Sewa terkait Covid-19."

- PSAK 25 (Amendment 2019): "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors";
- PSAK 102 (Amendment 2019): "Murabaha Accounting";
- ISAK 101: "Recognition of Tangguh Murabahah Income without Significant Risk of Ownership of Inventory"; and
- ISAK 102: "Impairment of Murabahah Receivables".

The adoption of the changes in accounting standards effective from January 1, 2020, did not have a material impact on the amounts reported in the financial statements.

- b. The adoption of new and revised PSAKs, as well as ISAK which will be effective for financial years starting on or after 1 June 2020. The following amendments to the standard are effective for periods beginning on or after 1 June 2020, with earlier application permitted, namely: PSAK 73 (Amendment 2020): "Leases regarding Lease Concessions related to Covid-19."

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

Arah kebijakan Perseroan untuk menjaga kelangsungan usaha dan pertumbuhan bisnisnya di tahun 2021 ditetapkan sebagai berikut :

1. Mengundang investor baru :
Perseroan membuka kesempatan untuk menggandeng para investor yang tertarik menjalin kemitraan strategis dengan Perseroan melalui aksi korporasi yang direncanakan akan dilakukan pada pertengahan tahun 2021. Dari aksi korporasi ini, Perseroan memproyeksikan akan mendapatkan peningkatan modal disetor sebesar Rp. 750 Milyar sehingga

BUSINESS CONTINUITY INFORMATION

The direction of the Company's policy to maintain business continuity and business growth in 2021 is determined as follows:

1. Inviting new investors:
The Company opens the opportunity to partner with investors who are interested in establishing strategic partnerships with the Company through corporate actions which are planned to be carried out in mid-2021. From this corporate action, the Company is projecting to get an increase in paid-up capital of Rp. 750 billion thereby the Company can return to disburse new

Perseroan dapat kembali menyalurkan pembiayaan baru untuk calon-calon debitur yang potensial.

2. Perbaikan rasio-rasio keuangan penting :
Di tahun 2020, rasio permodalan tercatat kurang dari 10% dan rasio permodalan kurang dari 50% sehingga Perseroan mendapatkan Surat Penetapan Pelanggaran Rasio Modal Sendiri terhadap Modal Disetor dan Rasio Permodalan melalui surat OJK nomor S-2188/NB.221/2020 tanggal 23 September 2020 dan Surat Peringatan Pertama melalui surat OJK nomor S- 3294/NB.221/2020 Tanggal 22 Desember 2020.

Terkait dengan hal tersebut, Perseroan telah mengajukan rencana tindak lanjut pemenuhan rasio permodalan dan rasio MSMD ini melalui surat Perseroan kepada OJK nomor 022/IBF/CPL-SK/X/20 Tanggal 16 Oktober 2020 perihal Rencana Pemenuhan Ketentuan Pasal 88 dan Pasal 90 ayat (1) POJK 35 tahun 2018, dimana diproyeksikan pencapaian rasio permodalan minimum 10% dan rasio MSMD minimum 50% baru dapat dipenuhi pada akhir tahun 2021 melalui pelaksanaan aksi korporasi yang direncanakan akan dilaksanakan Perseroan pada pertengahan tahun 2021, namun untuk hal ini Perseroan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Sebagaimana yang disampaikan dalam proyeksi keuangan tahun 2021, penyelesaian terhadap NPF Perseroan dilakukan secara bertahap untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Regulator. Untuk itu maka Perseroan telah mengajukan permohonan relaksasi terkait pemenuhan rasio NPF ini melalui surat Perseroan kepada OJK nomor 007/IBF/CPL-SK/III/20 Tanggal 26 Maret 2020 perihal

financing to potential debtors.

2. Improvements to important financial ratios:

In 2020, the capital ratio was recorded at less than 10% and the capital ratio was less than 50% so that the Company obtained a Letter of Determination of Violation of Own Capital Ratio to Paid-in Capital and Capital Ratio through OJK letter number S-2188/NB.221/2020 dated 23 September 2020 and First Warning Letter through OJK letter number S- 3294/NB.221/2020 dated December 22, 2020.

In this regard, the Company has submitted a follow-up plan to fulfill the capital ratio and MSMD ratio through the Company's letter to OJK number 022/IBF/CPL-SK/X/20 dated 16 October 2020 regarding the Plan to Fulfill the Provisions of Article 88 and Article 90 paragraph (1) POJK 35 of 2018, where it is projected that the achievement of a minimum capital ratio of 10% and a minimum MSMD ratio of 50% can only be fulfilled at the end of 2021 through the implementation of corporate actions planned to be carried out by the Company in mid-2021, however for this the Company must first obtain Shareholders' approval through the General Meeting of Shareholders (GMS).

As disclosed in the 2021 financial projections, the settlement of the Company's NPF is carried out in stages to meet the provisions set by the Regulator. For this reason, the Company has submitted a request for relaxation related to the fulfillment of the NPF ratio through the Company's letter to OJK number 007/IBF/CPL-SK/III/20 dated 26 March 2020 regarding the proposed relaxation of

Usulan relaksasi terhadap pemenuhan rasio NPF dan rasio yang terkait dengan permodalan. Dalam proyeksi keuangan 2021 yang disampaikan, diproyeksikan pencapaian rasio NPF dibawah 5% baru dapat dipenuhi pada akhir tahun 2023.

3. Pemberian fasilitas pembiayaan baru :
Dana yang diperoleh dari aksi korporasi sepenuhnya akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan. Dengan dana ini Perseroan dapat kembali memberikan fasilitas pembiayaan baru kepada calon debitur yang potensial.

Sektor-sektor industri yang dibidik Perseroan untuk penyaluran pembiayaan pada tahun 2021 adalah sektor industri pertambangan, insfrastruktur, perkebunan, transportasi dan logistik. Sektor-sektor inilah yang diproyeksikan dapat memberikan peluang bagi Perseroan untuk mengembangkan bisnisnya.

4. Kerjasama pabrian alat-alat berat :
Pangsa pasar alat-alat berat di Indonesia masih memiliki potensi yang sangat besar sehingga peluang untuk mendapatkan bisnis tersebut masih cukup besar terutama untuk segmen alat-alat berat dengan merk-merk baru yang umumnya berasal dari China.

Untuk itu di tahun 2021, bekerjasama dengan anak usaha INTA yaitu PT Intraco Penta Prima Service (IPPS), Perseroan berencana untuk melakukan kerjasama dengan pabrian alat-alat berat asal China yang akan berinvestasi di Indonesia.

meeting the NPF ratio and the ratio related to capital. In the financial projection for 2021, it is projected that the achievement of an NPF ratio of below 5% will only be met by the end of 2023.

3. Provision of new financing facilities:
Funds obtained from corporate actions will fully be used for the Company's working capital. With this fund, the Company can again provide new financing facilities to potential borrowers.

The industrial sectors targeted by the Company for disbursement of financing in 2021 are the mining, infrastructure, plantation, transportation and logistics industry sectors. These sectors are projected to provide opportunities for the Company to develop its business.

4. Cooperation of heavy equipment manufacturers:
The market share for heavy equipment in Indonesia still has enormous potential, so the opportunity to get this business is still quite large, especially for the heavy equipment segment with new brands, which generally come from China.

For this reason, in 2021, in collaboration with INTA's subsidiary, PT Intraco Penta Prima Service (IPPS), the Company plans to collaborate with heavy equipment manufacturers from China who will invest in Indonesia.





Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Basis of GCG Implementation



Perseroan terus berupaya untuk memaksimalkan lima prinsip dasar GCG yaitu keterbukaan akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran sebagai landasan operasional Perseroan sehari-hari.

The Company strives to optimize five fundamental GCG principles such as transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness as foundation of the Company's daily operations

Hal tersebut dilandasi atas kesadaran Perseroan akan pentingnya penerapan prinsip GCG dalam upaya pencapaian visi dan misi Perseroan. Penerapan prinsip-prinsip GCG dalam organisasi Perseroan berlandaskan pada komitmen untuk menciptakan perusahaan yang transparan dan terpercaya melalui manajemen bisnis yang dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan GCG yang baik akan memperkuat kepercayaan serta meningkatkan nilai bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

The implementation refers to the Company's awareness of the importance of GCG principles implementation in achieving the Company's vision and mission. Implementation of GCG principles in the Company's organization is based on a commitment to create a transparent and trusted company through accountable business management. Good GCG implementation will strengthen trust and increase value for shareholders and other stakeholders.



LANDASAN HUKUM PENERAPAN GCG

Penerapan GCG Perseroan mengacu pada standar dan pedoman GCG yang ditetapkan melalui serangkaian peraturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM).
3. Peraturan-peraturan di bidang Pasar Modal, baik yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK, atau peraturan yang sebelumnya dikeluarkan oleh BAPEPAM-LK), Bursa Efek Indonesia atau regulator pasar modal lainnya.

LEGAL FRAMEWORK OF GCG IMPLEMENTATION

GCG implementation in the Company refers to GCG standards and guidelines established through a series of regulations according to Republic of Indonesia Law and Financial Services Authority (OJK) as follows:

1. Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies (UUPT).
2. Law Number 8 of 1995 on Capital Markets (UUPM).
3. Capital Market Regulations issued by Financial Services Authority (OJK, or regulations previously issued by BAPEPAM-LK), Indonesia Stock Exchange or other capital market regulators.

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.
6. Anggaran Dasar Perseroan.
7. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKG).
8. Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan oleh OJK.

Bagi Perseroan, tujuan penerapan GCG adalah untuk :

1. Mengarahkan dan mengendalikan hubungan kerja Organ Perseroan yaitu antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Meningkatkan pertanggungjawaban pengelolaan Perseroan kepada Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan;
3. Menjadi dasar implementasi dan pengembangan Budaya Perseroan;
4. Mendorong dan mendukung pengembangan usaha, alokasi sumber daya Perseroan dan pengelolaan risiko yang efektif sehingga menjamin peningkatan nilai Perseroan yang berkelanjutan;
5. Mengarahkan pencapaian visi dan misi Perseroan serta meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;

MEKANISME GCG

Perseroan secara konsisten telah mengaplikasikan prinsip-prinsip GCG dalam aktivitas operasionalnya melalui rangkaian kebijakan dan peraturan internal yang komprehensif, antara lain, Piagam GCG,

4. Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies.
5. Financial Services Authority Regulation No. 29 / POJK.05 / 2020 concerning Amendments to the Financial Services Authority Regulation No. 30 / POJK.05 / 2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies
6. Articles of Association of the Company.
7. General Guidelines for Good Corporate Governance Indonesia issued by the National Committee on Corporate Governance (KNKG).
8. Roadmap of Corporate Governance Indonesia issued by OJK.

The Company has set the GCG implementation goals, as follows:

1. To direct and control the Company's Organ working relationships, namely between Shareholders, Board of Commissioners and Board of Directors;
2. Increase the accountability of the Company's management to the Shareholders while also considering interests of the stakeholders;
3. As framework for Corporate Culture implementation and development;
4. To encourage and support business development, allocation of Company resources and effective risk management so as to ensure an increase in the Company's sustainable value;
5. To direct the achievement of the Company's vision and mission as well as increasing the professionalism of human resources;

GCG MECHANISM

The Company has consistently applied the principles of GCG in its operational activities through a comprehensive set of internal policies and regulations, including, the GCG Charter, the Code of Ethics, the Board of

Kode Etik, Manual Board, Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi, kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran, dan berbagai kebijakan operasional yang selaras dengan praktik GCG terbaik.

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Efektivitas penerapan GCG akan berjalan dengan kuatnya struktur dan sistem yang memberikan perlindungan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya semaksimal mungkin. Karena itu struktur dan sistem GCG Perseroan didasarkan pada:

Prinsip-prinsip GCG

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan mengacu pada lima prinsip dasar GCG yang meliputi:

1. **Transparansi**, dimana Perusahaan senantiasa memberikan informasi kepada pemegang saham, pemangku kepentingan, kreditur dan pihak-pihak yang terkait, mengenai kejadian penting Perusahaan, termasuk laporan kinerja keuangan Perusahaan.
2. **Akuntabilitas**, dengan adanya fungsi, tugas, dan tanggung jawab organ Perusahaan yakni Direksi, Dewan Komisaris, dan RUPS, berjalan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, sehingga pengelolaan Perusahaan berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien.
3. **Pertanggungjawaban**, dimana Perusahaan senantiasa mematuhi ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan serta peraturan perundangan yang berlaku dan nilai-nilai etika.
4. **Kemandirian**, melalui pengelola Perusahaan secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan

Commissioners 'Guidelines and Charter, the Board of Directors' Guidelines and Charter, Nomination Policy, System Policy Reporting of violations, and various operational policies that are in line with best GCG practices.

CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE

The effectiveness of the implementation of GCG will run with the strength of structures and systems that provide protection of the interests of shareholders and other stakeholders as much as possible. Therefore, the Company's GCG structure and system are based on:

GCG Principles

The implementation of good corporate governance by the Company that is approved in the five basic principles of GCG published:

1. Transparency, where the Company always provides information to shareholders, stakeholders, creditors and related parties regarding important Company events, including the Company's financial performance reports.
2. Accountability, with the existence of functions, duties, and responsibilities of the Company's organs, namely the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the GMS, run in accordance with their authority, so that the management of the Company runs transparently, fairly, effectively and efficiently.
3. responsibility, where the Company always adheres to the provisions of the Company's Articles of Association as well as prevailing laws and regulations, and ethical values.
4. independence, through management of the Company independently and professionally and free from conflicts of interest and influence or pressure from any party.

kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

5. **Kewajaran**, bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, Perusahaan senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan.

Visi dan Misi Perusahaan

Visi Perusahaan

Menjadi perusahaan pembiayaan yang handal dalam industri keuangan di Indonesia

Misi Perusahaan

Menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan, serta membangun dan berkembang bersama wirausahawan lokal yang berkeinginan tinggi.

Nilai-nilai utama Perusahaan

Melalui penegakan GCG, menghormati seluruh pemangku kepentingan, mempraktekkan profesionalisme yang tinggi dan memiliki karakter yang jujur.

5. fairness, that in carrying out its activities, the Company always pays attention to the interests of shareholders and other stakeholders based on the principles of justice and equality

Company Vision And Mission

Vision

To become a reliable financing company in the financial industry in Indonesia.

Mission

Creating employment and prosperity, as well as building and developing with high-desire local entrepreneurs.

The Company's Main Values

Enforcement of GCG, respect all stakeholders, practice high professionalism and have honest character.

PENILAIAN PENERAPAN GCG

Perseroan meyakini bahwa penerapan tata kelola yang baik merupakan landasan keberlanjutan Perusahaan dari waktu ke waktu. Untuk itu, Perseroan berupaya mengimplementasikan program-program tata kelola yang baik agar menjadi budaya korporasi dan karyawan.

Perseroan telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan budaya keseharian Perusahaan yang sesuai dengan etika dan aturan hukum yang berlaku, guna mencapai tata kelola perusahaan yang baik (GCG), diantara dengan:

GCG ASSESSMENT

The Company believes implementation of good governance is the foundation of the Company's sustainability every time. Therefore, the Company strives to implement good governance programs to become the corporate and employee culture.

The Company has made various efforts to create a daily corporate culture that is in accordance with applicable ethics and legal rules, in order to achieve good corporate governance (GCG), including:

1. Menandatangani Pernyataan Kepatuhan atas *Code of Conduct*.
2. Melakukan pembayaran pajak pribadi.
3. Melaporkan Daftar Khusus Kepemilikan Saham Direksi dan anggota keluarganya untuk menghindari *conflict of interest* secara konsisten di setiap tahun.
4. Meningkatkan efektivitas Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System* - WBS) dengan menindaklanjuti setiap pelaporan yang masuk.
5. Melakukan sosialisasi terhadap kebijakan-kebijakan yang wajib diterapkan oleh seluruh jajaran manajemen dan karyawan Perseroan yang terkait dengan Penerapan tata kelola perusahaan yang baik

Penerapan Atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Perseroan telah memenuhi rekomendasi sesuai Peraturan Jasa Keuangan (POJK) No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, yang terdiri dari penerapan 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan pendekatan "*comply or explain*" dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Signing a Statement of Compliance with the Code of Conduct.
2. Make personal tax payments.
3. Report the Special List of Share Ownership for the Board of Directors and their family members to consistently avoid conflict of interest every year.
4. Increase the effectiveness of the Whistleblowing System (WBS) by following up on any incoming reports.
5. Outreach policies that must be implemented by all levels of management and employees of the Company related to the implementation of good corporate governance.

Implementation Of Governance Guideline For Public Company

The Company has complied recommendations according to Financial Service Authority Regulation (POJK) No.21/POJK.04/2015 concerning Implementation of Governance Guideline for Public Company and Financial Service Authority Circular Letter (SEOJK) No.32/SEOJK.04/2015 concerning Governance Guideline for Public Company comprising of implementation of 5 (five) aspects, 8 (eight) principles tata good corporate governance principles as well as 25 (twenty five) recommendations of the good corporate governance aspects and principles implementation based on "*comply or explain*" approach, as follows:

Aspek dan Tata Kelola Perusahaan Terbuka aspects and Good Corporate Governance			Keterangan Description
A. Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham. Public Company Relationship With Shareholders In Guaranteeing The Rights Of Shareholders;			
Prinsip 1/ Principle 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Increase The Value Of GMS Implementation			
Rekomendas/Recommendation:			
1.1	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham.	The Public Company has technical methods or procedures for voting both openly and closed, which prioritizes the independence and interests of shareholders.	Terpenuhi Comply
1.2	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	All members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Public Company are present at the Annual GMS.	Tidak Terpenuhi, Dikarenakan Bapak Mulyadi selaku Direktur tidak hadir karena sakit Explain. Because Mr. Mulyadi as Director not attending due to sickness
1.3	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun	A summary of the minutes of the GMS is available on the Public Company Website for at least 1 (one) year.	Terpenuhi Comply
Prinsip 2 / Principle 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor Improve Quality of Public Company Communication with Shareholders or Investors			
Rekomendasi/ Recommendation:			
2.1	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	The Public Company has a communication policy with shareholders or investors.	Terpenuhi Comply
2.2	Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.	The Public Company discloses the communication policy of the Public Company with shareholders or investors on the Website.	Terpenuhi Comply
B FUNGSI DAN PERAN DEWAN KOMISARIS Function And Role Of The Board Of Commissioners			
Prinsip 3/ Principle 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris. Strengthening Membership And Composition Of The Board Of Commissioners			

Aspek dan Tata Kelola Perusahaan Terbuka aspects and Good Corporate Governance			Keterangan Description
Rekomendasi/ Recommendation:			
3.1	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	Determination of the number of members of the Board of Commissioners considers the condition of the Public Company.	Tidak Terpenuhi Explain
3.2	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan.	Determination of the composition of members of the Board of Commissioners has considered diversity of expertise, knowledge and experience needed.	Tidak Terpenuhi Explain
Prinsip 4/ Principle 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris. Improving the Quality of Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners.			
Rekomendasi:/ Recommendation:			
4.1	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	The Board of Commissioners has a Self-Assessment policy to appraise the performance of the Board of Commissioners.	Terpenuhi Comply
4.2	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	The Self-Assessment policy to appraise the performance of the Board of Commissioners is expressed through the Company's Annual Report	Terpenuhi Comply
4.3	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if involved in financial crimes.	Terpenuhi Comply
4.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.	The Board of Commissioners or the Committee that carries out the Nomination and Remuneration function composes a succession policy in the process of nominating members of the Board of Directors.	Terpenuhi Comply
C FUNGSI DAN PERAN DIREKSI Function And Role Of The Board Of Directors			
Prinsip 5/ Principle 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi. Strengthening The Membership And Composition Of The Board Of Directors.			
Rekomendasi/ Recommendation:			
5.1	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.	Determination Of The Number O Members Of The Board Of Directors Considers The Condition Of The Public Company And Effectiveness In Decision-Making.	Terpenuhi Comply

Aspek dan Tata Kelola Perusahaan Terbuka aspects and Good Corporate Governance			Keterangan Description
5.2	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Determination of the composition of members of the Board of Directors takes into account the diversity of expertise, knowledge and experience needed.	Terpenuhi Comply
5.3	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	The member of the Board of Directors in charge of accounting or finance has expertise and/or knowledge in the field of accounting.	Terpenuhi Comply
Prinsip 6/ Principle 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. Improving the Quality of Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors.			
Rekomendasi/ Recommendation:			
6.1	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.	The Board of Directors has a Self-Assessment policy to appraise the performance of the Board of Directors.	Terpenuhi Comply
6.2	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	The Self-Assessment policy to appraise the performance of the Board of Directors is expressed through the Company's Annual Report.	Terpenuhi Comply
6.3	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	The Board of Directors has a policy regarding the resignation of members of the Board of Directors if involved in financial crimes.	Terpenuhi Comply
D PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN Stakeholder Participation			
Prinsip 7/ Principle 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan. Enhancing Corporate Governance Aspects Through Stakeholder Participation.			
Rekomendasi/ Recommendation:			
7.1	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> .	The Public Company Has A Policy To Prevent Insider Trading.	Terpenuhi Comply
7.2	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud.	The Public Company Has An Anti-Corruption And Anti-Fraud Policy.	Terpenuhi Comply
7.3	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	Public Company Has A Policy Regarding The Selection And Improvement Of The Ability Of Suppliers Or Vendors.	Terpenuhi Comply
7.4	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.	The Public Company has a policy on fulfilling the rights of creditors.	Terpenuhi Comply

Aspek dan Tata Kelola Perusahaan Terbuka aspects and Good Corporate Governance			Keterangan Description
7.5	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem whistleblowing.	The Public Company has a whistleblowing system policy.	Terpenuhi Comply
7.6	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	The Public Company has a policy of providing long-term incentives to Directors and employees.	Terpenuhi Comply
E. KETERBUKAAN INFORMASI Information Disclosure			
Prinsip 8/ Principle 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi. Improving the Implementation of Information Disclosure.			
Rekomendasi/ Recommendation:			
8.1	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs <i>Web</i> sebagai media keterbukaan informasi.	The Public Company utilizes the use of information technology more broadly than the Website as a medium for information disclosure.	Terpenuhi Comply
8.2	Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	The Annual Report of the Public Company discloses the final beneficial owner in the ownership of the Public Company of at least 5% (five percent), in addition to the disclosure of the final beneficial owner in the shareholding of the Public Company through majority and controlling shareholders.	Terpenuhi Comply

Organ Perseroan

Corporate Organs

Terdapat tiga organ sebagai pilar utama pelaksana GCG yang terdiri atas : Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Ketiga organ tersebut terikat pada tugas dan tanggung jawabnya serta senantiasa mematuhi ketentuan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan lainnya.

There are three organs as the main pillars of implementing GCG consisting of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners and the Board of Directors. The three organs are bound to their duties and responsibilities and always comply with statutory provisions, the Company's Articles of Association and other provisions.

Selain itu dalam menjalankan pengelolaan Perseroan dan mengambil segala keputusan, Organ Perseroan senantiasa menjunjung tinggi nilai etika bisnis & etika kerja serta menyadari adanya tanggung jawab Perseroan terhadap para pemangku kepentingan.

In addition to carrying out the management of the Company and making all decisions, the Organs of the Company always uphold the values of business ethics & work ethics and are aware of the Company's responsibility to its stakeholders

Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi merupakan organ utama dalam struktur tata kelola Perseroan. Rujukan utama organ perusahaan adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu bahwa :

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan.
- b. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan

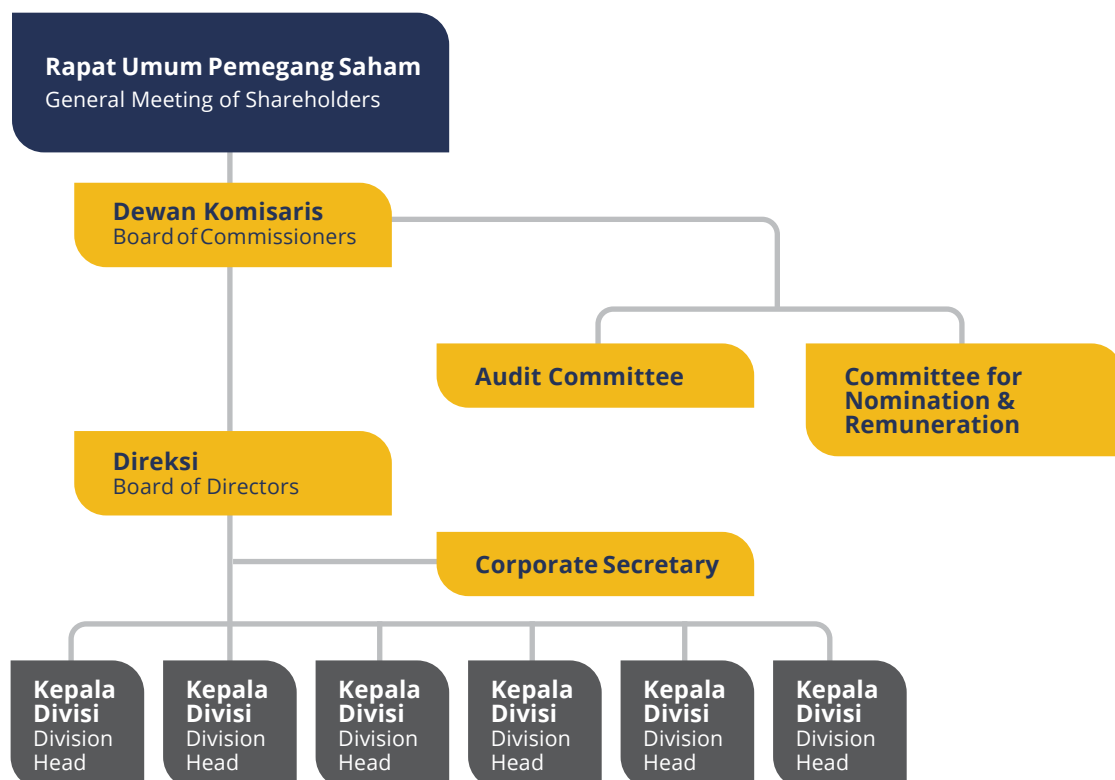
The General Meeting of Shareholders, the Board of Commissioners and the Board of Directors are the main organs in the Company's governance structure. The main reference for company organs is Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the Articles of Association of the Company, namely that:

- a. The General Meeting of Shareholders (GMS) is the Company Organ that has authority not given to the Board of Directors or the Board of Commissioners within the specified limit of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the Articles of Association of the Company.
- b. The Board of Commissioners is the Organ of the Company whose duty is to carry out

secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta memberi nasehat kepada Direksi.

- c. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Untuk memperkuat pelaksanaan GCG, Dewan Komisaris dan Direksi dapat memiliki organ penunjang, dalam bentuk komite-komite di bawah Dewan Komisaris dan komite-komite di bawah Direksi Perseroan. Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris dan Direksi juga ditunjang oleh keberadaan Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal dan Kepala-Kepala Divisi. Secara lengkap struktur Tata Kelola Perusahaan dapat dilihat pada bagan di bawah ini :



supervision in general and/or specifically in accordance with the Articles of Association of the Company and provide advice to the Board of Directors.

- c. The Board of Directors is the Company Organ that is authorized and fully responsible for the management of the Company and for the benefit of the Company, in accordance with the purposes and objectives of the Company and represents the Company, both inside and outside the court in accordance with the Articles of Association.

To strengthen the implementation of GCG, the Board of Commissioners and Board of Directors can have supporting organs, in the form of committees under the Board of Commissioners and committees under the Board of Directors of the Company. In its implementation, the Board of Commissioners and the Board of Directors are also supported by the presence of the Corporate Secretary, Internal Audit Unit and Division Heads. The complete structure of Corporate Governance can be seen in the chart below:

PENANGGUNGJAWAB PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN

Organ Perseroan mengalami perubahan dengan mulai berlakunya POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, yang mulai berlaku bagi Perseroan per 1 Januari 2019. Peraturan ini antara lain mengatur tentang perlu adanya unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan. Untuk itu, Perseroan menunjuk *Corporate Secretary* sebagai petugas penanggungjawab pelaksanaan rencana aksi keuangan berkelanjutan, sesuai dengan Keputusan Direksi PT Intan Baruprana Finance Tbk No. 004/SKD/IBF/III/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Pembentukan Unit Kerja Aksi Keuangan Berkelanjutan PT Intan Baruprana Finance Tbk.

PERSON IN CHARGE OF SUSTAINABLE FINANCE IMPLEMENTATION

The Company's organs have changed with the enactment of POJK Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers and Public Companies, which came into effect for the Company as of January 1, 2019. This regulation, among others, regulates the need for units work who is in charge of implementing Sustainable Finance. For this reason, the Company appointed a Corporate Secretary as the officer in charge of implementing the sustainable finance action plan, in accordance with the Decree of the Board of Directors of PT Intan Baruprana Finance Tbk No. 004/SKD/IBF/III/2020 dated March 2, 2020 concerning the Establishment of the Sustainable Finance Action Work Unit of PT Intan Baruprana Finance Tbk.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

General Meetings of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam struktur kepengurusan Perusahaan dan memiliki wewenang yang tidak dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Sesuai dengan Anggaran Dasar dan POJK No.10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Perusahaan Terbuka.

RUPS TAHUN 2020

Sepanjang Tahun 2020, Perusahaan telah melaksanakan 1 (satu) kali RUPS, yaitu RUPS Tahunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Buku 2019. Perusahaan telah melaksanakan seluruh kegiatan RUPS sesuai ketentuan yang berlaku, baik dari sisi tempat, pemberitahuan, pemanggilan RUPS, pimpinan dan berita acara RUPS berikut ketentuan kuorum, hak suara dan keputusan RUPS.

RUPS Tahunan untuk persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Buku 2019 telah dilaksanakan pada hari Rabu, 26 Agustus 2020 Auditorium 5th Floor, INTA HQ Building, Jl. Raya Cakung Cilincing KM 3.5, Jakarta Utara.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah sebagai berikut:

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest authority in the management structure of the Company and has powers that the Board of Commissioners and Directors do not have. In accordance with the Articles of Association and POJK No.10/POJK.04/2017 concerning Amendments to POJK No.32/POJK.04/2014 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders ("GMS") of Public Companies

GMS 2020

Throughout 2020, the Company has held 1 (one) GMS, namely the Annual GMS of Financial Accountability Report for the 2019 Financial Year. The Company has carried out all GMS activities in accordance with applicable regulations, both in terms of venue, notification, GMS summons, leadership and GMS minutes. the following are the quorum provisions, voting rights and resolutions of the GMS.

The Annual GMS for the approval of the 2019 Financial Accountability Report was held on Wednesday, 26 August 2020 Auditorium 5th Floor, INTA HQ Building, Jl. Raya Cakung Cilincing KM 3.5, North Jakarta.

Members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company who were present at the Meeting are as follows:

Daftar Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi di RUPS

Daftar Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi di RUPS

Dewan Komisaris Board of Commissioner		Direksi Board of Director	
Komisaris Commissioner	Bpk. Petrus Halim	Direktur Utama President Director	Ibu Carolina Dina Rusdiana
		Direktur Director	Bpk. Alexander Reyza
		Direktur Director	Bpk. Kurniawan Saktiaji

Kehadiran Lembaga & Profesi Penunjang Pasar Modal

The presence of Capital Market Supporting Institutions & Professionals

Biro Administrasi Efek	Notaris	KAP
PT Adimitra Jasa Korpora	Kantor Notaris Kristanti Suryani, SH, Mkn	Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Agenda di RUPS

GMS Agenda

Agenda	Keputusan Rapat Meeting Resolutions	
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;	Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas), termasuk laporan Direksi Perseroan, serta laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019.	Accepted and approved the Annual Report for the fiscal year ended 31-12-2019 (thirty-one December two thousand and nineteen), including the report of the Board of Directors of the Company, as well as the supervisory report of the Board of Commissioners for the fiscal year ended 31-12-2019.
Approval of the Company's Annual Report for the 2019 fiscal year, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report, as well as the Ratification of the Company's Financial Statements ending on 31 December 2019;	Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, No. 00841/2.1133/AU.1/09/1152-3/1/IV/2020 Perihal: Laporan Auditor Independen tanggal 30 April 2020 dengan pendapat "Wajar dengan Penekanan Suatu Hal", dengan demikian membebaskan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas), sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) tersebut.	Accepted and approved and ratified the Company's Financial Statements for the 2019 fiscal year which had been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners, No. 00841/2.1133/AU.1/09/1152-3/1/IV/2020 Regarding: Independent Auditor's Report dated April 30, 2020 with the opinion "Fair with Emphasis of a Matter", thereby releasing all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company from responsibility and all dependents (acquit et de charge) for the management and supervision actions they have carried out during the 2019 fiscal year (two thousand and nineteen), as long as their actions are reflected in the Company's Financial Statements for the 2019 fiscal year (two thousand and nineteen).

Agenda di RUPS

GMS Agenda

Agenda	Keputusan Rapat Meeting Resolutions	
Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020; Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the 2020 fiscal year;	- Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020. - Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukkan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.	- Approved to authorize the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the 2020 Financial Year. - Agree to authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium for the Public Accountant and other terms of appointment and appoint a replacement Public Accountant in the event that the appointed Public Accountant for whatever reason cannot complete the audit task of the Company's Financial Statements for the 2020 Financial Year, provided that In appointing a Public Accountant, the Board of Commissioners must take into account the recommendations of the Company's Audit Committee.
Penetapan Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020; Determination of Salary and Other Benefits for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the 2020 fiscal year;	Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Gaji, Uang Jasa atau Honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.	Agree to grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the Salary, Service Fee or Honorarium, and other benefits for members of the Company's Board of Directors and members of the Company's Board of Commissioners for the 2020 Financial Year, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.
Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; Changes in the Composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company;	Menyetujui mengangkat kembali Bapak Alexander Reyza sebagai Direksi Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan selaku Direksi Perseroan setelah ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal pengangkatan RUPS sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun ke-5 setelah tanggal pengangkatan yang bersangkutan, yaitu pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang diselenggarakan pada tahun 2025, namun tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu;	To approve the reappointment of Mr. Alexander Reyza as the Board of Directors of the Company in connection with the expiration of his term of office as the Board of Directors of the Company after the closing of this Annual General Meeting of Shareholders for a period starting from the date of appointment of the GMS until the closing of the Annual GMS which will be held in the 5th year after the date of the appointment of the person concerned, namely the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2024 which will be held in 2025, but this does not reduce the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss the person concerned at any time;

Agenda di RUPS

GMS Agenda

Agenda	Keputusan Rapat Meeting Resolutions	
	2. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Saudara Kurniawan Saktiaji sebagai Direktur Perseroan yang diangkat berdasarkan RUPSLB tanggal 26 Maret 2018. Pemberhentian anggota Direksi tersebut terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan;	2. Approved the dismissal of Mr. Kurniawan Saktiaji as the Company's Director with respect as appointed by the EGMS on March 26 2018. The dismissal of the members of the Board of Directors commencing from the closing date of this Meeting with gratitude for the contribution of energy and thoughts given during his tenure as a member of the Company's Board of Directors;
	3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk memberitahukan Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.	3. Agree to grant power and authority to the Company's Board of Directors with substitution rights to state in a separate Notary Deed and take all necessary actions in connection with the Change of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners in accordance with the prevailing laws and regulations, including notifying the Changes in the Company's Directors and Board of Commissioners. said to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with applicable regulations.
Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya: a. membatalkan keputusan perubahan Pasal 1 ayat 1 tentang Tempat Kedudukan Perseroan yang telah diputuskan dalam RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 17 Desember 2019; b. menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK no. 15 tahun 2020") dan POJK no. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK no. 16 tahun 2020").	1. Menyetujui membatalkan keputusan perubahan Pasal 1 ayat 1 tentang Tempat Kedudukan Perseroan yang telah diputuskan dalam RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 17 Desember 2019, yang hingga saat ini belum dilaporkan/diberitahukan ke Kementerian Hukum dan HAM, dan dengan demikian tempat kedudukan Perseroan tetap di Jakarta Utara; 2. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu penyesuaian diantaranya dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020, tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh), yaitu Pasal 4 ayat 4 dan 6, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 serta Pasal 16 ayat 12.	1. Agree to cancel the decision to amend Article 1 paragraph 1 concerning the Company's Domicile which was decided in the Extraordinary GMS of the Company on 17 December 2019, which until now has not been reported/notified to the Ministry of Law and Human Rights, and thus the Company's domicile remains in Jakarta. North; 2. Approve Amendments to the Company's Articles of Association, namely adjustments to the Financial Services Authority Regulation Number: 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies on 20-04-2020 (twenty April two thousand and twenty), and Financial Services Authority Regulation Number: 16/POJK.04/2020, concerning the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies electronically on 20-04-2020 (twenty April two thousand and twenty), namely Article 4 paragraphs 4 and 6, Article 11, Article 12, Article 13 and Article 14 and Article 16 paragraph 12.

Agenda di RUPS

GMS Agenda

Agenda	Keputusan Rapat Meeting Resolutions
Approval of amendments to the Company's Articles of Association, including: a. cancel the decision to amend Article 1 paragraph 1 concerning the Company's Domicile which was decided in the Extraordinary GMS of the Company on 17 December 2019; b. conforms to the provisions of the Financial Services Authority Regulation no. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK no. 15/2020") and POJK no. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically ("POJK no. 16/2020").	3. Menyetujui menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersebut di atas, untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ternyata dalam Lampiran Berita Acara Rapat ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Rapat ini. 4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat tersebut termasuk menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Akta Notaris tersendiri termasuk memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Approve to rearrange all provisions in the Articles of Association in connection with the amendments as referred to in point 1 above, henceforth the entire Articles of Association of the Company shall read as evident in the Attachment to the Minutes of this Meeting and constitute an integral part of the Minutes of this Meeting. 4. Agree to grant power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to take all necessary actions related to the resolutions of the Meeting Agenda including restating all amendments to the Company's Articles of Association in a separate Notary Deed including notifying the amendments to the Company's articles of association to the Minister of Law and Rights Human Rights of the Republic of Indonesia and take all necessary actions in connection with this matter in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations.

1
Ikhtisar 2020
2020 Highlights

2
Laporan Manajemen
Management Report

3
Profil Perusahaan
Company Profile

4
Sumber Daya
Manusia
Human Capital

5
Analisa & Pembahasan
Manajemen
Management
Discussion & Analysis

6
Tata Kelola
Perusahaan
Good Corporate
Governance

7
Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Corporate Social
Responsibility



DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners

Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Dewan Komisaris secara kolektif melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberikan nasihat berkenaan dengan kebijakan Direksi terkait rencana pengembangan Perusahaan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, serta semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan.

Board of Commissioners is responsible to the GMS. The Board of Commissioners collegially supervises management of the Company done by the Board of Directors and provides advice regarding the Board of Directors' policies related to the Company's development plan, the Company's annual work plan and budget, the implementation of the Articles of Association and GMS decisions, as well as all prevailing laws and other relevant regulations.

Dewan Komisaris juga memantau dan melakukan evaluasi terhadap penerapan GCG, meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan Direksi, serta menandatangani laporan tersebut sepanjang Dewan Komisaris setuju dengan isi materi laporan tahunan.

Board of Commissioners also monitors and evaluates GCG implementation examines and reviews the annual report prepared by the Board of Directors, and signs the report as long as the Board of Commissioners agrees with contents of the annual report.

Dewan Komisaris secara terus-menerus memantau efektivitas kebijakan perusahaan, kinerja, dan proses pengambilan keputusan oleh Direksi, termasuk pelaksanaan strategi untuk memenuhi harapan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil pengawasan disertai kajian dan pendapat Dewan Komisaris disampaikan melalui RUPS sebagai bagian dari penilaian kinerja Direksi. Dewan Komisaris juga mengevaluasi dan menyetujui *business plan* perusahaan yang

Board of Commissioners continuously monitors the effectiveness of the company's policies, performance and decision-making process by the Directors, including implementing strategies to meet the expectations of shareholders and other stakeholders. The results of supervision are accompanied by a review and opinion of the Board of Commissioners submitted through the GMS as part of the Directors performance evaluation. The Board of Commissioners

disusun oleh Direksi setiap tahunnya.

also evaluates and approves the company's business plan prepared by the Board of Directors every year.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS (BOARD CHARTER)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta wewenang Dewan Komisaris dalam menjalankan perannya, Perseroan telah mensahkan Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris PT Intan Baruparana Finance Tbk pada 05 April 2019. Pengesahan Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris tersebut ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris, berisikan :

1. Keanggotaan Dewan Komisaris;
2. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris;
3. Pengangkatan dan masa jabatan Dewan Komisaris;
4. Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris;
5. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris;
6. Penggantian anggota Dewan Komisaris;
7. Ketentuan tambahan;
8. Persyaratan anggota Dewan Komisaris;
9. Komisaris Independen;
10. Etika Jabatan Dewan Komisaris;
11. Tugas Dewan Komisaris;
12. Tanggung jawab Dewan Komisaris;
13. Wewenang Dewan Komisaris;
14. Benturan Kepentingan
15. Hak Dewan Komisaris;
16. Kewajiban Dewan Komisaris;
17. Rapat Dewan Komisaris;

BOARD OF COMMISSIONERS WORK GUIDELINE (BOARD CHARTER)

In order to support the implementation of Board of Commissioners' duties, responsibilities and authority, in carrying out their roles, the Company has approved the PT Intan Baruparana Finance Tbk Board of Directors and Board of Commissioners Work Guideline on April 5, 2019. Ratification on the Board of Directors and Board of Commissioners Work Guidelines was signed by the Board of Directors and the Board of Commissioners. The Board of Commissioners Work Guidelines, contains:

1. Membership of the Board of Commissioners;
2. Dual Position of Board of Commissioners;
3. Appointment and term of office of the Board of Commissioners;
4. Resignation of a member of the Board of Commissioners;
5. Dismissal of members of the Board of Commissioners;
6. Replacement of members of the Board of Commissioners;
7. Additional provisions;
8. Requirements for members of the Board of Commissioners;
9. Independent Commissioner;
10. Ethics of the Position of the Board of Commissioners;
11. Duties of the Board of Commissioners;
12. Responsibilities of the Board of Commissioners;
13. Authority of the Board of Commissioners;
14. Conflict of Interest
15. The rights of the Board of Commissioners;
16. Obligations of the Board of Commissioners;
17. Board of Commissioners Meeting;

JUMLAH DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2020, terjadi perubahan komposisi Dewan Komisaris Perseroan, dimana Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, yaitu Willy Rumondor meninggal dunia pada tanggal 19 April 2020. Sehingga selanjutnya komposisi Dewan Komisaris Perseroan menjadi :

NUMBER AND COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In 2020, there was a change in the composition of the Company's Board of Commissioners, where the President Commissioner concurrently as an Independent Commissioner, namely Willy Rumondor, passed away on 19 April 2020. So that further the composition of the Company's Board of Commissioners became:

Komposisi Dewan Komisaris Per 1 Januari 2020 - 19 April 2020

Composition of the Board of Commissioners as of January 1, 2020 - April 19, 2020

Nama Name	Jabatan Position
Willy Rumondor	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently as Independent Commissioner
Petrus Halim	Komisaris Commissioner

Komposisi Dewan Komisaris Per 19 April 2020- 31 Desember 2020

Composition of the Board of Commissioners as of 19 April 2020- 31 December 2020

Nama Name	Jabatan Position
Petrus Halim	Komisaris Commissioner

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Secara umum, Dewan Komisaris berperan untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberi nasihat kepada Direksi;
2. Mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan semua pihak;
3. Menyusun laporan kegiatan Dewan

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF BOARD OF COMMISSIONERS

In general, the Board of Commissioners' role is to supervise and provide advice to the Board of Directors. Roles and responsibilities of the Board of Commissioners are as follows:

1. Supervise and be responsible for supervising the management policies, the management process in general, both regarding the Company and the Company's business, as well as providing advice to the Board of Directors;
2. Supervise Board of Directors in maintaining balance of all parties;
3. Prepare Board of Commissioners

Komisaris yang merupakan bagian dari Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;

4. Memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
5. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Perseroan, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
6. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar;
7. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, serta kehati-hatian;
8. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, maka Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan membentuk komite lainnya;
9. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku;
10. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya;
11. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan sebagaimana dimaksud pada poin 10, apabila dapat membuktikan bahwa :
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan, serta sesuai dengan maksud dan

activity report as part of Good Corporate Governance Implementation Report;

4. Monitor effectiveness of the Good Corporate Governance implementation;
5. Ensure that the Board of Directors has followed up the audit findings and recommendations from the Company's internal audit work unit, external auditors, the results of OJK supervision and/or the results of supervision of other authorities;
6. Under certain conditions, the Board of Commissioners shall hold an annual GMS and other GMS in accordance with their authority as stipulated in the legislation and articles of association;
7. The Board of Commissioners members shall carry out their duties and responsibilities in good faith, with full responsibility and prudence;
8. In order to support the effectiveness of the implementation of its duties and responsibilities, the Board of Commissioners must form an Audit Committee and form another committee;
9. The Board of Commissioners must evaluate the performance of the committee that helps carry out its duties and responsibilities at the end of the fiscal year.
10. Each member of the Board of Commissioners is jointly and severally liable for the Company's losses caused by errors or negligence of the members of the Board of Commissioners in carrying out their duties;
11. Board of Commissioners members will be accounted for the Company's losses as referred to in poin 10, if they can prove that:
 - a. The loss not caused by an error or omission;
 - b. has carried out arrangements in good faith, full responsibility, and prudence for the interests, and in accordance with purpose and objectives of the Issuer or Public Company;

- tujuan Emiten atau Perusahaan Publik;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

- c. does not have a conflict of interest, either directly or indirectly for the management action which results in a loss; and
- d. has taken action to prevent the loss arising or continuing.

PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Sebagai bentuk tanggung jawab, Dewan Komisaris mengadakan rapat untuk membahas persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan, mengevaluasi kinerja Perseroan dan laporan audit yang dilaksanakan oleh Komite Audit. Rapat diadakan untuk memastikan bahwa tujuan dan kinerja Perseroan dalam perencanaan strategis, keuangan, akuisisi, divestasi, operasi, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan dapat tercapai sejalan dengan target Perseroan. Dewan Komisaris juga membahas usulan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta besaran dan komponen remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diajukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

Dewan Komisaris Perseroan telah mengusulkan adanya Audit Eksternal dan perubahan dalam Komite Audit. Dewan Komisaris juga mengawasi Komite Audit dan berkoordinasi dengan audit eksternal, audit internal, dan komite audit setiap bulannya. Dewan Komisaris juga secara aktif memberikan rekomendasi kepada Direksi sehubungan dengan kegiatan pengelolaan Perseroan untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan meningkatkan kinerja Perseroan.

IMPLEMENTATION OF DUTIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

As a form of responsibility, the Board of Commissioners holds meetings to discuss issues related to the management of the Company, evaluate the performance of the Company and audit reports carried out by the Audit Committee. Meetings were held to ensure that the objectives and performance of the Company in strategic planning, finance, acquisitions, divestments, operations, risk management and corporate governance can be achieved in line with the Company's targets. The Board of Commissioners also discusses proposals for candidates for members of the Board of Commissioners and Board of Directors, as well as the amount and components of remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors proposed by the Nomination and Remuneration Committee.

The Board of Commissioners of the Company has proposed an External Audit and changes in the Audit Committee. The Board of Commissioners also oversees the Audit Committee and coordinates with the external audit, internal audit, and audit committee on a monthly basis. The Board of Commissioners also actively provides recommendations to the Board of Directors in relation to the Company's management activities to support sustainable growth and improve the Company's performance.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat Dewan Komisaris sekurang-kurangnya sebanyak 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan mengadakan rapat dengan Direksi secara berkala paling tidak sebanyak 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris melakukan rapat sebanyak 9 (Sembilan) kali. Tingkat kehadiran setiap anggota Dewan Komisaris dalam rapat adalah sebagai berikut :

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Kehadiran Attendance %
Willy Rumondor*	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently as Independent Commissioner	1	1	100%
Petrus Halim	Komisaris Commissioner	9	9	100%

*Menjabat hingga 19 April 2020

BOARD OF COMMISSIONERS MEETING

Board of Commissioners is required to hold a Board of Commissioners meeting at least 1 (one) time every 2 (two) months and hold meetings with the Board of Directors periodically at least 1 (one) time in 4 (four) months. In 2020, the Board of Commissioners held 9 (nine) meetings. The level of attendance of each member of the Board of Commissioners in the meeting is as follows:

*Serves until April 19, 2020

Adapun agenda rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

The Board of Commissioners' meeting agenda are as follows

No	Tanggal Date	Agenda
1	29 Jan 2020	1. Evaluasi Tahun 2019 2. Rencana Bisnis Tahun 2020 3. Update Rencana Konversi Hutang menjadi saham dan hal-hal lainnya dari BOD 1. Evaluation in 2019 2. Business Plan for 2020 3. Update the Plan for Converting Payable into shares and other matters from the BOD
2	18 Apr 2020	1. Kinerja Keuangan Maret 2020 2. Non Performing Financing Maret 2020 3. Pemenuhan persyaratan Kreditur terkait rencana konversi hutang menjadi saham 1. Financial Performance March 2020 2. Non Performing Financing March 2020 3. Fulfillment of Creditor requirements regarding the plan to convert debt into shares
3	20 May 2020	1. Kinerja Keuangan April 2020 2. Non Performing Financing April 2020 3. Usulan Amandemen Perjanjian Perdamaian 4. Timeline Rencana Konversi Hutang menjadi saham 1. April 2020 Financial Performance 2. Non Performing Financing April 2020 3. Proposed Amendments to the Peace Agreement 4. Timeline of Plan for Converting Payable into shares

No	Tanggal Date	Agenda	
4	10 Jun 2020	1. Kinerja Keuangan Mei 2020 2. Non Performing Financing Mei 2020 3. Usulan relaksasi ke OJK 4. Usulan relaksasi ke seluruh Kreditur	1. Financial Performance in May 2020 2. Non Performing Financing May 2020 3. Suggested relaxation to OJK 4. Proposed relaxation to all creditors
5	27 Jul 2020	1. Kinerja Keuangan Juni 2020 2. Non Performing Financing Juni 2020 3. Reformasi struktural IBF 2020 4. Rencana RUPS Tahun 2020	1. Financial Performance June 2020 2. Non Performing Financing June 2020 3. IBF 2020 structural reforms 4. Planned GMS for 2020
6	12 Aug 2020	1. Kinerja Keuangan Juli 2020 2. Non Performing Financing Juli 2020 3. Progres Relaksasi dan Konversi	1. Financial Performance July 2020 2. Non Performing Financing July 2020 3. Relaxation and Conversion Progress
7	25 Sep 2020	1. Kinerja Keuangan Agustus 2020 2. Non Performing Financing Agustus 2020 3. Pembahasan rencana pemenuhan rasio permodalan dan MSMD 4. Usulan relaksasi ke kreditur	1. Financial Performance August 2020 2. Non Performing Financing August 2020 3. Discussion on the plan to fulfill the capital ratio and MSMD 4. Relaxation proposal to creditors
8	16 Okt 2020	1. Kinerja Keuangan Sep 2020 2. Non Performing Financing September 2020 3. Progres Relaksasi 4. Rencana pemenuhan rasio permodalan dan MSMD 5. Penunjukan AP dan KAP untuk tahun buku 2020	1. Financial Performance Sep 2020 2. Non Performing Financing September 2020 3. Relaxation Progress 4. Capital ratio and MSMD fulfillment plan 5. Designation of AP and KAP for the 2020 fiscal year
9	04 Dec 2020	1. Kinerja Keuangan Perseroan November 2020 2. Non Performing Financing November 2020 3. Pelaksanaan Amandemen Perjanjian Perdamaian tanggal 25 Nov 2020 4. Persiapan audiensi OJK (atas potensi pelanggaran rasio-rasio sesuai POJK) 5. Update compliance lainnya	1. The Company's Financial Performance November 2020 2. Non Performing Financing November 2020 3. Implementation of the Amendments to the Peace Agreement dated 25 Nov 2020 4. Preparation for the hearing of the OJK (for potential violations of the ratios according to POJK) 5. Other compliance updates

KEGIATAN DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dapat memberikan rekomendasi dan nasihat kepada Direksi terkait pelaksanaan strategi usaha yang dijalankan Direksi dan jajarannya. Sepanjang

ACTIVITIES AND RECOMMENDATIONS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

As part of its duties and responsibilities, the Board of Commissioners can provide recommendations and advice to the Board of Directors regarding the implementation of business strategies carried out by the Board

tahun 2020, rekomendasi dan nasihat yang disampaikan Dewan Komisaris antara lain :

1. Pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan oleh Direksi dalam hal :
 - Pemenuhan rasio keuangan sesuai ketentuan OJK.
 - Pemberian restrukturisasi kepada debitur-debitur Perseroan yang terdampak Covid-19.
 - Penerapan PSAK 71 untuk pemenuhan rasio NPF Perseroan menjadi dibawah 5 %.
 - Melakukan *collection* secara maksimal untuk mempertahankan arus kas Perseroan.
 - Melakukan evaluasi terhadap amandemen perjanjian homologasi
 - Menjaga dan mengelola aset-aset Perseroan untuk tujuan reaktivasi ataupun penjualan aset.
 - Melakukan upaya-upaya agar rencana konversi hutang menjadi saham oleh seluruh Kreditur Separatis Perseroan (Perbankan) dapat terlaksana dengan baik guna memperbaiki struktur permodalan Perseroan.
2. Memberikan arahan untuk menjalankan Perseroan dengan penerapan GCG dan manajemen risiko serta memastikan pelaksanaan operasional telah sesuai dengan SOP
3. Melakukan penunjukan Akuntan Publik

Seluruh rekomendasi dan nasihat tersebut disampaikan oleh Dewan Komisaris melalui forum rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.

of Directors and its staff. Throughout 2020, recommendations and advice submitted by the Board of Commissioners include:

1. Supervision of the management of the Company by the Board of Directors in terms of:
 - Fulfilment of financial ratios in accordance with OJK regulations.
 - Provided restructuring to the Company's debtors who were affected by Covid-19.
 - The application of PSAK 71 to fulfil the Company's NPF ratio to be below 5%.
 - Carry out maximum collection to maintain the Company's cash flow.
 - Evaluating the amendments to the homologation agreement
 - Maintain and manage the Company's assets for the purpose of reactivating or selling assets.
 - Make efforts so that the plan to convert debt into shares by all of the Company's Separatist Creditors (Banking) can be carried out properly in order to improve the Company's capital structure.
2. Provide direction to run the Company by implementing GCG and risk management as well as ensuring that operational implementation is in accordance with the SOP
3. To appoint a Public Accountant

All recommendations and advice are conveyed by the Board of Commissioners through a joint meeting forum of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

PELATIHAN DEWAN KOMISARIS

TRAINING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Nama Name	Jabatan Position	Kegiatan Yang Dilakukan Activities performed	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Penyelenggara Organizer
Petrus Halim	Komisaris Commissioners	Online Seminar "Multifinance Road to Recovery" (for Director, Commisioner, Controlling Share Holder, and Sharia Supervisory Board)	01-Oct-20	APPI

PROGRAM ORIENTASI DEWAN KOMISARIS

Perseroan belum memiliki program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat. Namun demikian, jika terdapat pengangkatan anggota Dewan Komisaris baru, Perseroan memberikan informasi yang cukup terkait kegiatan usaha Perseroan dan penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

ORIENTATION PROGRAM FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

The company does not yet have an introductory program for newly appointed members of the Board of Commissioners. However, if a new member of the Board of Commissioners is appointed, the Company will provide sufficient information regarding the Company's business activities and an explanation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners.

KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan Perseroan.

Selain tugas dan fungsi pengawasan terhadap jalannya operasional Perseroan secara umum dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku, Komisaris Independen juga mempunyai tanggung jawab khusus, yaitu mewakili kepentingan pemegang saham minoritas Perseroan. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 / POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik mengatur bahwa Perseroan minimal menempatkan 1 (satu) orang Komisaris Independen atau sekurang-kurangnya 30% dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Saat ini Perseroan belum memiliki pengganti Komisaris Independen yang telah meninggal dunia pada 19 April 2020, yaitu Willy Rumodor.

Kriteria Komisaris Independen

Dalam menunjuk Komisaris Independen, Perseroan mengacu pada kriteria peraturan perundangan yang berlaku yang dalam hal ini, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/ POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang menetapkan kriteria Komisaris Independen, adalah sebagai berikut :

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin,

INDEPENDENT COMMISSIONER

Independent Commissioners are members of the Board of Commissioners who are not affiliated with the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, and controlling shareholders, and are free from business relationships or other relationships that can affect their ability to act independently or act solely in the interests of the Company.

In addition to the duties and functions of supervision of the general operations of the Company and ensuring compliance with prevailing laws and regulations, the Independent Commissioner also has a special responsibility, namely representing the interests of the minority shareholders of the Company. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Financial Services Authority Regulation Number 33/ POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, stipulates that the Company shall at least place 1 (one) Independent Commissioner or at least 30% of the total members of the Board of Commissioners . Currently, the Company does not have a replacement for the Independent Commissioner who passed away on April 19, 2020, namely Willy Rumodor.

Independent Commissioners Criteria

In appointing an Independent Commissioner, the Company refers to the provisions of prevailing laws and regulations, in this case, the Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 Regarding the Directors and Board of Commissioners of an Issuer or Public Company, which sets the criteria of an Independent Commissioner, as follows:

1. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the

mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;

2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
3. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Komisaris Independen merupakan pihak independen yang dipilih sesuai dengan kemampuan dan latar belakangnya, serta telah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dijabarkan pada bagian sebelumnya. Pada tanggal 15 Agustus 2018, Perseroan menyelenggarakan RUPSLB untuk mengangkat Willy Rumondor sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan.

Issuer or Public Company within the last 6 (six) months, except for reappointment as Independent Commissioner of the Issuer or Public Company

2. Do not have shares either directly or indirectly in the Issuer or Public Company;
3. Do not have any affiliations with the Issuer or Public Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or majority shareholders of the Issuer or Public Company; and
4. Does not have a business relationship, directly or indirectly, related to the business activities of the Issuer or Public Company. in the period next;

Independency Statement of Independent Commissioners

Independent Commissioners are independent parties who are selected according to their abilities and backgrounds, and have met the requirements stipulated in the Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning the Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies as described in the previous section. On August 15, 2018, the Company held an EGMS to appoint Willy Rumondor as President Commissioner and concurrently as Independent Commissioner of the Company.



DIREKSI

Board of Directors

Direksi adalah organ Perseroan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengelolaan Perusahaan serta melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Direksi adalah organ yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI (BOARD CHARTER)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, serta wewenang Dewan Komisaris dalam menjalankan perannya, Perseroan telah mensahkan Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris PT Intan Baruparana Finance Tbk pada 05 April 2019. Pengesahan Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris tersebut ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Pedoman Kerja Direksi, berisikan :

1. Keanggotaan Direksi Perseroan;
2. Rangkap Jabatan Direksi;
3. Pengangkatan dan masa jabatan anggota Direksi;
4. Pengunduran diri anggota Direksi Perseroan;
5. Pemberhentian dan pemberhentian sementara anggota Direksi Perseroan;
6. Penggantian anggota Direksi Perseroan;

The Board of Directors is the organ of the Company that is collectively in charge and responsible for managing the Company and implementing GCG at all levels of the organization. Directors are organs that are fully responsible for managing the Company for the interests and objectives of the Company in accordance with the provisions of the articles of association.

BOARD OF DIRECTORS WORK GUIDELINE (BOARD CHARTER)

In order to support the implementation of the duties and responsibilities, as well as the authority of the Board of Commissioners in carrying out their role, the Company has adopted the Working Guidelines of the Directors and Board of Commissioners of PT Intan Baruparana Finance Tbk. on April 5, 2019. The ratification of the Directors and Board of Commissioners Work Guidelines was signed by the Directors and the Board of Commissioners and Board of Directors'

The Board of Directors Work Guidelines, containing:

1. Membership of the Board of Directors of the Company;
2. Concurrent Positions of the Board of Directors;
3. Appointment and tenure of members of the Board of Directors;
4. Resignation of a member of the Board of Directors of the Company;
5. Termination and temporary dismissal of members of the Board of Directors of the Company;
6. Replacement of the members of the Board

1

Ikhtisar 2020
2020 Highlights

2

Laporan Manajemen
Management Report

3

Profil Perusahaan
Company Profile

4

Sumber Daya
Manusia
Human Capital

5

Analisa & Pembahasan
Manajemen
Management
Discussion & Analysis

6

Tata Kelola
Perusahaan
Good Corporate
Governance

7

Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Corporate Social
Responsibility

7. Persyaratan anggota Direksi Perseroan;
8. Persyaratan anggota Direksi Perseroan;
9. Etika Jabatan Direksi Perseroan;
10. Tugas Direksi Perseroan
11. Tanggung jawab Direksi Perseroan;
12. Wewenang Direksi Perseroan;
13. Benturan Kepentingan;
14. Hak Direksi Perseroan
15. Kewajiban Direksi Perseroan;
16. Rapat Direksi;
17. Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris

- of Directors of the Company;
7. Requirements for members of the Company's Board of Directors;
8. Requirements for members of the Company's Board of Directors;
9. Ethics of the Position of the Board of Directors of the Company;
10. Duties of the Board of Directors of the Company
11. Responsibilities of the Board of Directors of the Company;
12. The authority of the Board of Directors of the Company;
13. Conflict of Interest;
14. The rights of the Company's Directors
15. Obligations of the Board of Directors of the Company;
16. Board of Directors Meeting;
17. Meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners

PENUNJUKAN DIREKSI

Dalam pengangkatan Direksi, kandidat Direksi dapat dinominasikan oleh pemegang saham pengendali. Komite Nominasi dan Remunerasi kemudian akan membahas profil dan kualifikasi masing-masing kandidat dalam rapat nominasi. Kandidat terpilih kemudian akan diangkat dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam rangka memenuhi kebutuhan Perusahaan, Direksi diangkat berdasarkan kualifikasi mereka sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

BOARD OF DIRECTORS APPOINTMENT

In appointing the Board of Directors, the Board of Directors candidates can be nominated by the controlling shareholder. Nomination and Remuneration Committee will further discuss the profile and qualifications of each candidate in the nomination meeting. The elected candidates will be appointed with the approval of the General Meeting of Shareholders. In order to meet the needs of the Company, Board of Directors are appointed based on their qualifications in accordance with the requirements set by the Financial Services Authority as stipulated in the Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

JUMLAH DAN KOMPOSISI DIREKTUR

Pada periode tahun 2020, terjadi perubahan komposisi Direksi, berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 26 Agustus 2020.

NUMBER AND COMPOSITION OF DIRECTORS

In the 2020 period, there was a change in the composition of the Board of Directors, based on the Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated 26 August 2020.

Komposisi Direksi Per 1 Januari 2020 – 26 Agustus 2020

Composition of the Board of Directors as of January 1, 2020 - August 26, 2020

Nama Name	Jabatan Position	
Carolina Dina Rusdiana	Direktur Utama	President Director
Alexander Reyza	Direktur	Director
Kurniawan Saktiaji	Direktur	Director
Mulyadi	Direktur	Director

Komposisi Direksi Per 26 Agustus 2020 – 31 Desember 2020

Composition of the Board of Directors as of 26 August 2020 - 31 December 2020

Nama Name	Jabatan Position	
Carolina Dina Rusdiana	Direktur Utama	President Director
Alexander Reyza	Direktur	Director
Mulyadi	Direktur	Director

RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Secara umum, Direksi berperan untuk mengelola kegiatan operasional perusahaan dengan orientasi kepentingan terbaik perusahaan. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab Direksi dijabarkan sebagai berikut:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar;

SCOPE OF WORK AND RESPONSIBILITIES OF DIRECTORS

In general, the Board of Directors has a role in managing the company's operations in the best interests of the company. The scope of work and responsibilities of the Directors are set out as follows

1. To carry out and be responsible for the management of the Company for the interests of the Company in accordance with the aims and objectives of the Company stipulated in the articles of

2. Direksi Perseroan dapat membentuk komite dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab;
3. Dalam hal pembentukan komite, maka Direksi Perseroan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku;
4. Menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan prinsip-prinsip Manajemen Risiko dalam setiap kegiatan operasional Perseroan;
5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Perseroan, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

Tanggung Jawab Direksi Perseroan

1. Setiap anggota Direksi Perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi Perseroan dalam menjalankan tugasnya;
2. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu) di atas, apabila dapat membuktikan bahwa :
 - kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan, serta sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik;
 - tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

Setiap anggota Direksi mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

association;

2. The Company's Directors can form a committee in order to support the effectiveness of the implementation of duties and responsibilities;
3. In the case of forming a committee, the Company's Directors must evaluate the performance of the committee at the end of the fiscal year;
4. Implement Good Corporate Governance and Risk Management Principles in each of the Company's operational activities;
5. Following up on audit findings and recommendations from the Company's internal audit work unit, external auditors, the results of OJK supervision and/or the results of supervision of other authorities.

Responsibilities Of The Board Of Directors Of The Company

1. Member of the Company's Board of Directors is jointly and severally liable for the Company's losses caused by errors or negligence of members of the Company's Board of Directors in carrying out their duties;
2. Members of the Company's Board of Directors cannot be held responsible for the Company's losses as referred to in point 1 (one) above, if they can prove that:
 - the loss is not due to an error or omission;
 - has conducted arrangements in good faith, full responsibility and prudence for the interests, and in accordance with the aims and objectives of the Issuer or Public Company;
 - does not have a conflict of interest, either directly or indirectly for the management action which results in a loss; and

Each member of the Board of Directors has the following responsibilities:

1. Direktur Utama

- a. Memimpin Perseroan dengan memilih, menentukan dan memutuskan, peraturan serta kebijakan tertinggi yang akan diterapkan dalam tubuh Perseroan
- b. Bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan Perseroan dengan membawahi Direktorat Keuangan, Direktorat Bisnis, Direktorat Manajemen Risiko dan Kepatuhan serta menjaga kondisi keuangan Perseroan
- c. Bertanggung jawab atas kinerja Perseroan dengan mengawasi pekerjaan karyawan
- d. Merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan kekayaan Perseroan.
- e. Bertindak sebagai perwakilan Perseroan dalam hubungannya dengan dunia luar Perseroan.
- f. Menetapkan strategi untuk mencapai visi dan misi Perseroan.
- g. Mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan Perseroan.
- h. Menyetujui anggaran tahunan Perseroan dan melaporkannya kepada Pemegang saham

2. Direktur Keuangan

- a. Menjalankan keuangan Perseroan secara optimal dan menjawab isu-isu akuntansi yang ada dalam Perseroan;
- b. Memimpin kinerja keuangan baik dalam analisis audit pelaporan dan penggunaan dana yang dimiliki Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perseroan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku;
- c. Membuat perencanaan keuangan (financial projection) Perseroan dengan mempertimbangkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan perundangan terkait keuangan lainnya yang berlaku;
- d. Mengelola keuangan tidak hanya untuk proses operasional, namun juga untuk meningkatkan kegiatan usaha Perseroan

1. President Director

- a. Lead the Company by selecting, determining and deciding, the highest regulations and policies that will be applied in the body of the Company
- b. Responsible for leading and running the Company in charge of the Finance Directorate, Business Directorate, Risk Management and Compliance Directorate and maintaining the financial condition of the Company.
- c. Responsible for the Company's performance by overseeing the work of employees
- d. Plan and develop sources of income and expenditure of the Company's wealth.
- e. Acting as a representative of the Company in relation to the outside world of the Company.
- f. Establish strategies to achieve the Company's vision and mission.
- g. Coordinate and supervise all activities of the Company.
- h. Approved the Company's annual budget and reported it to shareholders

2. Finance Director

- a. Running the Company's finances optimally and answering accounting issues in the Company;
- b. Leading financial performance both in the analysis of reporting audits and the use of funds owned by the Company in accordance with applicable provisions in the Company and other applicable laws and regulations;
- c. Prepare financial planning (financial projection) of the Company by considering the provisions of the Financial Services Authority and other relevant financial laws;
- d. Managing finance not only for operational processes, but also to increase the Company's business

ser-ta perencanaan yang akan dilakukan kedepannya agar Perseroan bisa semakin tumbuh dan berkembang;

- e. Mengelola cashflow Perseroan sehingga kebutuhan operasional Perseroan tidak terganggu;
- f. Mencari sumber pendanaan untuk mengembangkan bisnis Perseroan baik dari lembaga perbankan maupun non perbankan;
- g. Membuat perencanaan jangka panjang dengan memperhitungkan penilaian waktu dari uang (*time value of money*);
- h. Memastikan bahwa laporan-laporan rutin terkait dengan keuangan Perseroan telah dibuat dengan benar dan disampaikan tepat waktu.

3. Direktur Bisnis

- a. Mencapai target penjualan yang ditetapkan perusahaan.
 - i. Menyusun Strategy Penjualan
 - ii. Mempersiapkan Budget tahunan.
 - iii. Mendistribusikan Sales Target
 - iv. Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi rencana kerja dan Budget.
 - v. Menjajaki peluang bisnis baru (Research & Development).
- b. Menjaga kualitas portfolio pembiayaan sesuai target yang ditetapkan.
- c. Membangun & menjaga hubungan baik dengan prospek maupun existing customer IBF.
- d. Melakukan Coaching, Counseling, Mentoring, Motivating dan Kaderisasi anggota Team.
- e. Melakukan analisa proses penjualan, prosedur dan mengembangkan system dan prosedur.
- f. Merepresentasikan perusahaan untuk berbagai kegiatan internal dan external yang berhubungan dengan penjualan
- g. Sebagai Anggota Credit Committee
 - i. Memberikan rekomendasi atas proposal dan memo yang terkait dengan proposal pembiayaan

activities as well as future planning so that the Company can grow and develop;

- e. Manage the Company's cash flow so that the operational needs of the Company are not disrupted;
- f. Looking for funding sources to develop the Company's business both from banking and non-banking institutions;
- g. Make long-term planning by taking into account the time value of money (*time value of money*);
- h. Ensure that regular reports related to the Company's finances have been made correctly and delivered on time.

3. Business Director

- a. Achieve sales targets set by the company.
 - i. Develop a Sales Strategy
 - ii. Preparing an annual Budget.
 - iii. Distributing Target Sales
 - iv. Monitoring and evaluating the implementation of work plans and budgets.
 - v. Explore new business opportunities (Research & Development).
- b. Maintaining the quality of the financing portfolio according to the targets set.
- c. Build & maintain good relations with prospects and existing customers IBF.
- d. Conduct Coaching, Counseling, Mentoring, Motivating and Team member Cadre.
- e. Analyze sales processes, procedures and develop systems and procedures.
- f. Representing the company for various internal and external activities related to sales.
- g. As a Credit Committee Member
 - i. Providing recommendations for proposals and memos related to financing proposals

- ii. Menandatangani dokumen penawaran pembiayaan serta kontrak/ perjanjian pembiayaan sesuai kuasa yang diberikan.

4. Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan

- a. Membawahkan fungsi kepatuhan yang berfungsi untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- b. Membawahi fungsi manajemen risiko dan administrasi yang berfungsi untuk memastikan bahwa penerapan manajemen risiko perusahaan yang merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari kegiatan usaha perusahaan dapat terlaksana dengan baik sesuai aturan
- c. Membawahi fungsi Risk Review yang berfungsi untuk memastikan adanya kajian risiko yang independen atas kegiatan usaha perusahaan sehingga kualitas aktiva perusahaan dapat terjaga dengan baik.
- d. Membawahi fungsi Special Asset Management yang berfungsi untuk memastikan bahwa Piutang Pembiayaan Bermasalah perusahaan dapat ditangani dan dilakukan tindakan perbaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat menjaga rasio piutang pembiayaan bermasalah.
- e. Membawahi fungsi hukum dan litigasi yang berfungsi untuk memastikan bahwa risiko hukum perusahaan dapat dijaga dengan baik dan juga memastikan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya perusahaan dapat memperoleh hak-nya sebagai kreditur melalui jalur hukum.

- ii. Signing financing offer documents and financing contracts/ agreements in accordance with the power granted.

4. Risk Management And Compliance Director

- a. Supervision of compliance functions that function to ensure that policies, provisions, systems, and procedures, as well as business activities carried out by the Company in accordance with statutory regulations
- b. Supervises the functions of risk management and administration which function to ensure that the application of corporate risk management which is a set of procedures and methodologies used to identify, measure, monitor and control risks arising from the company's business activities can be carried out properly according to the rules
- c. Supervises the Risk Review function which functions to ensure an independent risk assessment of the company's business activities so that the quality of the company's assets can be maintained well.
- d. In charge of the Special Assets Management function that serves to ensure that the Troubled Credit Receivables company can be handled and corrective action in accordance with applicable regulations in order to maintain the ratio of non- performing financing receivables.
- e. Supervises the legal and litigation functions which function to ensure that the legal risks of the company can be properly guarded and also to ensure that in carrying out its business activities the company can obtain its rights as a creditor through legal channels.

RAPAT DIREKSI

Rapat Direksi mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik wajib diadakan secara berkala paling kurang sebanyak 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Selama tahun 2020, frekuensi rapat dan agenda rapat dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

BOARD OF DIRECTORS MEETING

The Board of Directors Meeting refers to the Company's Articles of Association and Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, which must be held regularly at least 1 (one) time per month. During 2020, the frequency of meetings and meeting agendas can be seen in the table below:

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Komisaris dan Direksi BOC And BOD Meetings	
		Jumlah Total	Kehadiran % Attendance
Carolina Dina Rusdiana	Direktur Utama President Director	12	100%
Alexander Reyza	Direktur Director	12	100%
Kurniawan Saktiaji*	Direktur Director	8	100%
Mulyadi	Direktur Director	12	100%

*Menjabat hingga 26 Agustus 2020

* Serves until August 26, 2020

No	Tanggal Date	Agenda	
1	28-Jan-20	1. Kinerja Kerja Tahun 2019 2. Rencana Bisnis Tahun 2020 3. Paparan hasil kerja tahun 2019 dari masing-masing divisi 4. Update lainnya dari masing-masing BOD	1. Work Performance in 2019 2. Business Plan for 2020 3. Presentation of 2019 work results from each division 4. Other updates from each BOD
2	17-Feb-20	1. Kinerja Keuangan bulan Januari 2020 2. NPF Januari 2020 & proyeksi collection Feb 2020 3. Tindakan lanjut rencana konversi hutang menjadi saham 4. Upaya pemenuhan persyaratan konversi	1. Financial Performance in January 2020 2. NPF January 2020 & projected collection for Feb 2020 3. Follow up plans to convert debt into shares 4. Efforts to fulfil conversion requirements
3	20-Mar-20	1. Kinerja Keuangan bulan Februari 2020 2. NPF Februari 2020 & proyeksi collection Mar 2020 3. Progres Penjualan aset 4. Program efisiensi	1. Financial Performance for February 2020 2. NPF February 2020 & Mar 2020 collection projection 3. Progress of asset sales 4. Efficiency program

No	Tanggal Date	Agenda	
4	11-Apr-20	1. Kinerja Keuangan bulan Maret 2020 2. NPF Maret 2020 & proyeksi collection April 2020 3. Tindak lanjut hasil meeting bulan Maret 2020 4. Update lainnya dari masing-masing divisi	1. Financial Performance for March 2020 2. NPF March 2020 & April 2020 collection projection 3. Follow-up results of the March 2020 meeting 4. Other updates from each division
5	18-May-20	1. Kinerja Keuangan bulan April 2020 2. NPF April 2020 & proyeksi collection Mei 2020 3. Proyeksi keuangan untuk usulan relaksasi ke Kreditor 4. Pemenuhan dokumen-dokumen penunjang proses relaksasi	1. Financial Performance in April 2020 2. NPF April 2020 & May 2020 collection projection 3. Financial projections for proposed relaxation to Creditors 4. Fulfilment of documents supporting the relaxation process
6	03-Jun-20	1. Kinerja Keuangan bulan Mei 2020 2. NPF Mei 2020 & proyeksi collection Juni 2020 3. Update dari masing-masing divisi 4. Usulan relaksasi ke OJK terkait pemenuhan rasio-rasio	1. Financial Performance in May 2020 2. NPF May 2020 & projected collection for June 2020 3. Updates from each division 4. Suggestion for relaxation to the OJK regarding fulfilment of the ratios
7	20-Jul-20	1. Kinerja Keuangan bulan Juni 2020 2. NPF Juni 2020 & proyeksi collection Jul 2020 3. Update struktur organisasi 4. Update compliance perusahaan	1. Financial Performance in June 2020 2. NPF June 2020 & projected collection for Jul 2020 3. Update the organizational structure 4. Update company compliance
8	05-Aug-20	1. Kinerja Keuangan bulan Juli 2020 2. NPF Juli 2020 & proyeksi collection Aug 2020 3. Update dari masing-masing divisi 4. Progres persiapan atas amandemen perjanjian perdamaian	1. Financial Performance in July 2020 2. NPF July 2020 & Aug 2020 collection projections 3. Updates from each division 4. Progress on the preparation of amendments to the peace treaty
9	18-Sep-20	1. Kinerja Keuangan bulan Aug 2020 2. NPF Aug 2020 & proyeksi collection Sep 2020 3. Proyeksi atas penerapan PSAK 71 4. Pembahasan pemenuhan rasio permodalan dan MSMD	1. Financial Performance for August 2020 2. NPF Aug 2020 & Sep 2020 collection projections 3. Projections for the application of PSAK 71 4. Discussion on the fulfilment of the capital ratio and MSMD
10	09-Oct-20	1. Kinerja Keuangan bulan September 2020 2. NPF September 2020 & proyeksi collection Oct 2020 3. Persiapan dan pemenuhan dokumen untuk proses pelaksanaan amandemen perjanjian perdamaian 4. Update lainnya dari masing-masing BOD	1. Financial Performance for September 2020 2. NPF September 2020 & projected collection for Oct 2020 3. Preparation and fulfilment of documents for the process of implementing the peace agreement amendment 4. Other updates from each BOD
11	10-Nov-20	1. Kinerja Keuangan bulan Oktober 2020 2. NPF Oktober 2020 & proyeksi collection Nov 2020 3. Pembahasan rencana bisnis dan keuangan berkelanjutan tahun 2021 4. Update lainnya dari masing-masing divisi	1. Financial Performance in October 2020 2. NPF October 2020 & projected collection for Nov 2020 3. Discussion on business plans and sustainable finance for 2021 4. Other updates from each division

No	Tanggal Date	Agenda
12	11-Dec-20	1. Kinerja Keuangan bulan November 2020 2. NPF November 2020 & proyeksi collection Dec 2020 3. Persiapan tutup buku tahun 2020 4. Data-data yang dibutuhkan untuk persiapan audiensi ke OJK 1. Financial Performance in November 2020 2. NPF November 2020 & Dec 2020 collection projections 3. Prepare to close the 2020 book 4. The data needed to prepare for the hearing to the OJK

PROGRAM PELATIHAN DIREKSI

Direksi selalu melakukan peningkatan kompetensi, seperti diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama pada Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Pada tahun 2020 anggota Direksi telah mengikuti kegiatan pelatihan dan pengembangan, yaitu :

DIRECTORS TRAINING PROGRAM

Direksi always improves competence, as stipulated in the Financial Services Authority Regulation Number 4/POJK.05/2013 concerning the Fit and Proper Test for Main Parties in Financing Companies and Financial Services Authority Regulation Number 27/POJK.03/2016 concerning the Fit and Proper Test For the Main Party of Financial Services Institutions. In 2020, members of the Board of Directors have participated in training and development activities, namely:

Nama Name	Jabatan Position	Kegiatan Yang Dilakukan Activities performed	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Penyelenggara Organizer
Carolina Dina Rusdiana	Direktur Utama President Director	Online Seminar "Multifinance Road to Recovery" (for Director, Commisioner, Controlling Share Holder, and Sharia Supervisory Board)	01-Oct-20	APPI
		Webinar ISO 37001 : Beyond Certification - Implementing Effective Anti-Bribery Controls in Organization	13-Nov-20	EY Forensic & Integrity Services
		Seminar Online "Strategi Multifinance Bertahan di Tengah Resesi Ekonomi Indonesia" (Seminar Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Pengendali, dan Dewan Pengawas Syariah)	01-Dec-20	APPI
Alexander Reyza	Direktur Director	Online Seminar "Multifinance Road to Recovery" (for Director, Commisioner, Controlling Share Holder, and Sharia Supervisory Board)	01-Oct-20	APPI

Nama Name	Jabatan Position	Kegiatan Yang Dilakukan Activities performed	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation	Penyelenggara Organizer
Mulyadi	Direktur Director	Virtual Seminar "Peran Infrastruktur ICT dalam Masa Pandemi" (Pembangunan Ekonomi dan Sosial)	08-Oct-20	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
		Webinar ISO 37001 : Beyond Certification - Implementing Effective Anti-Bribery Controls in Organization	13-Nov-20	EY Forensic & Integrity Services
		Virtual Seminar "Standarisasi Kompetensi Pengelolaan Uang Rupiah"	17-Nov-20	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
		Seminar Online "Strategi Multifinance Bertahan di Tengah Resesi Ekonomi Indonesia" (Seminar Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Pengendali, dan Dewan Pengawas Syariah)	01-Dec-20	APPI
		Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ("APU PPT"), "Rezim APU PPT"	14-Dec-20	PT Intan Baruprana Finance Tbk & PPATK
		Online Seminar "Multifinance Road to Recovery" (for Director, Commissioner, Controlling Share Holder, and Sharia Supervisory Board)	01-Oct-20	APPI
		Webinar ISO 37001 : Beyond Certification - Implementing Effective Anti-Bribery Controls in Organization	13-Nov-20	EY Forensic & Integrity Services
		Seminar Online "Strategi Multifinance Bertahan di Tengah Resesi Ekonomi Indonesia" (Seminar Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Pengendali, dan Dewan Pengawas Syariah)	01-Dec-20	APPI
		Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ("APU PPT"), "Rezim APU PPT"	14-Dec-20	PT Intan Baruprana Finance Tbk & PPATK

PROGRAM ORIENTASI DIREKSI

Perseroan memiliki kebijakan untuk melakukan *mentoring* terhadap anggota Direksi yang baru bergabung yang dilakukan secara bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya yang telah bergabung lebih dulu.

KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI

Perseroan melakukan program pengembangan karyawan secara berkesinambungan. Dalam menominasikan anggota Direksi, Perseroan mendahulukan pihak internal terlebih dahulu. Perseroan juga memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi yang salah satu tugasnya adalah menelaah dan mengusulkan perencanaan suksesi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Prosedur Nominasi sebagaimana dimaksud dijalankan secara transparan dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Perseroan, serta peraturan perundang-undangan.

Program suksesi Direksi Perseroan dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usaha Perseroan. Program suksesi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Program pendidikan dan pelatihan, baik yang dilakukan di internal Perseroan atau yang diselenggarakan oleh pihak eksternal; dan
2. Pendelegasian wewenang.

BOARD OF DIRECTORS ORIENTATION PROGRAM

The Company has a policy to mentor new members of the Board of Directors who have joined together with other members of the Board of Directors who have joined first.

BOARD OF DIRECTORS SUCCESSION POLICY

The Company provides employee development programs on an ongoing basis. In the nomination process for the Board of Directors members, the Company prioritizes internal candidates. The Company also has established a Nomination and Remuneration Committee whose job is to examine and propose succession planning for members of the Directors and/or Board of Commissioners. The Nomination Procedure referred to is carried out transparently and in accordance with the conditions and needs of the Company, as well as laws and regulations.

The Company's Board of Directors succession program is carried out continuously in accordance with the needs and business development of the Company. The succession program is carried out in the following mechanisms:

1. Education and training programs, both conducted internally within the Company and provided by external parties; and
2. Delegation of authority.



ASESMENT TERHADAP DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Assessment On Board Of Commissioners And Board Of Directors

PROSEDUR PELAKSANAAN ASESMENT ATAS KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Assessment kinerja Dewan Komisaris dan Direksi masuk ke dalam agenda rapat Tim Remunerasi yang membahas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi serta kemudian menentukan besaran remunerasi yang sesuai dengan kinerja pada periode yang bersangkutan. *Assessment* kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara langsung, serta oleh pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Sementara itu, kinerja Dewan Komisaris dievaluasi oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

KRITERIA ASESMENT ATAS KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Berikut ini adalah kriteria *Assessment* kinerja Dewan Komisaris:

1. Implementasi GCG
2. Keselarasan kinerja terhadap visi dan misi
3. Perbandingan antara target dan pencapaian aktual.

Berikut adalah kriteria *Assessment* kinerja Direksi:

1. Implementasi GCG
2. Kinerja secara keuangan, operasional,

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE ASSESSMENT PROCEDURE

The performance evaluation of the Board of Commissioners and Directors is included in the agenda of the Remuneration Team meeting which discusses the performance of the Board of Commissioners and Directors and then determines the amount of remuneration in accordance with the performance of the relevant period. The performance evaluation of the Directors is carried out by the Board of Commissioners directly, as well as by shareholders at the Annual General Meeting of Shareholders. Meanwhile, the performance of the Board of Commissioners is evaluated by shareholders in the Annual General Meeting of Shareholders.

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE ASSESSMENT CRITERIA

The Board of Commissioners Performance Assessment criteria are as follows:

1. GCG implementation
2. Alignment of performance with vision and mission
3. Comparison between targets and actual achievements.

Board of Directors performance evaluation criteria are as follows

1. GCG implementation
2. Financial, operational and other aspects

dan aspek-aspek lainnya yang berperan penting bagi keberlanjutan Perseroan

3. Perbandingan antara target dan pencapaian aktual
4. Keselarasan kinerja terhadap visi dan misi
5. Strategi dan inovasi
6. Pencapaian manajemen dalam meningkatkan nilai bagi pemegang saham
7. Kinerja masing-masing Direktur secara individu

that play an important role in the Company's sustainability

3. Comparison between targets and actual achievements
4. Alignment of performance with vision and mission
5. Strategy and innovation
6. Management's achievement in increasing value for shareholders
7. The performance of each Director individually

PIHAK YANG MELAKUKAN ASSESMENT

Assessment terhadap kinerja Dewan Komisaris dan Direksi bersifat internal atau *self-Assessment*. Tidak ada pihak independen yang ditunjuk untuk melakukan *Assessment* kinerja Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2020.

THE ASSESSOR

Board of Commissioners and Board of Directors performance assessment is done internally or through self-assessment. There is no independent parties appointed to perform the Board of Commissioners and Board of Directors performance assessment in 2020.



KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Board of Commissioners and The Board of Directors Remuneration Policy

PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Prosedur remunerasi dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi juga secara berkala mengevaluasi kebijakan, besaran, dan struktur remunerasi. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan bahwa besarnya remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh RUPS, namun RUPS dapat memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Direksi.

STRUKTUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Berdasarkan ketentuan yang diterapkan pemegang saham, komponen penghasilan Dewan Komisaris terdiri dari:

1. Gaji/ Honorarium
2. Tunjangan
3. Fasilitas
4. Tantiem/Insentif Kinerja

Dengan demikian, struktur remunerasi dan komponennya bagi Dewan Komisaris dan Direksi dapat disampaikan sebagai berikut:

BOARD OF COMMISSIONERS AND BORAD OF DIRECTORS REMUNERATION PROCEDURE

Remuneration procedures are carried out in accordance with applicable laws. The Company, through the Nomination and Remuneration Committee, also periodically evaluates the policies, magnitude and structure of the remuneration. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT) states that the amount of remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors is determined by the GMS, but the GMS can authorize the Board of Commissioners to determine the remuneration of the Board of Directors.

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS REMUNERATION STRUCTURE

Based on provisions implemented by shareholders, components of the Board of Commissioners' remuneration consist of:

1. Salary/Honorarium
2. Allowances
3. Facilities
4. Performance bonus/incentives

Therefore, the remuneration structure and its components for the Board of Commissioners and Directors can be provided are as follows:

Komponen Remunerasi Dewan Komisaris

The Board of Commissioners' Remuneration Component

Komponen Component	Keterangan Description	
Honorarium Honorarium	- Komisaris Utama 45% dari gaji Direktur Utama - Komisaris 90% dari honorarium Komisaris Utama	- President Commissioner is 45% of the salary of the President Director - Commissioner is 90% of the honorarium of the President Commissioner
Tunjangan Hari Raya Holiday Allowance	1 (satu) kali honorarium	1 (one) month honorarium
Tantiem Tantiem	Ditetapkan setiap tahun sesuai keputusan RUPS	Stipulated annually based on the GMS resolutions

Komponen Remunerasi Direksi

The Board of Directors Remuneration Component

Komponen Component	Keterangan Description	
Honorarium Honorarium	1 (satu) kali honorarium	1 (one) time honorarium
Tunjangan Hari Raya Holiday Allowance	1 (satu) kali honorarium	1 (one) time honorarium
Tantiem Tantiem	Ditetapkan setiap tahun sesuai keputusan RUPS	Stipulated annually according to the resolution of the GMS



HUBUNGAN AFILIASI

Affiliations

Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan wajib mengungkapkan hubungan afiliasi antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

In accordance with the Financial Services Authority regulations, the Company is required to disclose the affiliations among the Board of Directors, the Board of Commissioners and the Controlling Shareholders. Affiliations among members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Controlling Shareholders include:

1. Affiliation between members of the Board of Directors and other members of the Board of Directors.
2. Affiliation between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.
3. Affiliation between the members of the Board of Directors and the Main Shareholders and/or controllers.
4. Affiliation between members of the Board of Commissioners and other Commissioners;
5. Affiliation between members of the Board of Commissioners and Major Shareholders and/or controllers.

The affiliation between the members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Controlling Shareholders of the Company is explained in the table below:

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keluarga Dengan Family affiliation with						Hubungan Keuangan Dengan Financial Relation With						Hubungan Kepengurusan Management Relation	
		BOC		BOD		Pemegang Saham Shareholder		BOC		BOD		Pemegang Saham Shareholder			
		Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No
Petrus Halim	Komisaris Commissioner	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Carolina Dina Rusdiana	Direktur Utama President Director	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Alexander Reyza	Direktur Director	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Mulyadi	Direktur Director	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	



KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Board of Commissioners and Board of Directors Composition Diversity

Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi yang beragam akan mendorong pengambilan keputusan yang lebih objektif dan komprehensif dikarenakan keputusan diambil dengan memperhatikan berbagai sudut pandang.

Diversity of Board of Commissioners and Board of Directors composition will encourage more objective and comprehensive decision making as the decisions will be taken by considering various points of view.

Hingga 31 Desember 2020, Perseroan belum memiliki aturan tertulis yang mengatur keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi, Perseroan mempertimbangkan kompetensi kandidat dan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

As of December 31, 2020, the Company did not have written provisions regulating diversity of the composition of the Board of Commissioners and Directors. In appointing members of the Board of Commissioners and Board of Directors, the Company considers the competence of candidates and refers to the prevailing laws and regulations.

Adapun keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Diversity of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors composition is as follows:

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Board of Commissioners Composition Diversity

Dewan Komisaris Dewan Komisaris	Jenis Kelamin Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Jenjang Pendidikan	Usia Usia	Pengalaman terakhir Pengalaman terakhir
Petrus Halim	Laki-laki Male	Bachelor of Science in Finance dari California State University, Fresno, Amerika Serikat (AS) (1993), Master of Business Administration in Finance dari Boston University, AS (1994)	50	Direktur Utama PT INTA dan Direktur PT INTA Trading President Director PT INTA and Director PT INTA Trading

Keberagaman Komposisi Direksi

Board of Commissioners Directors Diversity

Nama Name	Jenis Kelamin Gender	Jenjang Pendidikan Level Of Education	Usia Age	Pengalaman terakhir Recent Experience
Carolina Dina Rusdiana	Perempuan Female	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. (1985) Faculty of Social and Political Sciences, University of Indonesia. (1985)	58	Senior Advisor di PT Heksa Insurance and Group
Alexander Reyza	Laki-laki Male	Sarjana Ekonomi Manajemen dari Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia (1994) Bachelor of Economics Management from the Faculty of Economics, University of Indonesia (1994)	50	Head of Commercial Credit Risk PT Bank Rabobank International Indonesia
Mulyadi	Laki-laki	Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen dari Fakultas Ekonomi, Universitas Lampung (1991) Bachelor of Economics, Management Study Program from the Faculty of Economics, University of Lampung (1991)	53	Anggota Komite Audit di PT Intan Baruprana Finance Tbk Members at PT Intan Baruprana Finance Tbk

Komite Audit

Audit Committee

Komite Audit merupakan salah satu komite yang mendukung pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris. Pembentukan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Audit Committee is one of the committees that supports Board of Commissioners' Duties implementation. Establishment of the Company's Audit Committee refers to OJK Regulation No. 55/ POJK.04/2015 concerning the Audit Committee Establishment and Duty Implementation.

Keanggotaan Komite Audit yang menjabat tahun 2020 ditunjuk pada 11 Oktober 2019 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Intan Baruprana Finance Tbk No. 007/SKEP-DEKOM/IBF/1019 tentang Pemberhentian, Pengangkatan, dan Penetapan Susunan Komite Audit, komposisi Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

The members of the Audit Committee who served in 2020 were appointed on October 11, 2019 based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Intan Baruprana Finance Tbk No. 007/SKEP-DEKOM/IBF/1019 concerning Dismissal, Appointment and Determination of the Audit Committee Composition, the composition of the Company's Audit Committee is as follows:

Komposisi Komite Audit Perseroan

Audit Committee Composition

Nama Name	Jabatan Position	
Willy Rumondor *	Ketua	Chairman
Renaldi Ariyanto	Anggota	Member
Ivan Agustinus Lingga	Anggota	Member

*Meninggal dunia pada 19 April 2020

Profil singkat masing-masing anggota Komite Audit yang masih menjabat adalah sebagai berikut :

The brief profiles of each current member of the Audit Committee are as follows:

Renaldi Ariyanto – Anggota

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, lahir tahun 1960. Diangkat menjadi anggota Komite Audit Perseroan sejak 11 Oktober 2019 melalui surat keputusan Dewan Komisaris No. 007/SKEP-DEKOM/IBF/1019. Menyelesaikan pendidikan dari Woodbury University, Los Angeles, California, USA Bachelor of Science, International Business/Management tahun 1985

Memulai karir ditahun 1994 di Max Altman Camera, Photo & Trading Co. Los Angeles, California, USA sebagai Marketing Staff tahun 1980, kemudian Ellen of California, Garment & Trading Co. Los Angeles, California, USA Inspector & Comptroller tahun 1980, dan PT Bank Niaga sejak 1985 sd 1999. Sejak tahun 2012 menjabat sebagai President Director pada PT. Bringin Srikandi Finance dan terakhir sebagai anggota Komite manajemen risiko Bank of India.

Ivan Agustinus Lingga SE, Ak – Anggota

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, lahir tahun 1975. Diangkat menjadi anggota Komite Audit Perseroan sejak 11 Oktober 2019 melalui surat keputusan Dewan Komisaris No. 007/SKEP-DEKOM/IBF/1019. Menyelesaikan pendidikan dari Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Atmajaya Jakarta tahun 2000, dan profesi akuntan dari Universitas Indonesia tahun 2004.

Memulai karir profesional di KAP Drs RB Tanubrata & Rekan tahun 2000, Internal Audit Officer PT Smart Tbk tahun 2002, Internal Audit Asisten Manager PT Rajawali Plantation tahun 2005 hingga menjadi Manager Performance Improvement tahun 2010, sebagai Head of Internal Audit dimulai di PT Circle K Indonesia Utama tahun 2012, PT Tirta Amarta Bottling Co-Manufactured tahun 2012, PT Rajakamar International Grup tahun 2014, PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk tahun 2014, dan

Renaldi Ariyanto – Member

An Indonesian citizen, domiciled in Jakarta, born in 1960. Appointed as a member of the Company's Audit Committee since October 11, 2019 through the Decree of the Board of Commissioners No. 007/SKEP-DEKOM/IBF/1019. Graduated from Woodbury University, Los Angeles, California, USA Bachelor of Science, International Business/Management in 1985

Started his career in 1994 at Max Altman Camera, Photo & Trading Co. Los Angeles, California, USA as Marketing Staff in 1980, then Ellen of California, Garment & Trading Co. Los Angeles, California, USA Inspector & Comptroller in 1980, and PT Bank Niaga from 1985 to 1999. Since 2012 he was appointed as President Director at PT Bringin Srikandi Finance and the latest is member of risk management committee at Bank of India.

Ivan Agustinus Lingga SE, Ak – Member

Indonesian citizen, domiciled in Jakarta, born in 1975. Appointed as a member of the Company's Audit Committee since October 11, 2019 through the Decree of the Board of Commissioners No. 007/SKEP-DEKOM/IBF/1019. He graduated from the Faculty of Economics, Department of Accounting, Atmajaya University, Jakarta in 2000, and the accounting profession from Universitas Indonesia in 2004.

Started his professional career at KAP Drs. RB Tanubrata & Partners in 2000, Internal Audit Officer at PT Smart Tbk in 2002, Assistant Internal Manager at PT Rajawali Plantation in 2005 until appointed Manager of Performance Improvement in 2010, as Head of Internal Audit starting at PT Circle K Indonesia In 2012, PT Tirta Amarta Bottling Co-Manufactured in 2012, PT Rajakamar International Group in 2014, PT Arpeni Pratama

terakhir pada tahun 2017 sebagai Corporate Internal Audit (CIA) Dept Head PT Samudera Indonesia Tbk.

Tugas utama Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dengan memberikan masukan dan usulan atas laporan-laporan dari Direksi, serta memberi masukan atas hal-hal yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris. Rincian tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada Publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan

Ocean Line Tbk in 2014, and most recently in 2017 as the Corporate Internal Audit (CIA) Dept. Head of PT Samudera Indonesia Tbk.

The main duties of the Audit Committee are to assist the Board of Commissioners by providing input and proposals of reports from the Board of Directors, as well as providing input on matters that need the attention of the Board of Commissioners. Details description of duties and responsibilities of the Audit Committee are as follows

1. Reviewing financial information that will be released by the Company to the Public and/or the authorities including financial statements, projections and other reports related to the Company's financial information;
2. Reviewing compliance with laws and regulations relating to the Company's activities;
3. Provide independent opinions in the event of disagreements between management and the Accountant on the services they provide;
4. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of Public Accountants based on independence, the scope of the assignment, and fees;
5. Reviewing the implementation of audits by internal auditors and supervising the implementation of follow-up actions by the Board of Directors on the findings of internal auditors;
6. Reviewing risk management activities carried out by the Board of Directors, if the Company does not have a risk monitoring function under the Board of Commissioners;
7. Review complaints related to the accounting process and financial reporting of the Company;
8. Review and provide advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest of the Company; and

9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit melaksanakan Rapat dengan ketentuan:

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Pemberitahuan rapat Komite Audit dapat dilakukan secara langsung atau dengan menggunakan surat, surat elektronik, faksimili atau telepon.
3. Rapat Komite Audit dapat dilaksanakan melalui rapat formal atau dengan video/teleconference.
4. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.
5. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit. Dalam hal Komite Audit berhalangan hadir, maka rapat dapat dipimpin oleh salah satu anggota Komite Audit yang ditunjuk oleh Komite Audit.
6. Bila diperlukan, Komite Audit dapat mengundang pihak lain untuk ikut serta dalam rapat.
7. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan dengan mekanisme suara terbanyak.
8. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
9. Risalah rapat dalam point diatas harus diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal rapat, dan setiap anggota Komite berhak untuk mendapat salinan risalah rapat walaupun tidak hadir.

9. Maintain the confidentiality of the Company's documents, data and information.

In carrying out its duties, the Audit Committee conducts Meetings provided that:

1. The Audit Committee holds regular meetings at least 1 (one) time in 3 (three) months.
2. Notification of meetings of the Audit Committee can be done in person or by mail, electronic mail, facsimile or telephone.
3. Audit Committee meetings can be held through formal meetings or by video/teleconference.
4. Audit Committee meetings can be held if attended by more than 1/2 (one half) of the number of members.
5. The Audit Committee Meeting is chaired by the Chairperson of the Audit Committee. In the event that the Audit Committee is unable to attend, the meeting may be chaired by a member of the Audit Committee appointed by the Audit Committee.
6. If necessary, the Audit Committee can invite other parties to participate in the meeting.
7. The decision of the Audit Committee meeting is based on deliberation to reach a consensus. If consensus is not reached, decision making is carried out with the most votes mechanism.
8. Each Audit Committee meeting is outlined in the minutes of the meeting, including if there are differences of opinion, which are signed by all members of the Audit Committee present and submitted to the Board of Commissioners.
9. Minutes of meetings in the above points shall be completed within 14 (fourteen) days from the date of the meeting, and each Committee member is entitled to obtain a copy of the minutes of the meeting even if he did not attend the meeting.

Pada tahun 2020, Komite Audit telah melaksanakan rapat dengan agenda masing-masing rapat seperti tabel dibawah ini :

In 2020, the Audit Committee held meetings with Audit Committee are presented following table:

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Komite Audit Audit Committee Meetings	
		Jumlah Jumlah	Kehadiran Kehadiran
Willy Rumondor *	Ketua /Chairman	1	25%
Renaldi Ariyanto	Anggota/Member	4	100%
Ivan Agustinus Lingga	Anggota /Member	4	100%

*Meninggal dunia pada 19 April 2020

* Passed away on April 19, 2020

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE AUDIT

Selama periode 2020, Komite Audit telah melakukan tindakan-tindakan antara lain:

1. Melakukan *review* terhadap hasil audit yang dilakukan oleh Unit Audit Internal.
2. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilaksanakan oleh manajemen.

Beberapa rekomendasi yang di berikan oleh Komite Audit sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Tentang pelaksanaan GCG antara lain tentang sistem pengendalian, kerahasiaan, *review* Kantor Akuntan Publik, maupun informasi yang akan dikeluarkan ke *stakeholder*.
2. Tentang pelaksanaan pekerjaan Audit Internal, antara lain tentang pengelolaan resiko, pengendalian internal, ketaatan atas peraturan, dan mengantisipasi kecurangan.

AUDIT COMMITTEE ACTIVITY IMPLEMENTATION REPORT

In the 2020 period, the Audit Committee has taken measures including:

1. Reviewing the results of audits conducted by the Internal Audit Unit.
2. Reviewing the implementation of risk management activities carried out by management

Some of the recommendations given by the Audit Committee throughout 2019 are as follows:

1. Regarding the implementation of GCG, among others, regarding the system of control, confidentiality, review of the Public Accounting Firm, as well as information that will be released to stakeholders.
2. Regarding the implementation of Internal Audit work, including among others about risk management, internal control, compliance with regulations, and anticipation of fraud.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014. Melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 007/SKEP-DEKOM/IBF/0418 tanggal 10 April 2018, susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebagai berikut :

The Company has established a Nomination and Remuneration Committee in accordance with OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014. Through Board of Commissioners Decree No. 007/SKEP-DEKOM/IBF/0418, April 2018, the composition of the Nomination and Remuneration Committee members is as follows:

Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi Per 31 Desember 2020

as of December 31, 2019, the nomination and Remuneration Committee composition

Nama Name	Jabatan Position	
Willy Rumondor*	Ketua	Chairman
Petrus Halim	Anggota	Member
Mohammad Qudzie	Anggota	Member

*Meninggal dunia pada 19 April 2020

Profil singkat masing-masing anggota Komite Nominasi & Remunerasi adalah sebagai berikut :

Petrus Halim – Anggota

Profil Petrus Halim dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris Perseroan.

The brief profile of each member of the Nomination & Remuneration Committee is as follows:

Petrus Halim – Member

Petrus Halim's profile can be seen in the Profile section of the Company's Board of Commissioners

Mohammad Qudzie – Anggota

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, lahir tahun 1968. Diangkat menjadi anggota Komite Nominasi & Remunerasi Perseroan sejak 23 Maret 2018 melalui surat keputusan Dewan Komisaris no: 005/SKEP-DEKOM/IBF/0318. Menyelesaikan pendidikan Sarjana dari Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada pada tahun 1994.

Mohammad Qudzie – Member

Indonesian citizen, domiciled in Jakarta, born in 1968. Appointed as a member of the Company's Nomination & Remuneration Committee since March 23, 2018 through a decision letter from the Board of Commissioners no: 005/SKEP-DEKOM/IBF/0318. He completed his Bachelor of Education from the Faculty of Psychology at Gajah Mada University in 1994.

Memulai karir ditahun 1994 di PT United Tractors Indonesia sebagai Corporate Human Resource Management. Bergabung dengan PT

Started his career in 1994 at PT United Tractors Indonesia as a Corporate Human Resource Management. Joined PT Arsa Raya Perdana

Arsa Raya Perdana sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 sebagai Human Resources System Development. Mulai tahun 2000 sampai dengan saat ini bergabung dengan PT Intraco Penta Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Senior Vice President Human Energy.

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan beberapa kegiatan terkait nominasi dan remunerasi untuk menyeleksi calon Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta mengajukan usulan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Sepanjang tahun 2020 Komite Nominasi dan Remunerasi telah memberikan saran kepada Dewan Komisaris berupa: Penetapan remunerasi agar dilaksanakan sesuai dengan performance masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris, terkait dengan implementasi GCG, kesesuaian target dan pencapaian, kinerja perusahaan dan keselarasan kerja.

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Besaran remunerasi yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan dalam RUPS. Kriteria penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

1. Pencapaian kinerja keuangan Perseroan, termasuk terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban keuangannya;
2. Kondisi perekonomian dan perbandingan terhadap perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sejenis;
3. Kontribusi dan kinerja dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Perseroan.

from 1998 to 2000 as a Human Resources System Development. Starting from 2000 until now he joined PT Intraco Penta Tbk with his last position as Senior Vice President of Human Energy.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE ACTIVITY IMPLEMENTATION REPORT

The Nomination and Remuneration Committee has carried out several activities related to nomination and remuneration to select candidates for the Board of Commissioners and Directors of the Company and propose remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors.

In 2020, the Nomination and Remuneration Committee has provided advice to the Board of Commissioners in form of: Determination of remuneration to be carried out in accordance with the performance of each of the Directors and the Board of Commissioners, related to GCG implementation, conformity of achievements

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS' REMUNERATION

The amount of remuneration received by the Board of Commissioners and Board of Directors is determined based on GMS resolution. The criteria for determining the remuneration of members of the Board of Commissioners and Board of Directors are as follows:

1. Achievement of the Company's financial performance, including the Company's ability to meet its financial obligations;
2. Economic conditions and comparisons to companies that have similar business activities;
3. Contribution and performance of each member of the Board of Directors and Board of Commissioners for the Company.

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan memiliki peranan penting dalam memfasilitasi komunikasi antara organ Perseroan, serta bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan, perencanaan serta memastikan efektivitas dan transparansi komunikasi perusahaan, hubungan kelembagaan, hubungan investor dan pelaku pasar modal lainnya dengan tetap memperhatikan prinsip standar etika perusahaan, prinsip tata kelola, dan nilai-nilai perusahaan.

Corporate Secretary has an important role in facilitating communication between the Company's organs, and responsible on policy formulation, planning and ensuring the effectiveness and transparency of the Company's communications, institutional relations, investor relations and other capital market players while concerning corporate ethical standards and principles, governance principles, and corporate values.

Selain daripada itu, sekretaris perusahaan wajib memastikan pemenuhan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

In addition, the corporate secretary is obliged to ensure fulfillment of company compliance with capital market regulations.

Sekretaris Perusahaan dirangkap jabatan oleh **Alexander Reyza (Direktur Perseroan)** sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.003/SKEP-DIR/IBF/0818 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan tertanggal 20 Agustus 2018. Sekretaris Perusahaan memiliki tugas antara lain :

Corporate Secretary is concurrently served by Alexander Reyza (Director of the Company) in accordance with the Board of Directors Decree No.003/SKEP-DIR/IBF/0818 regarding the Appointment of the Company's Corporate Secretary dated August 20, 2018. The Corporate Secretary has duties including:

1. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan lembaga regulator pasar modal yakni OJK serta Bursa Efek Indonesia;
2. Sebagai pusat informasi bagi para pemegang saham dan seluruh pemangku

1. As a liaison between the Company and capital market regulator institutions namely OJK and the Indonesia Stock Exchange;
2. As an center of information for shareholders

kepentingan yang memerlukan informasi-informasi penting yang berkaitan dengan kegiatan dan perkembangan Perseroan;

3. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan agar tindakan korporasi yang dilakukan Direksi maupun transaksi yang dilakukan oleh korporasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal, anggaran dasar Perseroan dan peraturan serta perundangundangan yang berlaku di Republik Indonesia;
4. Melaksanakan penyelenggaraan RUPS Perseroan, Rapat Direksi dan Rapat Komisaris dan melakukan penelaahan dari aspek legal atas dokumen transaksi Perseroan.

Uraian Singkat Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan

Selama tahun 2020, pelaksanaan tugas dan kegiatan yang dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan antara lain sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal, termasuk aktif mengikuti acara sosialisasi, seminar ataupun *workshop* terkait Pasar Modal.
2. Menginformasikan kepada manajemen terkait dengan ketentuan terbaru di bidang Pasar Modal.
3. Penyelenggaraan RUPS Tahunan Perseroan
4. Penyelenggaraan kegiatan Rapat Koordinasi Dewan Komisaris, Direksi, Komite dan unit terkait.

PELATIHAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Sekretaris Perusahaan terus berupaya meningkatkan kompetensinya. Berikut adalah pelatihan/

and all stakeholders who need important information relating to the activities and developments of the Company;

3. Provide input to the Board of Directors of the Company so that corporate actions taken by the Board of Directors can be carried out by the Company in accordance with applicable laws and regulations in the capital market, the Company's articles of association and applicable laws and regulations of the Republic of Indonesia;
4. Carry out the Company's GMS, Board of Directors and Board of Commissioners' Meetings and conduct legal Review Of The Company's Transaction documents.

Brief corporate secretary duty implementation report

In 2020, implementation of duty and activities carried out by the Corporate Secretary are as follows:

1. Following development of the Capital Market, including actively attending socialization events, seminars or workshops related to the Capital Market.
2. Inform the management on the latest provisions in the Capital Market.
3. Organize the Company's Annual General Meeting of Shareholders
4. Organize Coordination Meeting activities for the Board of Commissioners, Directors, Committees and related units.

CORPORATE SECRETARY TRAINING

In order to support the implementation of its duties and responsibilities, the Corporate Secretary continues to improve his competence. Following are the training/

workshop/seminar yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan selama tahun 2020 antara lain:

workshops/seminars participated by the Corporate Secretary in 2020, including:

Pelatihan Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary Training

Nama name	Jabatan Position	Nama Pelatihan Name of Trainings	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Alexander Reyza	Direktur / Sekretaris Perusahaan Director/ Corporate Secretary	Online Seminar "Multifinance Road to Recovery" (for Director, Commisioner, Controlling Share Holder, and Sharia Supervisory Board)	01-Oct-20	APPI
		Virtual Seminar "Peran Infrastruktur ICT dalam Masa Pandemi" (Pembangunan Ekonomi dan Sosial)	08-Oct-20	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
		Webinar ISO 37001 : Beyond Certification - Implementing Effective Anti-Bribery Controls in Organization	13-Nov-20	EY Forensic & Integrity Services
		Virtual Seminar "Standarisasi Kompetensi Pengelolaan Uag Rupiah"	17-Nov-20	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
		Seminar Online "Strategi Multifinance Bertahan di Tengah Resesi Ekonomi Indonesia" (Seminar Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Pengendali, dan Dewan Pengawas Syariah)	01-Dec-20	APPI
		Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ("APU PPT"), "Rezim APU PPT"	14-Dec-20	PT Intan Baruprana Finance Tbk & PPATK

PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

Pelibatan Pemangku Kepentingan

Stakeholder Engagement

Pendekatan Kepada Pemangku Kepentingan Approach to Stakeholders

Perseroan telah melakukan identifikasi kelompok- kelompok yang merupakan pemangku kepentingan Perusahaan.

The Company has identified groups that are the Company's stakeholders

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Basis Penetapan Base of Appointent	Metode Pelibatan Engagement Method	Frekuensi Pertemuan Meeting Frequency	Topik yang penting bagi Pemangku Kepentingan Topics that are important for Stakeholders	Respons dari Perusahaan Response from Company
Pemegang Saham	• <i>Dependency</i> • <i>Responsibility</i> • <i>Influence</i> • <i>Diverse Perspective</i>	RUPS Tahunan, dan RUPS Luar Biasa	Minimal 1 tahun sekali	Capaian kinerja perusahaan, perubahan susunan tata kelola perusahaan	• Melakukan evaluasi • kinerja perusahaan • Meningkatkan kinerja untuk tahun berikutnya • Membuat laporan tahunan dan laporan keberlanjutan
Shareholders	• <i>Dependency</i> • <i>Responsibility</i> • <i>Influence</i> • <i>Diverse Perspective</i>	Annual GMS, and Extraordinary GMS	Minimum once a Year	Company performance achievements, changes in the composition of corporate governance	• Conduct evaluation • company performance • Improve performance for the following year • Making annual reports and sustainability reports
Investor	• <i>Dependency</i> • <i>Responsibility</i> • <i>Tension</i> • <i>Influence</i> • <i>Diverse Perspective</i>	RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa	Minimal 1 tahun sekali	Capaian kinerja perusahaan, Kecukupan modal perusahaan, Kondisi keuangan perusahaan	• Membuat laporan tahunan dan laporan keberlanjutan • Memberikan informasi lainnya terkait kinerja perusahaan
Investor	• <i>Dependency</i> • <i>Responsibility</i> • <i>Tension</i> • <i>Influence</i> • <i>Diverse Perspective</i>	Annual GMS and Extraordinary GMS	Minimum once a Year	Company performance achievements, company capital adequacy, company financial condition	• Making annual reports and sustainability reports • Provide other information related to company performance
Karyawan	• <i>Dependency</i> • <i>Responsibility</i> • <i>Tension</i> • <i>Influence</i> • <i>Diverse Perspective</i>	Serikat Karyawan dan Raker (Rapat Kerja)	Minimal 1 kali Setahun	• Kesejahteraan karyawan • Perjanjian kerja • Kinerja karyawan • Rencana kerja	• Monitoring dan evaluasi • Membuat strategi dan action plan • Membuat rencana diklat • Penyesuaian gaji • Pengadaan medical checkup bukan hanya untuk karyawan tapi juga istri/suaminya.
Employee	• <i>Dependency</i> • <i>Responsibility</i> • <i>Tension</i> • <i>Influence</i> • <i>Diverse Perspective</i>	Employees Union and Working Meeting (Working Meeting)	Minimum once a Year	• Employee welfare • Employment agreement • Employee performance • Work plan	• Monitoring and evaluation • Creating a strategy and action plan • Make a training plan • Salary adjustments • Providing medical checkups not only for employees but also for their wives/ husbands.
Masyarakat	• <i>Dependency</i> • <i>Responsibility</i> • <i>Tension</i> • <i>Influence</i> • <i>Diverse Perspective</i>	Pemantauan dan evaluasi program CSR	Minimal 1 kali setahun	Dampak positif dan negatif dari program yang telah dilaksanakan	• Merencanakan program yang lebih strategis bagi masyarakat • Memfasilitasi program

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Basis Penetapan Base of Appointent	Metode Pelibatan Engagement Method	Frekuensi Pertemuan Meeting Frequency	Topik yang penting bagi Pemangku Kepentingan Topics that are important for Stakeholders	Respons dari Perusahaan Response from Company
Public	• <i>Dependency</i> • <i>Responsibility</i> • <i>Tension</i> • <i>Influence</i> • <i>Diverse Perspective</i>	Monitoring and evaluation of the CSR program	Minimum once a Year	Positive impact and negative from programs that have been implemented	• Planning programs that are more strategic for the community • Facilitating the program
Debitur	• <i>Dependency</i> • <i>Responsibility</i> • <i>Influence</i> • <i>Diverse Perspective</i>	Temu Debitur	Minimal 1 kali setahun	Komunikasi produk, Penyampaian Capaian perusahaan, dan target kedepan, menggali kebutuhan dan keluhan Debitur	• Menyediakan wadah untuk masukan dan keluhan Debitur • Memberikan informasi yang diperlukan Debitur
Debtor	• <i>Dependency</i> • <i>Responsibility</i> • <i>Tension</i> • <i>Influence</i> • <i>Diverse Perspective</i>	Debtor Meeting	Minimum once a Year	Product communication, delivery of company achievements, and future targets, explore the needs and complaints of the Debtor	• Provide a platform for Debtor input and complaints • Provide information needed by the Debtor
Mitra Kerja	• <i>Dependency</i> • <i>Responsibility</i> • <i>Influence</i> • <i>Diverse Perspective</i>	Rapat koordinasi, Survey pemasok, Negosiasi pekerjaan	Minimal 1 kali setahun	Kebutuhan-kebutuhan perusahaan dalam 1 tahun	Memfasilitasi pertemuan dengan mitra
Work partners	• <i>Dependency</i> • <i>Responsibility</i> • <i>Influence</i> • <i>Diverse Perspective</i>	Coordination meetings, supplier survey,	Minimum once a Year	Company needs in 1 year	Facilitating meetings with partners
Pemerintah/ Regulator	• <i>Dependency</i> • <i>Responsibility</i> • <i>Tension</i> • <i>Influence</i> • <i>Diverse Perspective</i>	Pertemuan koordinasi rutin,	Minimal 1 kali setahun	- Pemenuhan kepatuhan terhadap perundang-undangan - Kegiatan CSR yang sudah berjalan	• Menampung masukan dari Pemerintah, • Merencanakan program CSR yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat • Mematuhi peraturan Pemerintah
Government/ Regulator	• <i>Dependency</i> • <i>Responsibility</i> • <i>Tension</i> • <i>Influence</i> • <i>Diverse Perspective</i>	Coordination meeting routine,	Minimum once a Year	- Fulfillment of compliance with existing legislation on CSR activities	• Collect input from the Government, • Planning CSR programs in accordance with community needs • Comply with Government regulations

Permasalahan Terhadap Penerapan Keuangan

Sebagaimana diketahui bahwa perekonomian secara global mengalami dampak akibat pandemi Covid-19 dan hal tersebut juga membawa dampak yang cukup signifikan terhadap kinerja Perseroan di tahun 2020, sehingga Perseroan tidak dapat merealisasikan 3 (tiga) hal yang menjadi tujuan utama di tahun 2020 diantaranya :

1. Mempercepat penurunan nilai NPF;
2. Meningkatkan berbagai sumber dana;
3. Percepatan bisnis yang prudent;

Non Performing Financing yang telah mulai membaik diakhir tahun 2019, kembali meningkat di tahun 2020 akibat dampak Covid-19. Perseroan juga tidak memperoleh pendanaan baru sebagaimana yang direncanakan sehingga Perseroan tidak dapat membukukan pembiayaan baru sepanjang tahun 2020. Percepatan pertumbuhan bisnis yang diharapkan juga tidak dapat teralisasi, bahkan akibat dampak Covid-19 Perseroan harus memberikan relaksasi kepada debitur agar arus kas Perseroan dapat terjaga.

Problems with Financial Implementation.

As it is known that the global economy has experienced an impact due to the Covid-19 pandemic and this also has a significant impact on the Company's performance in 2020, so that the Company cannot realize 3 (three) things which are the main goals in 2020, including:

1. Accelerate the decline in the NPF value;
2. Increase various sources of funds;
3. Prudent business acceleration;

Non-Performing Financing, which began to improve at the end of 2019, increased again in 2020 due to the impact of Covid-19. The Company also does not receive new funding as planned so that the Company cannot book new financing throughout 2020. The expected business growth acceleration cannot be realized, even due to the impact of Covid-19, the Company must provide relaxation to debtors so that the Company's cash flow can be maintained.

Audit Internal

Internal Audit

Unit Audit Internal merupakan satuan kerja yang menjalankan fungsi audit internal dan wajib dimiliki setiap perusahaan publik sesuai ketentuan dalam POJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Untuk itu Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal melalui Surat Penetapan Direksi No. 043/IBF/HEGA-SK/X/19 tanggal 14 Oktober 2019.

The Internal Audit Unit is a work unit that carries out the internal audit function and must be owned by any public company in accordance with the provisions in POJK No. 56/POJK.04/2015 dated 23 December 2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Preparation of the Internal Audit Unit Charter. For this reason, the Company has established an Internal Audit Unit through the Board of Directors Decree No. 043/IBF/HEGA-SK/X/19 dated 14 October 2019.

Ahmad Fahri Zein

Warga negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, lahir tahun 1962. Menyelesaikan pendidikan dengan gelar diploma Perbankan dari Universitas Perbanas, Jakarta. Yang bersangkutan telah lulus BSMR 1-2 dan QIA tersertifikasi.

Selama 25 tahun berkarir di Bank CIMB Niaga dengan posisi terakhir sebagai Support Head - Internal Audit Jakarta.

Ahmad Fahri Zein

Indonesian citizen, domiciled in Jakarta, born in 1962. Graduated Banking diploma from Perbanas University, Jakarta. He has passed BSMR 1-2 and certified QIA.

He holds 25-years of career experience at CIMB Niaga Bank with his last position as Support Head - Internal Audit in Jakarta.

Keanggotaan Internal Audit

Internal audit membership

Unit Internal Audit Internal Audit Unit	Jumlah Personel Total Personnel
Kepala Internal Audit Head of Internal Audit	1

KOMPETENSI AUDITOR

Perseroan secara berkesinambungan menyertakan para auditor pada program-program sertifikasi profesi di bidang internal Audit, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Langkah ini merupakan bagian dari strategi untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi auditor.

AUDITOR COMPETENCY

The Company continuously includes auditors in professional certification programs in the internal audit field, both national and international. This step is part of a strategy to increase auditor knowledge and competence.

Sertifikasi Auditor

Auditor Certification

Sertifikasi Certification	Jumlah Total	Nama Name
QIA (Qualified Internal Auditor)	1	Ahmad Fahri Zein
BSMR Level 1	1	Ahmad Fahri Zein
BSMR Level 2	1	Ahmad Fahri Zein

Selama tahun 2020, Perusahaan juga menyertakan para auditor dalam berbagai pelatihan, yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi dan mengembangkan kualitas audit.

In 2020, the Company also participated in auditors in various trainings, intended to improve their competencies and audit quality.

PEDOMAN KERJA

Internal Audit Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan

INTERNAL AUDIT CHARTER

The Company's Internal Audit has the following duties and responsibilities:

1. Prepare and implement an annual Internal Audit plan;
2. Test and evaluate the implementation of internal control and risk management systems in accordance with company

perusahaan;

3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Internal Audit mengacu kepada Piagam Audit, sesuai diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no 56/POJK.04/2014, yang didalamnya memuat :

1. Struktur dan kedudukan Unit Audit Internal;
2. Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal;
3. Wewenang Unit Audit Internal;
4. Kode etik Unit Audit Internal yang mengacu pada kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi Audit Internal yang ada di Indonesia atau kode etik Audit Internal yang lazim berlaku secara internasional;
5. Persyaratan auditor internal dalam Unit Audit Internal;
6. Pertanggungjawaban Unit Audit Internal; dan
7. Larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor internal dan pelaksana dalam Unit Audit Internal dari pelaksanaan kegiatan

policy;

3. Examining and evaluating the efficiency and effectiveness in finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology fields and other activities;
4. Provide suggestions for improvements and objective information about the activities examined at all levels of management;
5. Prepare audit report and submit the report to the President Director and the Board of Commissioners;
6. Monitor, analyze and report the implementation of the improvements that have been suggested;
7. Cooperate with the Audit Committee;
8. Design a program to evaluate the quality of internal audit activities carried out; and
9. Perform special audit, if needed.

In carrying out its duties and responsibilities Internal Audit refers to the Audit Charter, as stipulated in the Financial Services Authority Regulation no 56/POJK.04/2014, which includes:

1. Structure and position of the Internal Audit Unit;
2. Duties and responsibilities of the Internal Audit Unit;
3. Authority of the Internal Audit Unit;
4. The Internal Audit Unit's code of ethics refers to the code of ethics established by the Internal Audit association in Indonesia or the Internal Audit code of ethics that is generally applicable internationally;
5. Internal auditor requirements in the Internal Audit Unit;
6. Accountability of the Internal Audit Unit;
7. Prohibition of duplicate duties and positions of internal auditors and executors in the Internal Audit Unit from carrying out company operational

operasional perusahaan baik di Emiten atau Perusahaan Publik maupun anak perusahaannya.

activities in the Issuer or Public Company or its subsidiaries.

REALISASI KEGIATAN INTERNAL AUDIT

Laporan Pelaksanaan Tugas Unit Audit Internal

Pelaksanaan tugas audit 2020 didasarkan pada rencana audit tahunan yang telah disetujui Direktur Utama Perseroan. Kegiatan audit ini mencakup seluruh kegiatan Perseroan.

Kegiatan audit meliputi :

1. Review bisnis proses yang ada beserta risiko yang terkandung serta penyebabnya untuk memastikan aspek kepatuhan kepada kebijakan, hukum dan peraturan.
2. Review pengamanan dan pemanfaatan aktiva, menilai efisiensi penggunaan sumber daya, dalam hal ini kemampuan untuk meminimalisir kerugian dan pemborosan dalam menghasilkan suatu output.
3. Review pelaksanaan operasional apakah telah sesuai dengan standar operasional prosedur.

Kegiatan audit internal dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur dengan memperhatikan setiap risiko, dikenali dan dikelola secara tepat. Pengendalian internal dilaksanakan secara efektif, segala kebijakan, prosedur dan peraturan ditaati, serta setiap kecurangan telah diantisipasi, diidentifikasi, diinvestigasi dan diatasi.

Hasil Audit Internal yang berupa rekomendasi untuk perbaikan dilaporkan secara periodic kepada pihak manajemen dan Komite Audit. Implementasi atas hasil audit internal ini dimonitor secara berkesinambungan.

REALIZATION OF INTERNAL AUDIT ACTIVITIES

Report on the Implementation of Duties of the Internal Audit Unit

The 2020 audit assignment is based on the annual audit plan that has been approved by the President Director of the Company. This audit activity covers all activities of the Company..

Audit activities include:

1. Review existing business processes and their inherent risks and causes to ensure compliance with policies, laws and regulations.
2. Review the safeguard and utilization of assets, assess the efficiency of resource use, in this case the ability to minimize losses and waste in producing an output.
3. Review the operational implementation whether it is in accordance with standard operating procedures

Internal audit activities are carried out in accordance with standard operating procedures by taking into account every risk, identified and managed appropriately. Internal control is implemented effectively, all policies, procedures and regulations are adhered to, and any fraud has been anticipated, identified, investigated and resolved.

Internal Audit results in the form of recommendations for improvement are reported periodically to the management and the Audit Committee. Implementation of the results of this internal audit is monitored on an ongoing basis.

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Perseroan memastikan seluruh aktivitas keuangan dan operasional dikendalikan secara tepat, dimana :

1. Dalam aspek pengendalian keuangan, Perseroan memastikan agar kegiatan usaha Perseroan dicatat sesuai dengan prinsip akuntansi dan standar akuntansi yang berlaku sehingga laporan keuangan Perseroan dapat dipercaya.
2. Dalam aspek pengendalian operasional, Perseroan memastikan bahwa struktur organisasi telah dibuat sedemikian rupa sehingga terdapat pemisahan tugas dan tanggung jawab yang tegas seperti:
 - a. Perseroan menerapkan aspek three lines of defense, di mana lini pertama adalah manajemen operasional, lini ke dua adalah *risk management* dan fungsi kepatuhan, lini ke tiga adalah audit internal.
 - b. Perseroan menerapkan sistem pengendalian batas persetujuan pembiayaan sesuai dengan jenjang kewenangan Komite Pembiayaan, mulai dari kewenangan yang diberikan kepada Head Department sampai dengan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 - c. Perseroan secara tegas menerapkan sistem dual control dengan prinsip kehati-hatian untuk meminimalisasi risiko kecurangan proses operasional perusahaan dalam satu departemen maupun lintas departemen.

Perseroan akan lebih meningkatkan intensitas program audit untuk mencegah terjadinya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan internal Perseroan dan regulasi yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan. Internal Audit akan

The Company ensures that all financial and operational activities are properly controlled, where:

1. In the aspect of financial control, the Company ensures that the Company's business activities are recorded in accordance with applicable accounting principles and accounting standards so that the Company's financial statements can be trusted.
2. In the aspect of operational control, the Company ensures that the organizational structure has been made in such a way that there is a clear separation of duties and responsibilities, such as:
 - a. The Company implements three lines of defense, where the first line is operational management, the second line is risk management and the compliance function, the third line is internal audit.
 - b. The Company implements a control system for financing approval limits in accordance with the level of authority of the financing committee, starting from the authority given to the Head Department to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
 - c. The Company strictly implements a dual control system with the precautionary principle to minimize the risk of fraud in the company's operational processes within one department or across departments.

The Company will further increase the intensity of the audit program to prevent things that deviate from the Company's internal provisions and regulations stipulated by the Financial Services Authority. Internal Audit will

memeriksa pemenuhan seluruh syarat komite audit baik melalui program pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan secara tiba-tiba (sidak). Divisi manajemen risiko dan Internal Audit Perseroan akan membuat laporan dan memastikan bahwa pelaksanaan manajemen risiko yang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan telah dijalankan dan diterapkan disetiap divisi Perseroan.

Hal-hal yang telah menjadi kekuatan Perseroan dalam proses pengendalian di atas adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian adalah dasar atas komponen pengendalian internal lainnya yang membentuk budaya dan perilaku manusia atas pentingnya kesadaran pengendalian. Perseroan menerapkan Lingkungan Pengendalian yang efektif di mana semua karyawan mengerti mengenai tugas dan tanggung jawab mereka, batas kewenangan mereka, mempunyai pengetahuan yang memadai, dan mengerti serta berkomitmen untuk melakukan aktivitas yang benar dengan cara yang benar.

2. Penilaian Risiko

Perseroan senantiasa mengidentifikasi dan menganalisa risiko-risiko dalam mencapai sasaran usaha yang ditetapkan. Perseroan telah melakukan identifikasi atas risiko-risiko yang mengacu pada risiko yang tercantum dalam Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan dan melakukan penilaian risiko (*self assesment*) secara berkelanjutan untuk mengukur tingkat risiko yang dihadapi Perseroan, di mana hasil serta rekomendasi untuk dilakukannya perbaikan disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

check the compliance of all audit committee requirements through regular inspection programs as well as sudden inspections. The risk management division and the Company's Internal Audit will make reports and ensure that the implementation of risk management in accordance with the Financial Services Authority Regulations has been implemented and implemented in each division of the Company.

The things that have become the strength of the Company in the above control process are as follows:

1. Control Environment

The Control Environment is the basis for other components of internal control that shape human culture and behavior on the importance of control awareness. The Company implements an effective Control Environment where all employees understand their duties and responsibilities, their limits of authority, have adequate knowledge, and understand and are committed to carrying out the right activities in the right way.

2. Risk Assessment

The Company continues to identify and analyze risks in achieving the stated business goals. The Company has identified risks that refer to the risks listed in the Guidelines for the Implementation of Company Risk Management and carried out a risk assessment (self-assessment) on an ongoing basis to measure the level of risk faced by the Company, where the results and recommendations for improvement are submitted to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian merupakan penerapan prinsip-prinsip dan teknik-teknik pengendalian internal yang dituangkan dalam kebijakan, prosedur dan penetapan batas kewenangan untuk memitigasi risiko yang telah diidentifikasi dan diukur. Setiap kebijakan dan prosedur didokumentasikan, dipelihara dan dikiniakan secara berkala dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan bisnis Perseroan.

4. Informasi dan Komunikasi

Perseroan telah membuat sistem informasi dan komunikasi yang baik dalam bentuk communication tree sehingga setiap karyawan Perseroan selalu terhubung untuk mendapatkan setiap informasi yang terpercaya dan tepat waktu.

5. Pemantauan

Manajemen Perseroan melakukan penilaian berkelanjutan dan berkala terhadap kualitas kinerja pengendalian internal untuk menentukan apakah pengendalian telah beroperasi sebagaimana diharapkan dan dimodifikasi melalui Divisi Audit Internal. Kekurangan yang signifikan dan kelemahan material selalu dikomunikasikan kepada Komite Audit sebagai bagian dari setiap pemeriksaan.

EVALUASI ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Efektifitas sistem pengendalian internal Perseroan tercermin dalam tiga proses yaitu:

Proses level Entitas

- Terealisasinya peningkatan hasil pengawasan internal pada level entitas. Unit Audit Internal Perseroan semakin

3. Control Activities

Control activities are the application of internal control principles and techniques that are outlined in policies, procedures and determination of limits of authority to mitigate identified and measured risks. Every policy and procedure is documented, maintained and updated regularly by taking into account changes in the Company's business environment.

4. Information and Communication

The Company has created a good information and communication system in the form of a communication tree so that every employee of the Company is always connected to get any reliable and timely information.

5. Monitoring

The Company's management conducts continuous and periodic assessments of the quality of internal control performance to determine whether the controls are operating as expected and modified through the Internal Audit Division. Significant deficiencies and material weaknesses are always communicated to the Audit Committee as part of each examination.

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

The effectiveness of the Company's internal control system is reflected in three processes, namely:

Entity level processes

- The realization of an increase in the results of internal control at the entity level. The Company's Internal Audit Unit further

meningkatkan mutu pengawasan dan pemeriksaan audit terhadap kinerja pada setiap departemen, cabang dan proyek. Perseroan juga akan langsung menindaklanjuti

- Setiap kritik dan saran yang ditujukan kepada Perseroan, sehingga semua karyawan pada setiap tingkat dapat berkontribusi dengan ikut mengawasi dan melaporkan terjadinya ketidakjujuran pada tiap-tiap wilayah kerja dalam Perseroan. Untuk menjaga komitmen penerapan tata kelola perusahaan, Perseroan telah menerapkan prinsip-prinsip kode etik secara berkesinambungan pada setiap tingkat pekerja.

Proses level Bisnis

Adanya peningkatan cakupan pengawasan internal dalam proses level bisnis telah berdampak pada laporan keuangan, terutama dari segi pengenalan risiko yang kini dapat dipertanggungjawabkan dengan lebih akurat dan *accountable*. Hal ini terlihat jelas dari adanya pengawasan internal pada proses persediaan, pelaporan keuangan, penjualan dan piutang.

Proses level Teknologi Informasi

- Peningkatan jaringan dan sistem keamanan;
- Peningkatan kualitas teknologi informasi

Laporan Keuangan yang disampaikan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut :

improves the quality of supervision and audit checks on the performance of each department, branch and project. The company will also immediately follow up

- Every criticism and suggestion addressed to the Company, so that all employees at every level can contribute by monitoring and reporting the occurrence of dishonesty in each work area within the Company. To maintain its commitment to implementing corporate governance, the Company has applied the principles of a code of ethics on an ongoing basis at every level of employees.

Business level process

The increase in the scope of internal control in business-level processes has had an impact on financial reports, especially in terms of identifying risks which can now be accounted for more accurately and accountably. This can be seen clearly from the existence of internal controls on the inventory process, financial reporting, sales and accounts receivable.

Information Technology level process

- Improved network and security systems;
- Improving the quality of information technology

Conventional Financial Reports submitted by the Company to the Financial Services Authority and Bank Indonesia throughout 2020 are as follows

Nama Laporan Name of Report	Periode Period	Institusi Institution	Tanggal Penyampaian Date of Report
Laporan SIPP	Jan 2020	OJK	07 Feb 2020
Laporan SIPP	Feb 2020	OJK	06 Mar 2020
Laporan SIPP	Mar 2020	OJK	10 Apr 2020
Laporan SIPP	Apr 2020	OJK	11 Mei 2020
Laporan SIPP	Mei 2020	OJK	09 Jun 2020
Laporan SIPP	Jun 2020	OJK	15 Jul 2020
Laporan SIPP	Jul 2020	OJK	10 Aug 2020
Laporan SIPP	Aug 2020	OJK	11 Sept 2020
Laporan SIPP	Sept 2020	OJK	13 Okt 2020
Laporan SIPP	Okt 2020	OJK	12 Nop 2020
Laporan SIPP	Nop 2020	OJK	14 Des 2020
Laporan SIPP	Des 2020	OJK	19 Jan 2021

Akuntan Publik

Public accountant

Dasar hukum penunjukan KAP

Fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan Perseroan dilakukan dengan melaksanakan pemeriksaan Audit Eksternal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Auditor Eksternal yang memeriksa laporan keuangan Perseroan tahun buku 2020 ditetapkan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit. Proses pemilihannya dilakukan sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, Auditor Eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan perseroan.

Kantor Akuntan Publik (KAP) independen bertanggung jawab dalam mengaudit laporan keuangan tahunan Perseroan. Pada tahun 2020, Perusahaan telah menunjuk KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (afiliasi PKF) yang bertanggung jawab untuk melakukan audit tahun buku 2020. Penunjukan KAP tersebut telah mengikuti syarat dan kondisi yang telah ditetapkan Perseroan.

Hasil Pemeriksaan

Hasil Pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh auditor eksternal disampaikan dalam bentuk Opini Laporan Keuangan. Untuk tahun 2020, Laporan Keuangan Perseroan memperoleh Opini disajikan secara Disclaimer (tidak menyatakan pendapat) dengan penjelasan sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen. Hal ini menunjukkan Perseroan telah menyajikan Laporan Keuangan secara akurat dan sesuai dengan standar yang berlaku serta lepas dari salah saji yang material.

KAP Appointment Framework

Independent monitoring function over the Company's financial aspects is carried out by performing External Audit by Public Accounting Firm (KAP). External auditors who audited the Company's financial statements in fiscal year 2019 has been appointed in the Annual GMS based on recommendations from the Board of Commissioners and the Audit Committee. The selection process is carried out in accordance with the applicable procurement mechanism for goods and services. To guarantee the independence and quality of the examination results, the appointed External Auditor may not have a conflict of interest with the Company.

An independent Public Accounting Firm (KAP) is responsible for auditing the Company's annual financial statements. In 2019, the Company appointed KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners (PKF affiliates) responsible for auditing the fiscal year 2019. The appointment of the KAP had followed the terms and conditions as stipulated by the Company.

Audit result

Results of the audit that have been carried out by external auditors are submitted in form of Opinion Financial Statements. For 2019 period, the Company's Financial Statements obtains Unqualified fairly presented in all material respects opinion. This indicates that the Company has presented Financial Statements accurately and in accordance with prevailing standards and is free from material misstatements.

Kepatuhan Perseroan

Corporate Compliance

Industri pembiayaan merupakan lingkungan kecil dari penyediaan jasa keuangan, yang kegiatan usahanya diatur secara ketat oleh beragam ketentuan dari otoritas. Pemenuhan berbagai ketentuan tersebut merupakan komitmen Perseroan sebagai bagian dari pengelolaan risiko terkait kepatuhan dapat berjalan dengan baik. Beberapa ketentuan yang mengatur ketat industri pembiayaan antara lain:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan tanggal 27 Desember 2018;
2. POJK No. 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah tanggal 17 November 2020;
3. POJK No.30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan tanggal 19 November 2014;
4. POJK No.29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan tanggal 22 April 2020, dan
5. POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.

Beberapa poin penting yang harus dipenuhi dan ditaati Perseroan adalah sebagai berikut :

The financing industry is a small environment of providing financial services, whose business activities are strictly regulated by various provisions of the authorities. Fulfillment of these various provisions constitutes the Company's commitment as part of managing risks related to compliance. Some provisions that strictly regulate the financing industry include:

1. Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 35 / POJK.05 / 2018 concerning the Implementation of Business Financing Companies on 27 December 2018;
2. POJK No. 47 / POJK.05 / 2020 concerning Business Licensing and Institutional Financing Companies and Sharia Financing Companies dated 17 November 2020;
3. POJK No.30 / POJK.05 / 2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies dated 19 November 2014;
4. POJK No.29/POJK.05/2020 concerning Amendments to POJK No. 30 / POJK.05 / 2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies dated 22 April 2020, and
5. POJK No.33 / POJK.04 / 2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies dated December 8, 2014.

Some important points that must be fulfilled and adhered to by the Company are as follows:

Keterangan Description	Status Status	Catatan Notes
Modal Sendiri Terhadap Modal Disetor (MSMD) Minimum Own Capital	Tidak Memenuhi Ketentuan Not Fulfilled	Modal sendiri terhadap modal disetor pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar (45,40), masih dibawah syarat minimum yaitu sebesar 50%. The Company's own capital as of December 31, 2020 is (45,40), of the paid-up capital, still above the minimum requirement of own capital, which is 50% of the paid-up capital.

Keterangan Description	Status Status	Catatann Notes	
Pembatasan jabatan untuk Direksi Position Restrictions for Directors	Memenuhi Ketentuan Fulfilled	Berdasarkan dokumen dan data yang ada pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan telah memenuhi syarat pembatasan jabatan untuk Direksi, karena tidak ada Direktur Perseroan yang merangkap jabatan sebagai Direksi pada perusahaan lain atau tidak menjadi anggota Dewan Komisaris di lebih dari 3 (tiga) Perusahaan Pembiayaan lain.	Based on the documents and data available as of December 31, 2020, the Company has met the requirements for limiting positions for the Board of Directors, because no Director of the Company has concurrently serving as a Director in another company or is not a member of the Board of Commissioners in more than 3 (three) other Financing Companies.
		Anggota Direksi juga tidak ada yang melakukan rangkap jabatan sebagai Direksi di lebih dari 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain, baik Perusahaan Pembiayaan atau non Perusahaan Pembiayaan. Serta tidak melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris di lebih dari 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain, baik Perusahaan Pembiayaan atau non Perusahaan Pembiayaan.	There is also no member of the Board of Directors who holds concurrent positions as the Board of Directors in more than 1 (one) other Issuer or Public Company, whether it is a Financing Company or a non-Financing Company. As well as not holding concurrent positions as a member of the Board of Commissioners in more than 3 (three) Issuers or other Public Companies, either a Financing Company or a non-Financing Company.
Pembatasan jabatan untuk Dewan Komisaris Position Restrictions for Commissioners	Memenuhi Ketentuan Fulfilled	Berdasarkan dokumen dan data yang ada pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan telah memenuhi syarat pembatasan jabatan untuk Dewan Komisaris, karena dari seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak ada yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris di lebih dari 3 (tiga) Perusahaan Pembiayaan lain dan/atau sebagai anggota Dewan Komisaris di lebih dari 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.	Based on documents and data available as of December 31, 2020, the Company has met the requirements for limiting positions for the Board of Commissioners, because none of the members of the Board of Commissioners of the Company have concurrent positions as members of the Board of Commissioners in more than 3 (three) other Financing Companies and/or as a member of the Board of Commissioners in more than 2 (two) other Issuers or Public Companies.
Jumlah minimum piutang pembiayaan Minimum Amount of Financing Receivables	Memenuhi Ketentuan Fulfilled	Jumlah piutang pembiayaan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar 57,9% dari jumlah aset. Rasio tersebut berada di atas syarat minimum jumlah piutang pembiayaan yang harus dimiliki, yaitu sekurang-kurangnya 40% dari jumlah aset.	The Company's total financing receivables as of December 31, 2020 amounted to 62% of total assets. This ratio is above the minimum requirement for financing receivables, which is at least 40% of total assets.
Jumlah pinjaman dibanding modal sendiri Loan Amount compared to Own Capital	Memenuhi Ketentuan Fulfilled	Jumlah pinjaman yang dimiliki Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar (3,14) kali dari ekuitas atau jauh di bawah ketentuan maksimum sebesar 10 kali, baik untuk pinjaman luar negeri maupun dalam negeri.	The amount of loans the Company had as of December 31, 2020 was 1.58 times the equity or far below the maximum requirement of 10 times, both for foreign and domestic loans.
Ekuitas Minimum Minimum Equity	Tidak Memenuhi Ketentuan Not Fulfilled	Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp322 milyar), masih dibawah ketentuan minimum sebesar Rp 100 milyar untuk perusahaan pembiayaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas.	The paid-up capital of the Company as of December 31, 2019 is IDR 710,055,132,500, in accordance with the minimum paid-up capital requirement of IDR 100 billion for a finance company in the form of a limited liability company.

Perkaraan Penting

Important Cases

Sepanjang tahun 2020, Perseroan menghadapi gugatan atau kasus hukum di pengadilan, baik pidana maupun perdata. Berikut ini adalah beberapa Perkara Penting yang dihadapi oleh Perseroan di tahun 2020 :

Throughout 2020, the Company involved with both criminal and civil lawsuits or legal cases in the Court. Some of the Important Cases involving the Company in 2020 are as follows:

Permasalahan Hukum Legal Cases	Jumlah Kasus Total Cases	
	Perdata Civil	Pidana Criminal
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap Has obtained a decision that has permanent legal force		
a. PT. Petrona Mining Contractor	1	-
b. PT. Trimega Utama Corporindo	-	1
Dalam proese penyelesaian di Pengadilan dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk kasus Perdata In the settlement process in Courts and Alternative Dispute Resolution Institutions for Civil cases		
a. PT. Mikgro Metal Perdana	-	1
b. PT. Malacca Elab	1	
TOTAL	2	2

1
Ikhtisar 2020
2020 Highlights2
Laporan Manajemen
Management Report3
Profil Perusahaan
Company Profile4
Sumber Daya
Manusia
Human Capital5
Analisa & Pembahasan
Management
Discussion & Analysis6
Tata Kelola
Perusahaan
Good Corporate
Governance7
Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Corporate Social
Responsibility

Manajemen Risiko

Risk Management

DASAR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Risiko dalam konteks Perseroan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pertumbuhan, pendapatan dan operasional Perusahaan. Manajemen risiko dirancang untuk mengidentifikasi kejadian potensial (risiko) yang bisa jadi dapat mempengaruhi Perseroan untuk kemudian dikelola sedemikian rupa agar sesuai dengan *risk appetite* (toleransi terhadap risiko), untuk menyediakan keyakinan yang memadai dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan.

Dasar penerapan manajemen risiko Perseroan mengacu pada POJK 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.05/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

Dalam usaha mencapai visi Perseroan, Perseroan menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko sebagai berikut:

1. Manajemen risiko merupakan bagian integral dari praktik manajemen, sistem organisasi, dan GCG; sehingga dapat meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan.

RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION FRAMEWORK

Risk in the context of the Company is a potential event, both predictable and unanticipated that has a negative impact on the Company's growth, revenues and operations. Risk management is designed to identify potential events (risks) that may affect the Company and then be managed in such a way as to be in accordance with risk appetite (tolerance for risk), to provide adequate confidence in the achievement of corporate goals.

The basis for the implementation of the Company's risk management refers to POJK 1/POJK.05/2015 concerning the Implementation of Risk Management for Non-Bank Financial Services Institutions and Financial Services Authority Circular Letter Number 10/SEOJK.05/2016 concerning Guidelines for the Implementation of Risk Management and Reports on the Results of Self-Assessment of Implementation Risk Management for Non-Bank Financial Services Institutions

RISK MANAGEMENT POLICY

As an effort to achieve the Company's vision, the Company has established the following Risk Management Policies:

1. Risk management is an integral part of management practices, organizational systems, and GCG; so that it can improve quality and accountability in the decision-making process.

2. Menerapkan manajemen risiko berdasarkan standar yang berlaku, struktur organisasi, dan mandat yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan.
3. Menerapkan manajemen untuk mendukung GCG.
4. Menyusun rencana asesmen risiko yang terintegrasi dengan RBT pada setiap tahun anggaran serta membuat laporan hasil penanganan risiko secara periodik. Melakukan inovasi, peninjauan, dan peningkatan budaya risiko secara berkesinambungan dengan fokus pada peningkatan sistem, infrastruktur, dan kompetensi SDM.
5. Melakukan evaluasi secara periodik terhadap efektifitas kebijakan manajemen risiko.

2. Implement risk management based on applicable standards, organizational structure, and appropriate mandates to avoid conflicts of interest.
3. Implement management to support GCG.
4. Prepare a risk assessment plan that is integrated with RBT in each fiscal year and make periodic reports on the results of risk management. Continuously innovating, reviewing and enhancing the risk culture with a focus on improving HR systems, infrastructure and competencies.
5. Conduct periodic evaluations of the effectiveness of risk management policies.

STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT STRUCTURE



SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT CERTIFICATION

Sertifikasi Manajemen Risiko

Risk Management Certification

Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certification
1. Mulyadi	1. Risk & Compliance Director	Sertifikasi Manajemen Risiko
2. Yunita Rivianti Riyadi	2. Head of Risk Management & Compliance	
3. Yati Wiryandini	3. Credit Risk & Admin Head	
4. Lalu Didi Winardi	4. Chief SAM, Legal & IT Officer	

PROFIL DAN MITIGASI RISIKO

Untuk meminimalisasi risiko atas pemberian dan pengelolaan fasilitas pembiayaan, dalam setiap kegiatan operasionalnya Perseroan mengacu kepada Pedoman Penerapan Manajemen Risiko yang mencakup :

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit Risiko
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko
4. Sistem informasi Manajemen Risiko dan
5. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Upaya mitigasi risiko yang dilakukan Perseroan mengacu pada 7 (tujuh) risiko sesuai POJK 1/ POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.05/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank yaitu :

1. Risiko Pembiayaan

Perseroan menghadapi risiko pembiayaan yaitu ketidakmampuan debitur/nasabah

RISK PROFILE AND MITIGATION

To minimize the risk of granting and managing financing facilities, in each of its operational activities the Company refers to the Company's Risk Management Implementation Guidelines which include:

1. Active supervision of the Board of Directors and Board of Commissioners
2. Adequate policies, procedures and risk limits
3. Adequate identification, measurement, monitoring and risk control processes
4. Risk Management information systems and
5. A comprehensive internal control system.

Risk mitigation efforts carried out by the Company refer to 7 (seven) risks in accordance with POJK 1/ POJK.05/2015 concerning the Application of Risk Management for Non-Bank Financial Services Institutions and Financial Services Authority Circular Letter Number 10/SEOJK.05/2016 concerning Risk Management Implementation Guidelines and Self-Assessment Results Report on Risk Management Implementation for Non- Bank Financial Services Institutions, namely:

1. Financing risk

Company faces financing risks, namely the inability of the debtor/customer to repay

untuk membayar kembali baik sebagian maupun seluruh fasilitas pembiayaan yang diberikan, baik pokok pinjaman maupun bunganya. Risiko ini dapat timbul karena berbagai hal, baik eksternal maupun internal.

Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi antara lain adanya perubahan kondisi atau iklim usaha debitur yang menyebabkan menurunnya kinerja operasional atau keuangan debitur yang pada akhirnya akan berdampak negatif pada kemampuan debitur menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, termasuk kepada Perseroan. Dari sisi internal, risiko ini dapat timbul akibat lemahnya sistem pengelolaan kredit dan manajemen piutang tidak dikelola secara hati-hati sehingga meningkatkan risiko ketidaklancaran pembayaran debitur yang dapat mengganggu pendapatan dan kinerja Perseroan.

Salah satu faktor eksternal yang mengakibatkan turunnya kualitas tagihan Perseroan yang diakibatkan oleh gagal bayar dari para debitur adalah akibat melemahnya harga komoditas dalam beberapa tahun terakhir, khususnya batubara yang telah melemah sejak awal tahun 2011 hingga pertengahan kuartal kedua 2016. Mengingat sebagian besar dari pembiayaan yang disalurkan jatuh pada sektor pertambangan, memburuknya sektor tersebut akan menyebabkan banyak debitur Perseroan mengalami kerugian dan tidak mampu menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, termasuk kepada Perseroan.

Ketidaklancaran atau kegagalan pembayaran angsuran pokok maupun bunga dialami dalam jumlah yang cukup besar dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

either partially or all the financing facilities provided, both the financing principal and the interest. This risk can arise due to various things, both external and internal.

External factors that can affect include changes in the condition or climate of the debtor's business which causes a decrease in the operational or financial performance of the debtor which will ultimately have a negative impact on the debtor's ability to settle his/ her obligations, including to the Company. Internally, this risk can arise due to the weakness of the credit management system and the management of accounts receivable that is not managed carefully, thereby increasing the risk of debtor payment defaults that can disrupt the Company's revenue and performance.

One of the external factors that resulted in a decline in the quality of the Company's bills due to default from debtors was the result of weakening commodity prices in recent years, particularly coal which had weakened since the beginning of 2011 until the middle of the second quarter of 2016. Considering a large portion of the channeled financing falling in the mining sector, the deterioration of the sector will cause many of the Company's debtors to suffer losses and not be able to complete their obligations, including to the Company.

The inability or failure of payment of principal and interest installments experienced in large enough amounts can have a negative impact on the sustainability of the Company's business.

2. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang dihadapi Perseroan sehubungan dengan sistem operasional dan prosedur maupun kontrol yang tidak menunjang kebutuhan Perseroan atau tidak dilaksanakannya sebagian atau seluruh sistem operasional dan prosedur. Risiko ini berpengaruh terhadap penurunan kinerja operasi dalam memproses transaksi usaha yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi, kualitas pelayanan kepada nasabah atau konsumen dan mempengaruhi kualitas pembiayaan Perseroan.

3. Risiko Strategi

Untuk percepatan pertumbuhan bisnis, Perseroan akan menjalankan strategi bisnisnya secara lebih prudent, dengan melakukan sinergi grup dan intensive relationship dengan customer & dealer, memperbaiki Service Level Agreement dan meningkatkan pengetahuan seluruh SDM terkait analisa pembiayaan dan risiko.

Sektor usaha pembiayaan alat berat, mesin dan transportasi masih memiliki banyak ruang untuk berkembang mengingat prospek dari industri alat berat, mesin dan transportasi ini di Indonesia masih cukup menjanjikan dan juga sektor pembiayaan merupakan sektor yang cukup baru bila dibandingkan dengan sektor keuangan non-bank lainnya.

Pangsa pasar besar serta potensi pertumbuhan yang menarik dapat mengalihkan fokus perusahaan pembiayaan lain ke sektor usaha pembiayaan alat berat, mesin dan transportasi ini. Hal ini dapat meningkatkan persaingan usaha antar perusahaan pembiayaan yang pada akhirnya dapat berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang mengfokuskan diri pada pembiayaan

2. Operational risk

Operational risk is the risk faced by the Company in relation to operational and procedural systems and controls that do not support the needs of the Company or do not carry out part or all of the operational systems and procedures. This risk affects the decline in operating performance in processing business transactions which results in disruption of the smooth operation, quality of service to customers or consumers and affects the quality of the Company's financing.

3. Strategy risk

To accelerate business growth, the Company will carry out its business strategy more prudently, by conducting group synergy and intensive relationship with customers and dealers, improving Service Level Agreement and increasing knowledge of all HR related to the analysis of financing and risk.

The heavy equipment, machinery and transportation business sector still has plenty of room to develop considering the prospects of the heavy equipment, machinery and transportation industry in Indonesia are still quite promising and also the financing sector is a fairly new sector when compared to other non-bank financial sectors.

The large market share and attractive growth potential can shift the focus of other finance companies to the heavy equipment, machinery and transportation business sector. This can increase business competition among finance companies which ultimately can negatively affect the sustainability of the Company's business which focuses on financing heavy equipment to support the Group's main business.

alat-alat berat guna mendukung bisnis utama grup Perseroan.

4. Risiko Aset dan Liabilitas

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dari arus kas masa yang akan datang atas margin pembiayaan yang terjadi karena adanya kenaikan suku bunga pendanaan, sedangkan suku bunga pembiayaan tetap. Sebagian besar bisnis perseroan bergerak dalam bidang pembiayaan sewa guna usaha dengan suku bunga tetap, jika biaya sumber dana (cost of fund) yang diperoleh Perseroan meningkat, hal ini akan dapat menurunkan tingkat keuntungan atau bahkan menyebabkan kerugian (*negative margin*) pada usaha Perseroan.

5. Risiko Kepengurusan

Kegiatan usaha Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualifikasi tinggi dalam industri pembiayaan. Secara khusus, Perseroan sangat mengandalkan keahlian manajemen senior Perseroan dalam industri pembiayaan. Ketidakmampuan manajemen senior dalam mempertahankan para tim utama seperti para manajer, leasing officer, dan tenaga terampil lainnya dapat mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan atau prospek Perseroan.

6. Risiko Tata Kelola

Dalam setiap aspek bisnisnya, Perseroan menerapkan lima prinsip tata kelola yang meliputi transparansi, akuntabilitas, independensi, responsibilitas dan kewajaran/kesetaraan. Ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung terhadap Perseroan dapat menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

4. Risk of Assets and Liabilities

Interest rate risk is the risk of future cash flows on the financing margin that occurs due to an increase in funding interest rates, while the fixed interest rate is fixed. Most of the company's business is engaged in leasing financing with a fixed interest rate, if the cost of funds obtained by the Company increases, this will reduce the level of profits or even cause a negative margin on the Company's business.

5. Management risk

Company's business activities depend on the Company's ability to attract and retain highly qualified workforce in the financing industry. In particular, the Company relies heavily on the Company's senior management expertise in the financing industry. The inability of senior management to retain key teams such as managers, leasing officers, and other skilled personnel can affect business activities, cash flows, operating results, financial conditions or prospects of the Company.

6. Governance Risk

Every aspect of its business, the Company applies five principles of governance which include transparency, accountability, independence, responsibility and fairness/equality. Inaccuracy of management style, control environment and behavior of each party involved directly or indirectly with the Company can cause failure in the implementation of good corporate governance (GCG).

Untuk menunjang kinerja kerja Direksi dan Dewan Komisaris, Perseroan telah memiliki komite penunjang yaitu : Komite Audit dan Komite Nominasi & Remunerasi.

To support the work performance of the Board of Directors and the Board of Commissioners, the Company has supporting committees, namely: the Financing Committee, the Audit Committee and the Nomination & Remuneration Committee.

7. Risiko Dukungan Dana

Pertumbuhan Perseroan sangat tergantung pada tersedianya pendanaan yang berasal dari fasilitas perbankan serta sumber dana lainnya untuk mendukung kegiatan pembiayaan yang dilakukan Perseroan. Oleh karena itu, ketidakmampuan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang memadai akan berdampak pada menurunnya pertumbuhan Perseroan.

Risiko lain yang terkait dengan pendanaan dan likuiditas adalah ketidakmampuan Perseroan untuk mendapatkan dana dengan jangka waktu yang sesuai dengan aktivitas pembiayaan yang dijalankan Perseroan sehingga hal ini dapat mengakibatkan terganggunya arus kas Perseroan. Demikian pula dengan ketidakmampuan untuk mengembalikan pinjaman pada tanggal jatuh temponya akan berdampak kepada reputasi Perseroan dimata kreditur dan mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk mendapatkan sumber pendanaan baru dikemudian hari.

7. Risk of financial support

The Company's growth is highly dependent on the availability of funding originating from banking facilities and other funding sources to support the financing activities carried out by the Company. Therefore, the inability to obtain adequate funding sources will have an impact on the Company's declining growth.

Another risk associated with funding and liquidity is the inability of the Company to obtain funds with a period that is in accordance with the financing activities carried out by the Company so that this can result in disruption of the Company's cash flows. Similarly, the inability to repay loans at the maturity date will have an impact on the Company's reputation in the eyes of creditors and affects the Company's ability to obtain new funding sources in the future.

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi berperan aktif pada proses manajemen risiko dalam rangka memitigasi risiko Perseroan meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, dan kecukupan sistem informasi manajemen serta kecukupan sistem pengendalian internal. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan melalui rapat Dewan Komisaris dan Direksi.

BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

The Boards of Commissioners and Directors play an active role in the risk management process in order to mitigate the Company's risks including risk governance, risk management framework, risk management process, and adequacy of management information systems as well as adequacy of internal control systems. Active supervision by the Board of Commissioners and the Board of Directors is carried out through meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

PRINSIP PENCEGAHAN

Dalam mengurangi dampak atau menghindari risiko yang terjadi selama pengoperasian Perseroan, Perseroan telah memfasilitasi proses manajemen risiko pada setiap unit kerja.

Proses tersebut meliputi identifikasi, pengukuran, pemetaan sampai dengan pengendalian risiko yang dilakukan melalui sistem konsultasi dan evaluasi, sehingga setiap unit kerja dapat mencegah atau mengendalikan dampak risiko yang dihadapi.

EVALUASI ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Manajemen risiko telah berkontribusi positif dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan penguatan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di Perseroan. Sistem manajemen risiko yang diterapkan Perseroan mampu meminimalisir dan/atau menekan tingkat dampak serta kemungkinan terjadinya risiko. Hal ini terlihat dari efektivitas atas kualitas, kuantitas, dan waktu penyelesaian suatu rencana mitigasi risiko yang telah ditetapkan. Melalui sistem manajemen risiko ini dapat mendukung Perseroan dalam mencapai pertumbuhan pendapatan yang signifikan hingga mencapai target yang telah ditetapkan.

PRECAUTIONARY PRINCIPLES

In reducing the impact or avoiding risks that occur during the Company's operations, the Company has facilitated the risk management process in each work unit.

This process includes identification, measurement, mapping to risk control which is carried out through a consultation and evaluation system, so that each work unit can prevent or control the impact of the risks it faces.

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM

Risk management has contributed positively to the planning, decision-making and strengthening of the implementation of *Good Corporate Governance* (GCG) in the Company. The risk management system implemented by the Company is able to minimize and/or reduce the level of impact and the possibility of risk occurring. This can be seen from the effectiveness of the quality, quantity and time of completion of a predetermined risk mitigation plan. Through this risk management system, it can support the Company in achieving significant revenue growth until it reaches the predetermined target.

Keterbukaan Informasi

Information Disclosure

Otoritas mengatur melalui POJK no. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas informasi atau fakta material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, yang mengikat seluruh perusahaan publik termasuk Perseroan. Wujud kepatuhan atas ketentuan tersebut dilaksanakan melalui penyampaian laporan informasi atau fakta material kepada Otoritas Jasa Keuangan dan melakukan pengumuman Informasi atau fakta material kepada masyarakat melalui :

- Situs Web IBF dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
- Surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional
- Laporan Tahunan
- Situs online idxnet dan speojk

Informasi atau fakta material yang disampaikan tersebut senantiasa disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 - POJK no. 31/POJK.04/2015.

Authority regulates through POJK no. 31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of material information or facts by Issuers or Public Companies, which binds all public companies including the Company. Compliance with these provisions is carried out by submitting reports of material information or facts to the Financial Services Authority and announcing material information or facts to the public through:

- IBF Website in Indonesian and English
- Indonesian language daily newspaper with national circulation
- Annual report
- Idxnet and speojk online sites

The information or material facts submitted are always adjusted to the provisions contained in Article 6 - POJK no. 31/POJK.04/2015.

No	Rincian Description	Nomor Surat Letter number	Tanggal Submit Date
1	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek bulan Desember 2019	001/IBFN-IDX/I/2020	13 Jan 2020
2	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek bulan Januari 2020	002/IBFN-IDX/II/2020	12 Feb 2020
3	Keterbukaan Informasi Penjelasan atas Implikasi Berlaku Efektifnya PSAK 71, 72, dan 73 tahun 2020	003/IBFN-IDX/III/2020	6 Mar 2020
4	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek bulan Februari 2020	004/IBFN-IDX/III/2020	10 Mar 2020
5	Keterbukaan Informasi atas Penjualan Saham PT Northcliff Indonesia	005/IBFN-IDX/III/2020	10 Mar 2020
6	Keterbukaan Informasi Pelaksanaan Bekerja dari Rumah (Work From Home)	007/IBFN-IDX/III/2020	16 Mar 2020
7	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek bulan Maret 2020	009/IBFN-IDX/IV/2020	10 Apr 2020

No	Rincian Description	Nomor Surat Letter number	Tanggal Submit Date
8	Keterbukaan Informasi atas Meninggal Dunia nya Bapak Willy Rumondor selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan	010/IBFN-IDX/IV/2020	20 Apr 2020
9	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek bulan April 2020	011/IBFN-IDX/V/2020	08 May 2020
10	Keterbukaan Informasi atas Dampak Pandemi Covid-19	013/IBFN-IDX/V/2020	29 May 2020
11	Keterbukaan Informasi atas Penurunan Aset pada Laporan Keuangan Tahunan Audited Perseroan	014/IBFN-IDX/VI/2020	02 Jun 2020
12	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Tahunan	015/IBFN-IDX/VI/2020	03 Jun 2020
13	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek bulan Mei 2020	016/IBFN-IDX/VI/2020	09 Jun 2020
14	Keterbukaan Informasi atas Dampak Pandemi Covid-19	017/IBFN-IDX/VI/2020	17 Jun 2020
15	Penyampaian Annual Report tahun 2019	018/IBFN-IDX/VI/2020	30 Jun 2020
16	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek bulan Juni 2020	019/IBFN-IDX/VII/2020	10 Jul 2020
17	Keterbukaan Informasi atas Dampak Pandemi Covid-19	020/IBFN-IDX/VII/2020	15 Jul 2020
18	Penyampaian Mata Acara RUPS Tahunan	021/IBFN-IDX/VII/2020	17 Jul 2020
19	Pengumuman RUPS Tahunan	022/IBFN-IDX/VII/2020	20 Jul 2020
20	Penyampaian Laporan Keuangan periode 30 Juni 2020	023/IBFN-IDX/VIII/2020	03 Aug 2020
21	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan periode 30 Juni 2020	025/IBFN-IDX/VIII/2020	03 Aug 2020
22	Panggilan RUPS Tahunan	025/IBFN-IDX/VIII/2020	04 Aug 2020
23	Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS	027/IBFN-IDX/VIII/2020	05 Aug 2020
24	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek bulan Juli 2020	028/IBFN-IDX/VIII/2020	12 Aug 2020
25	Keterbukaan Informasi atas Dampak Pandemi Covid-19	029/IBFN-IDX/VIII/2020	14 Aug 2020
26	Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	030/IBFN-IDX/VIII/2020	31 Aug 2020
27	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek bulan Agustus 2020	031/IBFN-IDX/IX/2020	10 Sep 2020
28	Keterbukaan Informasi atas Dampak Pandemi Covid-19	032/IBFN-IDX/IX/2020	14 Sep 2020
29	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek bulan September 2020	033/IBFN-IDX/X/2020	08 Oct 2020

No	Rincian Description	Nomor Surat Letter number	Tanggal Submit Date
30	Keterbukaan Informasi atas Dampak Pandemi Covid-19	034/IBFN-IDX/X/2020	15 Oct 2020
31	Keterbukaan Informasi atas Dampak Pandemi Covid-19 (Koreksi)	035/IBFN-IDX/X/2020	16 Oct 2020
32	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek bulan Oktober 2020	036/IBFN-IDX/XI/2020	12 Nov 2020
33	Keterbukaan Informasi atas Relaksasi dan Penyesuaian atas Perjanjian Kredit	038/IBFN-IDX/XI/2020	02 Dec 2020
34	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek bulan November 2020	039/IBFN-IDX/XII/2020	11 Dec 2020
35	Rencana Penyelenggaraan Public Expose Tahunan	040/IBFN-IDX/XII/2020	11 Dec 2020
36	Penyampaian Materi Publix Expose Tahunan	041/IBFN-IDX/XII/2020	18 Dec 2020
37	Laporan Hasil Public Expose Tahunan	042/IBFN-IDX/XII/2020	28 Dec 2020

Website

Perseroan menyediakan layanan akses informasi dan data perusahaan melalui *website* <http://www.ibf.co.id>. *Website* tersebut menyediakan berbagai informasi, antara lain mengenai profil Perseroan, visi dan misi, model bisnis, informasi keuangan, berita terbaru, tanggung jawab sosial perusahaan, keterbukaan informasi, dan lain-lain.

Siaran Pers

Perseroan secara proaktif menyebarluaskan berita-berita terbaru terkait Perseroan dalam bentuk *News Release* kepada investor, analis, dan media pers. Berita tersebut berisi analisis rinci hasil keuangan dan pengungkapan berita terbaru mengenai Perseroan yang signifikan. *News Release* juga menyediakan nomor kontak serta alamat *email* yang dapat dihubungi untuk komunikasi atau pembahasan secara rinci selanjutnya mengenai Perseroan.

Website

The Company provides access to information and company data through the website <http://www.ibf.co.id>. The website provides various information, including regarding the Company's profile, vision and mission, business models, financial information, the latest news, corporate social responsibility, information disclosure, and others.

Press Conference

The Company proactively disseminates the latest news related to the Company in the form of News Release to investors, analysts, and press media. The news contains a detailed analysis of financial results and the disclosure of the latest news about the Company that is significant. News Release also provides contact numbers and e-mail addresses that can be contacted for further detailed communication or discussion regarding the Company.



Paparan Publik

Pelaksanaan prinsip keterbukaan juga dijalankan Perseroan agar seluruh pemangku kepentingan memiliki informasi yang seimbang. Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I.E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, salah satunya mengatur pelaksanaan Paparan Publik yang diselenggarakan pada tanggal 22 Desember 2020. Manajemen dalam forum ini menyampaikan visi, misi, potensi, tantangan serta strategi bisnis yang dilakukan Perseroan.

Public Expose

The implementation of the transparency principle is also carried out by the Company so that all stakeholders have balanced information. Indonesia Stock Exchange Regulation Number I.E concerning Information Delivery Obligations, one of which regulates the implementation of the Public Expose held on December 22, 2020. The Management in this forum delivered the Company's vision, mission, potential, challenges and business strategies

Kode Etik Perusahaan

Corporate Code of Ethics

Dalam mengembangkan konsep tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan telah merumuskan berbagai kebijakan yang menyangkut etika perusahaan. Perseroan mengupayakan penerapan standar etika terbaik dalam menjalankan segenap aktivitas bisnis sesuai dengan visi, misi, dan budaya yang dimiliki melalui implementasi konsep kode etik perusahaan.

Komitmen Perseroan untuk menerapkan Kode Etik Perusahaan yang mengatur perilaku perusahaan dan individu secara komprehensif sangat tinggi.

Prinsip prinsip GCG yang digunakan sebagai acuan dalam membangun mengembangkan Kode Etik Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Prinsip Transparansi diterapkan dengan cara memastikan setiap langkah dan proses penetapan kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran Perusahaan dilakukan secara transparan dan dapat dikaji.
- Prinsip Kemandirian diterapkan dengan cara Perusahaan melakukan kegiatannya secara independen sesuai dengan profesionalisme dan kode etik yang ada, tanpa dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.
- Prinsip Akuntabilitas diterapkan dengan cara menetapkan secara jelas tanggung jawab dan kewenangan Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran Perusahaan dalam struktur organisasi dan uraian jabatan masing-masing.
- Prinsip Pertanggungjawaban diterapkan dengan cara menyesuaikan pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

In developing the good corporate governance concept, the Company has formulated various policies concerning corporate ethics. The Company strives to apply best ethical standards in carrying out all business activities in accordance with its vision, mission, and culture through the implementation of the concept of the company's code of ethics.

The Company has a very high commitment to implement the Code of Ethics that governs corporate and individual behavior comprehensively .

The GCG principles used as a reference in developing the Company's Code of Ethics are as follows:

- Transparency Principle is applied by ensuring that every step and process of determining policies and decisions taken by the Board of Commissioners, Directors and all levels of the Company is carried out transparently and can be reviewed.
- Independency Principle is applied by the way the Company conducts its activities independently in accordance with the existing professionalism and code of conduct, without being able to be influenced by any party.
- Accountability Principle is applied by clearly defining the responsibilities and authorities of the Board of Commissioners, Directors and all levels of the Company in the organizational structure and description of their respective positions.
- Responsibility Principle is applied by adjusting the Company's management to the applicable laws and regulations and sound corporate principles.
- Fairness Principle is applied by giving a

- Prinsip Kewajaran diterapkan dengan cara memberikan rasa keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Isi Kode Etik

Kode etik Perseroan merupakan satu himpunan komitmen yang terdiri dari etika bisnis perusahaan dan etika kerja karyawan yang disusun untuk membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian tingkah laku guna mencapai hasil yang sesuai dengan budaya perusahaan. Etika bisnis perusahaan dan etika perilaku Karyawan merupakan sekumpulan norma, nilai, serta tindak perbuatan yang diyakini oleh jajaran perusahaan sebagai suatu standar perilaku yang ideal bagi perusahaan.

Selanjutnya, dengan menerapkan Kode Etik Perusahaan ini Perseroan yakin mendapatkan manfaat dalam jangka panjang, yaitu berupa:

1. Karyawan menikmati lingkungan kerja yang jujur, beretika dan terbuka sehingga meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan secara menyeluruh.
2. Perusahaan akan menikmati reputasi yang baik, perlindungan atas tuntutan hukum yang mungkin terjadi dan pada akhirnya terwujud kemakmuran dan keberhasilan usaha yang berkelanjutan.
3. Masyarakat secara umum akan menikmati hubungan yang baik dengan Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat

Kode Etik Perusahaan menjabarkan Pedoman Perilaku Perusahaan, yang mengacu pada nilai inti kelompok usaha INTRACO PENTA: "CINTA" sebagai berikut:

sense of fairness and equality in fulfilling the rights of stakeholders arising based on agreements and regulations and legislation in force.

Code of Ethics Contents

Code of conducts is a set of commitments consisting of company business ethics and employee work ethics that are structured to form, regulate and conduct behavior adjustments in order to achieve results that are in line with company culture. The company's business ethics and employee ethics are a set of norms, values, and actions that are believed by the ranks of the company as an ideal standard of behavior for the company.

Furthermore, by applying this Company Code of Conduct, the Company believes that it will benefit in the long term, in the form of:

1. Employees enjoy a work environment that is honest, ethical and open so as to increase employee productivity and overall welfare.
2. The company will enjoy a good reputation, protect against legal claims that may occur and ultimately achieve prosperity and sustainable business success.
3. The community in general will enjoy a good relationship with the Company, which is expected to improve the social and economic welfare of the society.

The Company's Code of Ethics sets out the Company's Code of Conduct, which refers to the core values of the INTRACO PENTA business group: "CINTA" as follows:

Collaborative

Kemampuan mengidentifikasi peluang-peluang dan mengambil tindakan untuk membangun hubungan yang positif dan strategis antar individu, kelompok, departemen, unit atau organisasi untuk membantu mencapai tujuan bisnis.

Innovative

Kemampuan untuk melakukan perbaikan, pengembangan terus menerus dan menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata dengan tujuan memperbaiki proses bisnis untuk dapat menghasilkan kinerja yang maksimal.

Network

Kemampuan untuk mengembangkan hubungan luas yang bermanfaat dengan berbagai kalangan orang dari berbagai institusi internal dan eksternal baik yang berhubungan ataupun tidak dengan bidang pekerjaan.

Trustworthy

Kemampuan untuk bisa diandalkan, dipercaya dan membangun hubungan yang hangat dan saling menguntungkan di lingkungan kerja.

Assurance

Kemampuan dalam memberikan keyakinan dan kepastian terhadap tindakan dalam aktivitas kerja dilakukan sesuai dengan standar (waktu, kualitas dan biaya) yang ditetapkan.

PEMBERLAKUAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK

Penegakan kepatuhan di lingkungan Perseroan dalam rangka membentuk, membina dan mengarahkan setiap insan kepada perilaku yang baik. Perseroan telah menyusun kode etik Perusahaan dan Peraturan Perusahaan dimana pada pelaksanaannya senantiasa dipantau dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Jenis Pelanggaran yang dilakukan,

Collaborative

The ability to identify opportunities and take action to build positive and strategic relationships between individuals, groups, departments, units or organizations to help achieve business goals.

Innovative

The ability to make improvements, continuous development and create something new, both in the form of ideas and real work with the aim of improving business processes to be able to produce maximum performance.

Network

The ability to develop wide-ranging useful relationships with a variety of people from various internal and external institutions, whether or not related to the field of work.

Trustworthy

The ability to be reliable, trusted and build a warm and mutually beneficial relationship in the work environment

Assurance

The ability to provide confidence and certainty of actions in work activities carried out in accordance with the specified standards (time, quality and cost)..

ENFORCEMENT AND ENFORCEMENT OF THE CODE OF ETHICS

Enforcement of compliance within the Company in the context of forming, fostering and directing every person to good behavior. The Company has compiled a Company code of ethics and Company Regulations in which its implementation is always monitored and can be subject to sanctions according to the

dengan cara:

1. Memberikan teguran secara lisan,
2. Memberikan teguran dan peringatan secara tertulis,
3. Penurunan pendapatan pokok/pembebasan dari jabatan,
4. Pemutusan Hubungan Kerja, dan/atau
5. Memberikan sanksi administrasi dan hukum.

Penerapan dan penegakan kode etik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan secara konsisten oleh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan sebagai budaya kerja dalam aktivitas operasional sehari-hari. Pelanggaran terhadap kode etik adalah tindakan indisipliner dan akan ditangani oleh pihak yang telah ditunjuk oleh Direksi. Setiap Karyawan yang mengetahui terjadinya pelanggaran kode etik wajib melaporkan kepada pihak yang telah ditetapkan oleh Direksi tersebut dalam menangani GCG atau atasan langsung.

Penetapan Sanksi Disiplin

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Direksi dapat mengambil keputusan atas pengenaan sanksi disiplin karyawan, dan keputusan yang diambil telah mengikat untuk ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang. Pelaksanaan sanksi disiplin dilaksanakan oleh Direksi untuk sanksi disiplin sedang dan berat, sedangkan sanksi disiplin ringan dilaksanakan oleh kepala unit kerja terkait.

Penanganan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik

Secara berkelanjutan, Perseroan melakukan pemantauan terhadap penegakan Etika bisnis dan menyediakan fasilitas pengaduan terhadap pelanggaran Kode Etik. Selama tahun 2020 tidak terdapat laporan pelanggaran disiplin.

Type of Violation committed, by:

1. Give a verbal warning,
2. Give written warning and warning,
3. Decrease in principal income/release from position,
4. Termination of Employment, and/or
5. Provide administrative and legal sanctions.

The application and enforcement of the code of conduct is an obligation that must be carried out consistently by the Board of Commissioners, Directors and all employees as a work culture in daily operational activities. Violation of the code of ethics is disciplinary action and will be handled by parties who have been appointed by the Directors. Every employee who is aware of a violation of the code of ethics must report to the party determined by the Board of Directors in handling GCG or direct supervisor.

Determination Of Disciplinary Sanctions

Based on the audit report, the Board of Directors can make decisions on the imposition of employee discipline sanctions, and the decisions made are binding for follow-up by the competent authority. Disciplinary sanctions are implemented by the Directors for moderate and severe disciplinary sanctions, while minor disciplinary sanctions are carried out by the head of the relevant work unit.

Handling Complaints About Code Violations

On an ongoing basis, the Company monitors business ethics and provides complaints facilities for violations of the Code of Ethics. During 2020 there were no reports of disciplinary violations.

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Whistleblowing System

Dalam menghadapi dinamika di industri yang semakin kompetitif, Perseroan perlu menjaga reputasi dari isu ataupun persepsi negatif akibat dari penyimpangan yang dilakukan oleh karyawan.

In dealing with increasing dynamics in the competitive industry, the Company is required to maintain its reputation from issues or negative perceptions resulting from violation committed by employees.

Perseroan menyadari pentingnya pengendalian internal terhadap penyimpangan atau kecurangan yang berindikasi merugikan perusahaan sehingga dibentuklah *Whistleblowing System*. *Whistleblowing System* merupakan suatu sistem dan prosedur yang dirancang untuk menerima, menelaah dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh karyawan atau pihak lainnya.

The Company is aware of the importance of internal control against irregularities or fraud that is detrimental to the Company so a Whistleblowing System was formed. Whistleblowing System is a system and procedure designed to receive, examine and follow up complaints submitted by employees or other parties.

RUANG LINGKUP PELAPORAN

1. Permasalahan akuntansi dan pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang berpotensi mengakibatkan salah saji secara material dalam laporan keuangan.
2. Permasalahan yang menyangkut independensi audit.
3. Pelanggaran peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan program Perusahaan.
4. Peraturan internal yang berpotensi kerugian bagi perusahaan.
5. Kecurangan dan atau dugaan korupsi
6. Perilaku yang tidak sesuai Kode Etik Perusahaan dan Kode Etik Profesi.

REPORTING SCOPE

1. Accounting and internal control issues over financial reporting that have the potential to cause material misstatements in the financial statements.
2. Issues concerning audit independence.
3. Violations of regulations relating to the implementation of the Company's programs.
4. Internal regulations that have the potential for loss for the company.
5. Fraud and or suspected corruption
6. Behavior that is not in accordance with the Company's Code of Ethics and the Code of Professional Ethics.

PIHAK YANG MENGELOLA PENGADUAN

Penerapan pengaduan/penyingkapan oleh pengungkap fakta akan diterima oleh Direktur Utama.

1. Tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan *Whistleblowing System*:
 - a. Menerima dan mencatat pengaduan/penyingkapan dari pelapor;
 - b. Melakukan penelaahan awal/klarifikasi terhadap pengaduan/penyingkapan dari pelapor.
 - c. Membuat laporan penyingkapan (*disclosure report*) dan kesimpulan sementara sesuai keputusan komite;
 - d. Meneruskan laporan kepada Komisaris sesuai dengan kriteria pengaduan/penyingkapan fakta;
 - e. Berdasarkan keputusan komite dan Komisaris, melakukan audit investigasi bersama petugas khusus.
 - f. Terkait dengan tindak pidana, hasil investigasi dan laporan tersebut diteruskan kepada pihak yang berwenang untuk proses lebih lanjut.
2. Eksternal Investigator
 Dalam hal substansi pengaduan/penyingkapan terkait dengan citra/reputasi Perseroan dan/atau menimbulkan kerugian yang besar dan/atau belum pernah ditindaklanjuti oleh Perusahaan, maka sesuai persetujuan Komisaris, investigasi *Whistleblowing System* dapat bekerja sama dengan tenaga ahli atau konsultan (investigator eksternal) dan atau dengan pihak yang berwajib.

THE PARTY THAT MANAGES COMPLAINTS

The application of complaints/disclosures by whistleblowers will be accepted by the President Director.

1. Duties, authorities and responsibilities in managing the Whistleblowing System:
 - a. Receive and record complaints/disclosures from the Whistleblower;
 - b. Conduct an initial review/clarification of complaints/disclosures from the Whistleblower.
 - c. Making a disclosure report and a provisional conclusion according to the committee's decision;
 - d. Forward the report to the Commissioner in accordance with the criteria for reporting/disclosing facts;
 - e. Based on the decision of the committee and the Commissioner, conduct an investigative audit with special officers.
 - f. Related to criminal acts, the results of the investigation and the report are forwarded to the authorities for further processing.
2. Eksternal Investigator
 In the case of the substance of complaints/disclosures related to the image/reputation of the Company and/or cause substantial losses and/or has not been followed up by the Company, then according to the Commissioners' approval, the Whistleblowing System investigation can cooperate with experts or consultants (external investigators) and or with the authorities.

1

Ikhtisar 2020
2020 Highlights

2

Laporan Manajemen
Management Report

3

Profil Perusahaan
Company Profile

4

Sumber Daya
Manusia
Human Capital

5

Analisa & Pembahasan
Management
Discussion & Analysis

6

Tata Kelola
Perusahaan
Good Corporate
Governance

7

Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Corporate Social
Responsibility

MEKANISME SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (SPP)

Perseroan telah membangun mekanisme pelaporan untuk menindaklanjuti pengaduan karyawan atau stakeholders sesuai dengan Prosedur *Whistleblowing System* Perseroan melalui sarana/media email, facsimile dan SMS

Perlindungan Bagi Pelapor

Dalam pelaksanaan pengaduan/penyingkapan, *Whistleblowing System* dipayungi oleh Undang-undang No 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi.

Selain Undang-undang No 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi, Perusahaan juga bertanggungjawab atas perlindungan saksi. Sebagaimana tercantum dalam Prosedur *Whistleblowing System*, ketentuan mengenai perlindungan bagi pelapor diatur sebagai berikut:

1. Menjamin kerahasiaan pelapor, dalam melakukan proses tindak lanjut atas setiap pengaduan/penyingkapan wajib mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tidak bersalah dan profesionalisme.
2. Perusahaan berkomitmen untuk melindungi pelapor yang beritikad baik dan perusahaan akan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait serta *best practices* yang berlaku dalam penyelenggaraan sistem penyelenggaraan perlindungan pelapor.
3. Perseroan memberikan perlindungan kepada pelapor yang merupakan karyawan dari hal-hal sebagai berikut:
 - Pemecatan yang tidak adil;
 - Penurunan jabatan atau pangkat;
 - Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya; Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (*personal file record*)

VIOLATION REPORTING SYSTEM (SPP) MECHANISM

The Company has established a reporting mechanism to follow up complaints from employees or stakeholders in accordance with the Company's Whistleblowing System Procedures through means of email, facsimile and SMS.

Protection For Whistleblowers

In the implementation of complaints/disclosures, the Whistleblowing System is covered by Law No. 13 of 2006 concerning witness protection.

In addition to Law No. 13 of 2006 concerning witness protection, the Company is also responsible for witness protection. As stated in the Whistleblowing System Procedure, the provisions regarding protection for whistleblowers are regulated as follows:

1. Ensuring the confidentiality of the Whistleblower, in carrying out the process of following up on every complaint/disclosure must prioritize confidentiality, the principle of presumption of innocence and professionalism.
2. The company is committed to protecting the Whistleblowers in good faith and the company will comply with all relevant laws and best practices that apply in the implementation of the reporting protection system.
3. The Company provides protection to Whistleblowers who are employees of the following matters:
 - Unfair dismissal;
 - Job or rank demotion;
 - Harassment or discrimination in all its forms; An adverse record in his personal data file (personal file record)

Hasil dari penanganan pengaduan

Sampai dengan akhir periode pelaporan tahun 2020, tidak ada pengaduan yang masuk dan diproses, serta tidak ada sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses.

Complaints Handling Outcome

As end of 2020 reporting period, there is no complaints were received and processed, and there were no sanctions/follow-up on complaints that had been processed.

1 Ikhtisar 2020
2020 Highlights

2 Laporan Manajemen
Management Report

3 Profil Perusahaan
Company Profile

4 Sumber Daya
Manusia
Human Capital

5 Analisa & Pembahasan
Manajemen
Management
Discussion & Analysis

6 Tata Kelola
Perusahaan
Good Corporate
Governance

7 Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Corporate Social
Responsibility

Literasi dan Edukasi

Literation and Education



TANGGUNG JAWAB PRODUK

Pembiayaan sebagai bisnis utama Perseroan perlu diiringi dengan edukasi yang tepat agar nasabah memiliki informasi yang cukup dalam menerima layanan dari Perseroan. Perseroan juga menyediakan jalur komunikasi khusus bagi nasabah agar memperoleh kemudahan dalam memperoleh informasi dan melakukan transaksi dengan Perseroan.

PRODUCT RESPONSIBILITY

As the Company's main business, financing shall be accompanied by proper education so that customers have sufficient information to receive services from the Company. The Company also provides a special line of communication for customers in order to obtain convenience in obtaining information and conducting transactions with the Company.

LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN

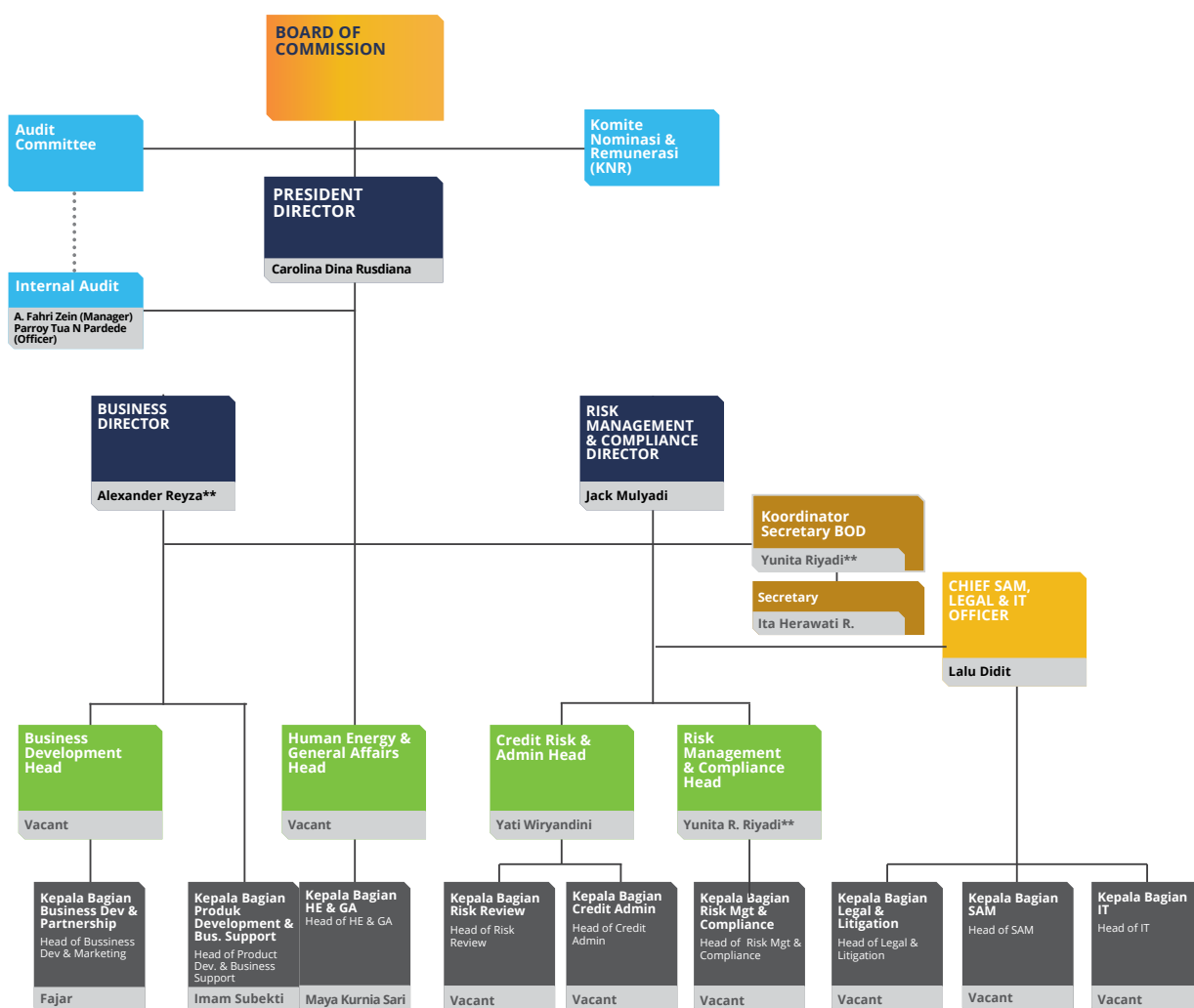
Perseroan secara konsisten merencanakan dan melaksanakan kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan, dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No : 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan/atau masyarakat. Struktur organisasi yang menjalankan fungsi literasi dan inklusi keuangan dalam tubuh Perseroan yang dapat digambarkan sebagai berikut :

FINANCIAL LITERACY AND INCLUSION

The Company consistently plans and implements Financial Literacy and Inclusion activities, with reference to the Financial Services Authority Regulation No: 76/POJK.07/2016 concerning Increasing Financial Literacy and Inclusion in the financial services sector for consumers and/or the public. The organizational structure that carries out the functions of financial literacy and inclusion within the Company can be described as follows:

Perseroan telah memberikan laporan rencana kegiatan literasi keuangan tahun 2020 yang disampaikan pada tanggal 28 Januari 2021 ke OJK dengan No. Surat 007/IBF/CPL-SK/I/21 Perihal Laporan Realisasi Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2020 PT Intan Baruprana Finance Tbk:

The Company has submitted 2020 financial literacy activity plan report which was submitted on January 28, 2021 to the OJK with No. Letter 007/IBF/CPL-SK/I/21 concerning PT Intan Baruprana Finance Tbk 2020 Financial Literacy and Inclusion Activities Realization Report.







Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility



Kepercayaan Masyarakat kepada Perseroan merupakan energi dalam menjalankan bisnis secara berkelanjutan. Program tanggung jawab sosial merupakan wujud konkret Perseroan yang memperlihatkan bahwa Perseroan peka dan peduli terhadap masyarakat serta lingkungan sekitar demi menjaga keberlangsungan bisnis Perusahaan

Trust of the society to the Company becomes the energy in running the business in a sustainable manner. The social responsibility program is a concrete manifestation showing that the Company is aware and concern to the society as well as surrounding environment in order to maintain sustainability of the Company's business.

Kepercayaan Masyarakat kepada Perseroan merupakan energi dalam menjalankan bisnis secara berkelanjutan. Program tanggung jawab sosial merupakan wujud konkret Perseroan yang memperlihatkan bahwa Perseroan peka dan peduli terhadap masyarakat serta lingkungan sekitar demi menjaga keberlangsungan bisnis Perusahaan. Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja, Perseroan berpegangan pada 3 (tiga) aspek dasar (*triple bottom lines*), yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta sebagai perusahaan yang mempunyai kepatuhan yang baik (*good compliance corporation*) dan perusahaan dengan tata kelola yang berkelanjutan (*good sustainability*

In an effort to improve performance, the Company adheres to 3 (three) basic aspects (*triple bottom lines*), which include economic, social and environmental aspects, as well as a company that has good compliance (*good compliance corporation*) and a company with good governance. sustainable (*good sustainability governance*), the Company plays an active role in improving and building the environment for the better, as well as making people independent in the economy and managing the environment.



governance), Perseroan berperan aktif dalam memperbaiki dan membangun lingkungan untuk menjadi lebih baik, serta menjadikan masyarakat mandiri dalam ekonomi dan mengelola lingkungan.

Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perseroan dikoordinasi oleh Divisi *Corporate Secretary* yang bertugas menyelaraskan program, melakukan analisis, menyusun perencanaan, pelaksanaan hingga mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. Secara garis besar, program CSR Perseroan difokuskan pada beberapa bidang utama, yaitu pengembangan sosial dan kemasyarakatan, pendidikan dan lingkungan.

The Company's Corporate Social Responsibility (CSR) program is coordinated by the Corporate Secretary Division, which is tasked with aligning programs, conducting analysis, planning, implementing and evaluating the implementation of activities. Broadly speaking, the Company's CSR programs are focused on several main areas, namely social and community development, education and the environment.

Tanggung Jawab Sosial Terkait dengan Lingkungan Hidup

Social Responsibility Related to Environment

KEBIJAKAN

Perseroan berkomitmen dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, serta memastikan kegiatan usahanya berdampak baik bagi lingkungan. Upaya Perusahaan diwujudkan melalui partisipasi dalam melestarikan lingkungan. Bagi Perseroan, program CSR ini memiliki arti lebih dari sekadar perwujudan tanggung jawab terhadap lingkungan perusahaan, akan tetapi melalui program ini Perseroan yakin bahwa tujuan pengembangan pemangku kepentingan yang berkelanjutan dan lingkungan yang lestari akan dapat tercapai.

POLICY

The Company is committed to achieve sustainable development goals, as well as assure that our business generate positive impact to the environment. The Company's initiative is manifested through participation in environment conservation. The Company views this CSR program having deeper meaning beyond manifestation of our responsibility to the environment, where through this program, the Company believes that sustainable stakeholders and environment development goals will be achieved.

PROGRAM LINGKUNGAN HIDUP YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN OPERASIONAL PERUSAHAAN

Program yang secara tidak langsung dan sangat berperan dalam usaha Perseroan dalam menjaga kelestarian lingkungan adalah pemanfaatan energi listrik. Dalam aktivitas sehari-hari, Perseroan selalu memperhatikan lingkungan hidup. Komitmen Perseroan untuk memadukan kepentingan ekonomi (*profit*), kepedulian sosial (*people*) dan partisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*) dalam operasi bisnis diwujudkan dalam bentuk pengembangan program CSR penghematan penggunaan energi Listrik di lingkungan kantor Perseroan. Program ini bertujuan mengurangi penggunaan energi listrik.

ENVIRONMENTAL PROGRAMS RELATED TO THE COMPANY'S OPERATIONAL ACTIVITIES

The program which indirectly plays a significant role in the Company's efforts to preserve the environment is the use of electrical energy. In daily activities, the Company always pays attention to the environment. The Company's commitment to combining economic interests (*profit*), social concern (*people*) and active participation in preserving the environment (*planet*) in business operations is manifested in the form of developing a CSR program to save electricity use in the Company's office environment. This program aims to reduce the use of electrical energy.

Aktivitas bisnis yang dilakukan Perseroan senantiasa telah terintegrasi dengan upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan secara internal dalam operasional Perseroan seperti penghematan energi, air dan listrik.

Bagi Perseroan, Kinerja Keuangan Berkelanjutan merupakan semacam panduan untuk mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam strategi dan operasional sehari-hari. Secara eksplisit tujuan penerapan Keuangan Berkelanjutan juga diterapkan perseroan dalam program terkait lingkungan hidup, yaitu melakukan kajian risiko sosial dan lingkungan sebagai tahap awal dalam penyusunan Kebijakan Risiko Keberlanjutan. Dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Perseroan memastikan seluruh kegiatan yang relevan memiliki izin lingkungan sesuai ketentuan. Dengan komitmen seperti itu, sepanjang 2020 tidak terdapat insiden pelanggaran peraturan perundangan terkait lingkungan.

Uraian selengkapnya tentang komitmen dan dukungan Perseroan terhadap kelestarian lingkungan disampaikan sebagai berikut:

Penghematan Kertas (Paperless)

Kertas merupakan kebutuhan penting dalam operasional Perseroan. Kertas antara lain dipakai untuk administrasi perkantoran, seperti surat-menyurat, memo, mencetak berbagai laporan perusahaan, pencatatan transaksi setoran. Adapun kertas tisu gulung dipakai untuk keperluan kelengkapan kamar mandi, sedangkan kertas tisu lembaran dipakai untuk kelengkapan ruangan dengan berbagai jenis keperluan. Perseroan berupaya semaksimal mungkin untuk menghemat penggunaan kertas antara lain melalui penggunaan perangkat digital/elektronik atau *digitalisasi* dokumen. Dengan penghematan

The business activities carried out by the Company have always been integrated with environmental preservation efforts carried out internally in the Company's operations such as saving energy, water and electricity.

For the Company, Sustainable Financial Performance is a kind of guide for integrating environmental, social and governance aspects into daily strategy and operations. The objective of implementing Sustainable Finance is also explicitly implemented by the company in programs related to the environment, namely conducting social and environmental risk studies as an initial stage in the preparation of a Sustainability Risk Policy. By paying attention to the principle of prudence, the Company ensures that all relevant activities have environmental permits in accordance with the provisions. With such a commitment, throughout 2020 there were no incidents of violations of environmental related laws and regulations.

A complete description of the Company's commitment and support to environmental sustainability is as follows:

Paper Saving (Paperless)

Paper is an important requirement in the Company's operations. Paper, among others, is used for office administration, such as correspondence, memos, printing of various company reports, recording deposit transactions. The rolled tissue paper is used for bathroom amenities, while the sheet tissue paper is used to complete the room with various types of needs. The Company makes every effort to save paper usage, among others, through the use of digital/electronic devices or digitizing documents. By saving paper, the Company will also reduce negative impacts on the environment, such as tree

kertas, maka Perseroan turut mengurangi dampak negatif bagi lingkungan, seperti penebangan pohon dan emisi gas rumah kaca.

Penghematan Energi

Selain kertas, energi merupakan kebutuhan vital bagi operasional keseharian Perseroan. Energi yang digunakan Perseroan adalah listrik dan bahan bakar minyak (BBM). Listrik diperoleh dari PT PLN (Persero), sedangkan BBM diperoleh melalui pembelian ke PT Pertamina atau perusahaan lain yang sejenis. Energi listrik digunakan untuk penerangan, penggerak sarana-prasarana kantor, seperti lift, mesin fotokopi, AC, dan sebagainya. Sementara itu, dipakai untuk menggerakkan genset sebagai sumber energi cadangan apabila pasokan listrik bermasalah/mati, BBM dipakai juga untuk kendaraan operasional kantor.

Adapun program pengelolaan energi yang dilakukan Perseroan antara lain :

1. Pengaturan operasional utilitas dan listrik seperti pemadaman lampu serta mengatur operasional utilitas sehingga lebih efisien.
2. Edukasi/sosialisasi penghematan energi dengan cara mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan.

Pengelolaan Air

Selain energi, air merupakan salah satu kebutuhan vital bagi Perseroan. Air digunakan untuk kebutuhan domestik kantor, seperti wudhu, air bilas di toilet, menyiram tanaman, dan sebagainya. Kebutuhan air sebagian besar dipasok oleh PDAM. Penggunaan air dalam laporan ini merujuk di Kantor Pusat.

Untuk meminimalkan penggunaan air yang berlebihan sehingga dapat mengurangi konsumsi air bersih, Penggunaan air Perseroan

cutting and greenhouse gas emissions.

Energy Saving

Apart from paper, energy is a vital requirement for the daily operations of the Company. The energy used by the Company is electricity and fuel oil (BBM). Electricity is obtained from PT PLN (Persero), while BBM is obtained through purchases from PT Pertamina or other similar companies. Electrical energy is used for lighting, driving office infrastructure, such as elevators, photocopying machines, air conditioning, and so on. Meanwhile, it is used to drive the generator as a backup energy source if the electricity supply has a problem/failure, BBM is also used for office operational vehicles.

The energy management programs carried out by the Company include:

1. Arrangements for utility and electricity operations such as blackout and managing utility operations so that they are more efficient.
2. Education/socialization of energy savings by turning off unused electrical appliances.

Water Management

Apart from energy, water is one of the vital needs of the Company. Water is used for domestic office needs, such as ablution, rinse water in the toilet, watering plants, and so on. Most of the water needs are supplied by PDAM. The use of water in this report refers to the Head Office.

To minimize excessive water use so as to reduce clean water consumption, the Company's water use is maximized by using

dimaksimalkan menggunakan PDAM sebagai sumber air utama dan membatasi penggunaan air tanah.

PDAM as the main water source and limiting the use of groundwater.

Biaya Konsumsi listrik dan Air Electricity and Water Consumption Costs		Tahun Year	
		2020	2019
Konsumsi listrik	Electricity Consumption	1	100%
Konsumsi air	Water Consumption	4	100%

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Corporate Social Responsibility on Occupational health and Safety

PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

Dalam mencapai target dan produktivitas yang optimal, Perseroan telah menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan sehat. Untuk itu, Perseroan telah melakukan penerapan Sistem Manajemen K3.

Setiap unit kerja dalam Perusahaan telah melakukan identifikasi potensi bahaya, menilai tingkat risiko, menetapkan upaya pengendaliannya melalui program, dan melaksanakan program yang telah disusun. Secara periodik, dilakukan evaluasi terhadap penerapan program untuk memastikan efektivitas penurunan risiko bahaya telah sesuai dengan rencana yang digunakan sebagai input data dalam menetapkan langkah-langkah perbaikan selanjutnya.

Selain itu, Perseroan juga membekali karyawan dengan berbagai aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

PELATIHAN K3 BAGI KARYAWAN

Kejadian kecelakaan kerja serius atau berakibat kehilangan jam kerja mendorong Perseroan untuk terus melakukan berbagai program pelatihan terkait dengan pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Hal ini dilakukan untuk membantu karyawan beserta keluarganya mencegah terjadinya

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS) MANAGEMENT

In achieving optimal targets and productivity, the Company has created a safe, comfortable and healthy work environment. Therefore, the Company has implemented OHS Management System.

Each work unit within the Company has identified hazard potentials, assessed risk level, stipulate its control efforts through the program, and implemented the designated programs. Evaluation on the implementation of the program is carried out periodically to ensure effectiveness of the hazard risk reduction based on the plan applied as the data input in determining further corrective plans.

In addition, the Company also equipped the employees with various Occupational Safety and Health aspects.

OHS TRAINING FOR EMPLOYEES

Severe work accident or causing loss of working hours has encouraged the Company to continuously provide training program related to occupational health and safety for the employees. This is done to help the employees and their families to prevent work accident. The Occupational Health and Safety

kecelakaan. Kampanye Keselamatan dan Kesehatan Kerja dilakukan dengan :

1. Pemasangan slogan – slogan dan rambu – rambu K3.
2. Pemasangan leaflet

HAK DAN KEWAJIBAN KARYAWAN

1. Setiap karyawan yang bekerja berhak mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan untuk keselamatan kerja.
2. Karyawan wajib diberikan pengetahuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja melalui berbagai kesempatan

KESEMPATAN KERJA YANG SAMA BAGI SETIAP KARYAWAN

Dalam Bidang HAM (Hak Asasi Manusia) Perseroan melaksanakan Aktivitas Tanggung Jawab Sosial yang diterapkan dengan memperhatikan aspek sebagai berikut :

- **Kesetaraan Gender**
Perseroan tidak membedakan Agama, Ras, Suku dan Golongan sesuai dengan amanat UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- **Aspek kesejahteraan;**
Menerapkan Sistem Pengupahan yang berkeadilan, memberikan perlindungan kesehatan bagi karyawan dan keluarganya, memberikan program Jamsostek, Asuransi Jiwa dan Dana Pensiun, memberikan Bonus (apabila Perseroan dalam kondisi mencatatkan laba), serta Tunjangan Hari Raya.
- **Aspek keselamatan kerja;**
Perseroan menjamin keselamatan dan kesehatan kerja.
- **Aspek Pengembangan;**
Meskipun dalam kondisi Pandemi Covid-19, Perseroan tetap mengadakan pelatihan yang sesuai dengan kompetensi

Campaign is done through activities, as follows

1. Installation of OHS taglines and signages.
2. Installation of leaflets.

EMPLOYEE RIGHTS AND OBLIGATIONS

1. Every employees are entitled upon BPJS Ketenagakerjaan for occupational safety.
2. Employee shall be provided by Occupational Health and Safety knowledge through various occasions.

EQUAL JOB OPPORTUNITIES FOR EVERY EMPLOYEE

In the field of Human Rights (Human Rights), the Company carries out Social Responsibility Activities which are implemented by taking into account the following aspects:

- **Gender equality**
The Company does not differentiate between Religion, Race, Ethnicity and Group in accordance with the mandate of Law no. 13 of 2003 concerning Manpower.
- **Welfare aspects;**
Implementing a just Wage System, providing health protection for employees and their families, providing Social Security, Life Insurance and Pension Fund programs, giving Bonuses (if the Company is in a profit recording condition), as well as Holiday Allowances.
- **Work safety aspects;**
The company guarantees work safety and health.
- **Development Aspects;**
Even in the conditions of the Covid-19 Pandemic, the Company continues to hold training in accordance with the

tenaga kerja berdasarkan *Training Need Analysis* yang dilakukan secara online.

competence of the workforce based on the Training Need Analyst which is conducted online.

TENAGA KERJA ANAK DAN TENAGA KERJA PAKSA

Perseroan senantiasa tunduk terhadap berbagai regulasi ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk yang berkaitan dengan usia minimal dan jam kerja karyawan. Perseroan memastikan bahwa seluruh karyawan, telah berusia di atas 25 tahun.

Sementara itu, Pada tahun 2020, Perseroan menerapkan mekanisme kerja Work From Home (WFH), meskipun menerapkan WFH, Perseroan tetap menerapkan waktu kerja sesuai dengan UU no 13 tahun 2003 Pasal 77 yang menyebutkan bahwa waktu kerja, yaitu 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Dengan ketentuan seperti itu, maka karyawan memiliki waktu istirahat yang cukup. Sementara itu, untuk karyawan yang menjalani lembur karena jenis pekerjaannya, mereka akan mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terhindar dari kerja paksa.

Ketaatan terhadap regulasi ketenagakerjaan dengan tidak mempekerjakan anak serta tidak ada kerja paksa membawa hasil dengan tidak adanya dampak negatif dan potensial terhadap praktik ketenagakerjaan di Perseroan. Selain itu, juga tidak terdapat sanksi, denda maupun pengaduan terkait kedua isu tersebut.

CHILD LABOR AND FORCED LABOR

The Company continues to comply with various labor regulations in Indonesia, including those relating to the minimum age and working hours of employees. The Company ensures that all employees are over 25 years of age.

Meanwhile, in 2020, the Company implemented the Work From Home (WFH) work mechanism, although implementing WFH, the Company continued to apply working time in accordance with Law No.13 of 2003 Article 77 which states that working time is 8 (eight) hours 1 (one) day and 40 (forty) hours 1 (one) week for 5 (five) working days in 1 (one) week. With such provisions, employees have sufficient rest time. Meanwhile, for employees who undergo overtime because of their type of work, they will receive compensation in accordance with applicable regulations so that they are avoided from forced labor.

Adherence to labor regulations by not employing children and no forced labor brings results with no negative and potential impact on labor practices in the Company. In addition, there are also no sanctions, fines or complaints related to these two issues.

Tanggung jawab Sosial Perusahaan di Bidang Kemasyarakatan

Corporate Social Responsibility in Community Aspect

KEBIJAKAN

Penerapan visi dan misi CSR Perseroan dalam bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan dimanifestasikan melalui pelaksanaan langkah-langkah strategis dengan tujuan:

- Mewujudkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat.
- Pemberdayaan masyarakat di bidang Ekonomi dan sosial

Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial merupakan pemberdayaan kondisi masyarakat (komunitas) lingkungan, berupa bantuan lepas (pengembangan sarana dan prasarana umum, sarana ibadah, pelestarian alam, peningkatan kesehatan, pendidikan dan pelatihan, dan bencana alam) dan bantuan khusus lainnya yang berasal dari Keluhan Masyarakat.

KEGIATAN

Aktivitas CSR yang dilakukan Perseroan pada tahun 2020 terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan dalam bentuk donasi, besaran donasi yang telah disalurkan Perseroan adalah Rp16.622.250,- diantaranya disalurkan dalam bentuk :

1. Kunjungan Kasih Panti Asuhan 21 Februari 2020

Kunjungan Direksi dan Manajemen lainnya untuk memanjatkan doa Bersama dengan anak yatim sekaligus memberikan santunan dana dan bingkisan dari Perseroan untuk Panti Asuhan Al-

POLICY

Implementation of the Company's CSR vision and mission in social and community development aspect is manifested through the strategic plans implementation with purposes, as follows:

- To create harmonious relationship between the company and society.
- Community development in Economics and Social aspects.

Community development in social aspect includes empowerment of the society (community) and environment, in form of one time donation (public facilities and infrastructure development, prayer sites, environment conservation, health improvement, education and training and natural disasters) and other special assistance based on complaints from the society

ACTIVITIES

The CSR activities carried out by the Company in 2020 are related to social and community development in the form of donations, the amount of donations that have been distributed by the Company is Rp. 16,622,250, including in the form of:

1. Orphanage Love Visit 21 February 2020

A visit from the Board of Directors and other management to say prayers together with orphans as well as to provide financial and gifts from the Company for the Al-Khairiyah Orphanage, Kel. Semper Barat,



Khairiyah, Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing,
Jakarta Utara

Kec. Cilincing, North Jakarta

2. Santunan Anak Yatim 18 Mei 2020

Santunan kepada 31 orang anak yatim di area sekitar Perseroan Kampung Sawah RT/RW 010/011, Jakarta Utara pada bulan Ramadhan 1441 H

2. Donation for Orphans 18 May 2020

Compensation for 31 orphans in the area around the Company Kampung Sawah RT/ RW 010/011, North Jakarta in the month of Ramadan 1441 H

3. Kunjungan dan Doa Bersama di Panti Asuhan Muslim tanggal 6 November 2020

Kunjungan ke lokasi Panti Asuhan sekaligus memberikan santunan dana dan makanan kepada Panti Asuhan Yayasan Murni Jaya berlokasi di JL. Kramat Jaya, GG Pepaya 1 No 10, Tanjung Priuk, RT.11/RW.1, Tugu Utara, Kec. Koja, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14260

3. Visit and Pray together at the Muslim Orphanage on 6 November 2020

A visit to the orphanage location as well as providing financial and food donations to Yayasan Murni Jaya Orphanage located at JL. Kramat Jaya, GG Papaya 1 No 10, Tanjung Priuk, RT.11/RW.1, Tugu Utara, Kec. Koja, Kota Jkt Utara, Special Capital Region of Jakarta 14260

4. Kunjungan dan Doa Bersama di Panti Asuhan Kristiani tanggal 6 November 2020

Kunjungan ke lokasi Panti Asuhan sekaligus memberikan santunan dana dan makanan kepada Panti Asuhan Yayasan Berkat Kasih

4. Visits and Prayers Together at a Christian Orphanage on November 6, 2020

A visit to the orphanage location as well as providing financial and food donations to the Kasih Kasih Immanuel Orphanage



Immanuel berlokasi di sekitar Perseroan, Jl. Swadaya I, RT.5/RW.3, Semper Tim., Kec. Cilincing, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14130

which is located in the vicinity of the Company, Jl. Swadaya I, RT.5/RW.3, Semper Tim., Kec. Cilincing, Kota Jkt Utara, Special Capital Region of Jakarta 14130

MEKANISME PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

Sebagai Perusahaan yang bertanggungjawab, Perseroan senantiasa berusaha memastikan bahwa keputusan dan operasional bisnis yang dilakukan tidak memberikan dampak negatif seminimal kepada masyarakat dan lingkungan. Untuk bentuk pengendalian tersebut, Perseroan membuka saluran komunikasi yang dapat digunakan pemangku kepentingan dan masyarakat setempat untuk menyampaikan keluhan atau tanggapan mereka terhadap dampak operasi Perseroan.

PUBLIC COMPLAINT MANAGEMENT MECHANISM

As a responsible company, the Company always strives to ensure that the decisions and business operations carried out do not have a minimal negative impact on society and the environment. For this form of control, the Company opens communication channels that can be used by stakeholders and the local community to submit their complaints or responses to the impact of the Company's operations.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terkait dengan Tanggung Jawab Kepada Konsumen

Corporate Social Responsibility Related To Responsibility To The Consumer

KEBIJAKAN

Perseroan memiliki komitmen untuk memenuhi tanggung jawab dalam perlindungan nasabah. Perseroan menyadari makna penting dan manfaat dari pemenuhan standar kualitas serta perlindungan konsumen terhadap setiap produk/jasa yang dihasilkan, mengingat keduanya mempunyai pengaruh yang signifikan bagi pertumbuhan kinerja usaha secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, Perseroan menetapkan dan memberlakukan kriteria yang ketat dalam proses dan output maupun pengawasan kualitas setiap produknya.

KEGIATAN

Perseroan memberikan tanggapan yang cepat terhadap berbagai permintaan dan keluhan konsumen sebagai bagian dari komitmen pelayanan. Perseroan meyakini penerapan komitmen pelayanan terbaik akan mampu mendukung target peningkatan kinerja di masa mendatang. Untuk menjamin pelayanan pada pelanggan, Perusahaan membuka layanan pengaduan dengan menyediakan saluran telpon, email maupun surat kepada pelanggan.

Komitmen Perseroan dalam memberikan layanan dan produk terbaik, serta setara kepada seluruh konsumen merupakan implementasi dan ketaatan terhadap berbagai regulasi perlindungan nasabah sebagai

POLICY

The Company has a commitment to fulfil responsibility in customer protection. The Company realizes crucial meaning and benefit from the fulfilment of quality standard and customer protection in every delivered products/service, considering both have significant impact on sustainable business performance. Therefore, the Company has stipulated and applied tight process criteria and output as well as quality monitoring on every product

ACTIVITIES

The Company provides prompt responses to various consumer requests and complaints as part of its service commitment. The company believes that the implementation of the best service commitment will be able to support the target of increasing performance in the future. To guarantee service to customers, the Company opens a complaint service by providing telephone lines, emails and letters to customers.

The Company's commitment to providing the best services and products, as well as being equal to all consumers, is the implementation and adherence to various customer protection regulations as consumers. These regulations,

konsumen. Regulasi itu, antara lain, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/ POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Seperti produk dan layanan yang sudah ada sebelumnya, Perseroan senantiasa memberikan informasi yang jelas mengenai produk dan inovasi yang dilakukan sehingga konsumen merasa aman dengan pilihannya. Adapun pemasaran produk dan layanan yang diberikan, Perseroan melakukan komunikasi pemasaran dengan merujuk pada berbagai regulasi yang berlaku. Dengan demikian, selama tahun pelaporan, tidak terdapat dampak negatif atas produk dan jasa yang dikeluarkan Perseroan. Selain itu, juga tidak terdapat produk dan layanan yang ditarik atau dibatalkan karena alasan tertentu. Lebih dari itu, selama tahun 2020, Perseroan juga tidak mencatat adanya insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran.

TINDAK LANJUT ATAS PENGADUAN KONSUMEN

Selama tahun 2020 Perseroan telah menerima aduan konsumen seluruh aduan konsumen telah diselesaikan dengan baik oleh Perseroan dengan tingkat penyelesaian 100%.

among others, are the Financial Services Authority Regulation No. 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector and the Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

As with existing products and services, the Company always provides clear information about the products and innovations made so that consumers feel safe with their choices. As for the marketing of the products and services provided, the Company conducts marketing communications by referring to various applicable regulations. Thus, during the reporting year, there was no negative impact on the products and services issued by the Company. In addition, there are also no products and services that are withdrawn or canceled for any reason. Moreover, during 2020, the Company also did not record any incidents of non-compliance related to marketing communications.

FOLLOW-UP ON CONSUMER COMPLAINTS

During 2020 the Company has received consumer complaints and all consumer complaints have been resolved properly by the Company with a 100% completion rate.